

**PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PERSENTASE PENDUDUK
MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2011-2017
(Studi pada 33 Provinsi di Indonesia)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**ABD. ROHIM ASNAWI
155030900111004**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
MALANG
2019**

MOTTO

**“Setiap Orang Akan Dikenang,
Maka Dikenanglah Sebagai Orang Baik”**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin di
Indonesia Tahun 2011-2017 (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia)

Disusun Oleh : Abd. Rohim Asnawi

NIM : 155030900111004

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pendidikan

Malang, 1 April 2019

Menyetujui,
Dosen Pembimbing II



Trisnawati, S.Sos.,M.AP
NIP. 198003072008012012

Menyetujui,
Dosen Pembimbing I



Dr. Hermawan, S.IP.,M.Si
NIP. 197204052003121001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 April 2019

Jam : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Abd. Rohim Asnawi

Judul : Pengaruh Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2017 (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia)

Dan nyatakan



LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Dr. Hermawan, S.IP., M.Si
NIP. 197204052003121001
Anggota

Trisnawati, S.Sos., M.AP
NIP. 198003072008012012
Anggota

I Gede Eko Putra Sri Sentanu, M.AP., Ph.D
NIP. 2011078312041000

Akhmad Amiruddin, S.AP., M.AP., M.Pol., Sc
NIP. 198704262015041001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, secara proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003 Pasa 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 4 April 2019
Mahasiswa



Abd. Rohim Asnawi
155030900111004

RINGKASAN

Abd. Rohim Asnawi, 2019, **Pengaruh Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2017 (Studi Pada 33 Provinsi Di Indonesia)**, Dr. Hermawan, S.IP.,M.Si, Trisnawati, S.Sos.,M.AP, 190 Hal+viii

Investasi dalam pendidikan penting untuk mencapai pengembangan, daya saing dan pertumbuhan. Investasi pendidikan secara individu selalu menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi. Hubungan ekonomi pendidikan dan kemiskinan secara lebih rinci dijelaskan dalam teori lingkaran setan kemiskinan. Pendidikan dan kemiskinan telah menjadi isu pembangunan internasional yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Indikator pembangunan pendidikan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia dikenal sebagai Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) sedangkan kemiskinan secara umum digambarkan dengan Persentase Penduduk Miskin (PPM).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Ekspanatori dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendidikan yang digambarkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) pada Tahun 2011-2017. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda dengan tiga jenis model pengujian yang berbeda berdasarkan tingkatan pada Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Penelitian ini menggunakan 3 jenis model pengujian yaitu Model 1 menguji APS 7-12, APK SD/MI/Paket A, APM SD/MI/Paket A, HLS, RLS dan AMH terhadap PPM. Model 2 menguji APS 13-15, APK SMP/Mts/Paket B, APM SMP/Mts/Paket B, HLS, RLS dan AMH terhadap PPM. Model 3 menguji APS

16-18, APK SMA/SMK/MA/Paket C, APM SMA/SMK/MA/Paket C, HLS, RLS dan AMH terhadap PPM.

Berdasarkan pengujian menunjukkan hasil bahwa APS 7-12 tahun berpengaruh negatif sebesar sebesar -0,668. APS 13-15 tahun menunjukkan hasil tidak berpengaruh karena tidak signifikan pada 0,05. APS 16-18 tahun berpengaruh positif sebesar 0,087. APM SD/MI/Paket A berpengaruh negatif sebesar -1,126. APM SMP/Mts/Paket B berpengaruh negatif sebesar -2,742. APM SMA/SMK/MA/Paket C tidak berpengaruh karena tidak signifikan pada 0,05. APK SD/MI/Paket A berpengaruh positif sebesar 0,380. APK SMP/Mts/Paket B berpengaruh positif 2,871. APK SMA/SMK/MA/Paket C berpengaruh positif sebesar 0,106. HLS pada Model Pertama berpengaruh positif sebesar 4,422, Model Kedua positif sebesar 4,030, Model Ketiga berpengaruh positif sebesar 0,153. RLS pada Model Pertama berpengaruh negatif sebesar -3,514, Model Kedua berpengaruh negatif sebesar -2,382, Model Ketiga berpengaruh negatif sebesar -2,645. AMH pada Model Pertama tidak berpengaruh karena tidak signifikan pada 0,05 yaitu dengan nilai 0,062, Model Kedua berpengaruh negatif sebesar -1,255, Model Ketiga berpengaruh negatif sebesar -0,468.

Berdasarkan pengujian variabel pendidikan yang diuji secara simultan menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) mampu mempengaruhi Persentase Penduduk Miskin. Akan tetapi semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kecil pengaruhnya terhadap kemiskinan. Hal ini didasarkan pada pengujian ketiga model pada variabel pendidikan yang menggambarkan tingkatan pendidikan. Model pertama menggambarkan tingkat pendidikan dasar (SD Sederajat), model kedua menggambarkan tingkat pendidikan menengah (SMP Sederajat) dan model ketiga menggambarkan tingkat pendidikan atas (SMA Sederajat).

SUMMARY

Abd. Rohim Asnawi, 2019, **The Effect of Education on the Percentage of Poor Population in Indonesia in 2011-2017 (Study in 33 Provinces in Indonesia)**, Dr. Hermawan, S.IP.,M.Si, Trisnawati, S.Sos.,M.AP, 190 Pages+xv

Investment in education is important to achieve development, competitiveness, and growth. Investment in individual education always results in social and economic benefits. The relationship between the education economy and poverty in more detail is explained in the theory of the vicious cycle of poverty. Education and poverty have become international development issues, known as the Sustainable Development Goals (SDGs). The indicators of education development in the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia are known as the School Participation Rate (APS), Rough Participation Rate (APK), Pure Participation Rate (APM), Old School Expectation (HLS), Average School Duration (RLS), Literacy Rate (AMH) and Illiteracy Rate (ABH) while poverty is generally described by the Percentage of Poor Population (PPM).

The type of research used is Ekspanatori with a quantitative approach. The purpose of this study was to determine the effect of education as illustrated by the School Participation Rate (APS), Pure Participation Rate (APM), Rough Participation Rate (APK), School Duration Expectation (HLS), School Length (RLS) and Literacy Rate Letter (AMH) in 2011-2017. The data in this study are secondary data published by the Central Statistics Agency (BPS) in 33 provinces in Indonesia. This study uses Multiple Linear Regression analysis techniques with three different types of testing models based on the level of School Participation Rate (APS), Pure Participation Rate (APM) and Gross Participation Rate (APK). This study uses 3 types of testing models, namely Model 1 tests APS 7-12, APK SD / MI / Package A, APM SD / MI / Package A, HLS, RLS and AMH against PPM. Model 2 tests 13-15 APS, APK SMP / Mts / Package B, APM SMP / Mts / Package B, HLS, RLS and AMH against PPM. Model 3 tests APS 16-18, APK for SMA / SMK / MA / Package C, APM for SMA / SMK / MA / Package C, HLS, RLS and AMH against PPM.

Based on the testing, the results show that the APS 7-12 years has a negative effect of -0.668. APS 13-15 years showed no effect because it was not significant at 0.05. The 16-18 year APS has a positive effect of 0.087. APM SD / MI / Package A had a negative effect of -1.126. The APM for SMP / Mts / Package B had a negative effect of -2,742. APM SMA / SMK / MA / Package C has no effect because it is not significant at 0.05. APK SD / MI / Package A has a positive effect of 0.380. APK for SMP / Mts / Package B has a positive effect on 2.871. The APK of SMA / SMK / MA / Package C has a positive effect of 0.106. HLS in the First Model has a positive effect of 4.422, the second Model is positive at 4.030, the Third Model has a positive effect of 0.153. RLS in the First Model negatively affects -3.514, the Second Model has a negative effect of -2.382, the Third Model has a negative effect of -2.645. AMH in the First Model has no effect because it is not significant at 0.05 which is 0.062, the Second Model has a negative effect of -1.255, the Third Model has a negative effect of -0.468.

Based on the testing of educational variables tested simultaneously showed that the School Participation Rate (APS), Pure Participation Rate (APM), Rough Participation Rate (APK), School Duration Expectation (HLS), School Length (RLS) and Literacy Rate (AMH) can influence the percentage of poor people. But the higher the level of education, the smaller the effect on poverty. This is based on testing the three models on educational variables that describe the level of education. The first model describes the level of basic education (elementary school equivalent), the second model describes the level of secondary education (junior high school equivalent) and the third model describes the level of education (high school equivalent).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendidikan terhadap Persentase Penduduk Miskin (Studi pada 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2017)”**.. Proses penyusunan proposal skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan semua pihak yang senantiasa membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam penyelesaian proposal skripsi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Andy Fefta Wijaya, Drs, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Hermawan, Dr.,S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti.
4. Ibu Trisnawati, S.Sos.M.AP sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti.
5. Ibu Erlita Cahyani, S.AP., M.AP sebagai sekretaris Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Skripsi dipersembahkan kepada Ibu Dasni, Bapak Saidun, Kakak Nur Sholeh, Nasihah dan Almarhumah Zulaihah serta Adik Ahmad Shoem Afinuddin.
7. Kepada yang selalu mendampingi dan menemani Liana Parquinda.
8. Kepada Keluarga besar RSC dan Teman-teman Administrasi Pendidikan angkatan 2015.

Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Malang, 4 April 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Motto	ii
Tanda Persetujuan Skripsi	iii
Tanda Pengesahan Skripsi	iv
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	v
Ringkasan	vi
Summary	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan	15
D. Kontribusi Penelitian.....	16
E. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Pendidikan	28
1. Pengertian Pendidikan.....	28
2. Kebijakan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan.....	29
3. Ekonomi Pendidikan dan Pengurangan Kemiskinan	31
C. Pembangunan Pendidikan	32
1. <i>Sustainable Development Gols</i> (SDGs)	33
2. Indikator <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Indonesia	39
D. Kemiskinan	49
1. Pengertian kemiskinan	49
2. Jenis-Jenis Kemiskinan	50
3. Pengukuran Kemiskinan	51
4. Persentase Penduduk Miskin.....	57
D. Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan	58
E. Model Konsep	61
F. Model Hipotesis.....	61
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Lokasi Penelitian	67
C. Konsep Penelitian.....	67
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	70
E. Populasi dan Sampel.....	78
F. Jenis dan Sumber Data.....	79
G. Instrumen Pengumpulan Data	80
H. Teknik Pengumpulan Data	80
I. Teknik Analisis	81
J. Analisis Data	82

BAB IV PEMBAHASAN	92
A. Gambaran Umum.....	92
B. Statistik Deskriptif	95
C. Penyajian Data	98
1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)7-12, Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM)APM SD/MI/Paket A, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM)	98
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)13-15, Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/Mts/Paket B, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM)	112
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM)	126
D. Analisis dan Interpretasi.....	139
1. Interpretasi.....	141
2. Analisis.....	150
BAB V PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran.....	160
Daftar Pustaka	162
Lampiran 1: Angka Partisipasi Kasar menurut Provinsi 2011-2017	167
Lampiran 2: Angka Partisipasi Sekolah menurut Provinsi 2011-2017	170
Lampiran 3: Angka Partisipasi Murni menurut Provinsi 2011-2017.....	173
Lampiran 4: Harapan Lama Sekolah menurut Provinsi 2011-2017.....	175
Lampiran 5: Rata-Rata Lama Sekolah menurut Provinsi 2011-2017	176
Lampiran 6: Angka Melek Huruf menurut Provinsi 2011-2017.....	177
Lampiran 7: Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi 2011-2017.....	178
Lampiran 8: Statistik Deskriptif.....	179
Lampiran 9: Hasil Uji Angka Partisipasi Sekolah (APS)7-12, Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM)APM SD/MI/Paket A, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM).....	180
Lampiran 10:Hasil Uji Angka Partisipasi Sekolah (APS)13-15, Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/Mts/Paket B, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM).....	182
Lampiran 11:Hasil Uji Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka	

Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM).....	185
Lampiran 12: Tabel Distribusi t tabel	188
Lampiran 13: Tabel Distribusi F tabel	189
Lampiran 14: Tabel Distribusi Durbin-Watson	190



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Data capaian indikator pendidikan 2011-2017	11
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1	Konsep Variabel Penelitian.....	72
Tabel 3.2	Pengambilan keputusan autokorelasi	81
Tabel 4.1:	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi 2002-2016	94
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	96
Tabel 4.3	Coefficients	99
Tabel 4.4	Coefficient Correlations	100
Tabel 4.5	pengambilan keputusan autokorelasi	101
Tabel 4.6	Model Summary.....	102
Tabel 4.7	Perhitungan Durbin-Watson	102
Tabel 4.8	Model Summary.....	106
Tabel 4.9	Anova	108
Tabel 4.10	Coefficients	110
Tabel 4.11	Coefficients	113
Tabel 4.12	Coefficient Correlations	114
Tabel 4.13	Run Test	115
Tabel 4.14	Run Test	116
Tabel 4.15	Model Summary.....	120
Tabel 4.16	Anova	122
Tabel 4.17	Coefficients	123
Tabel 4.18	Coefficients	127
Tabel 4.19	Coefficient Correlations	128
Tabel 4.20	Pengambilan Keputusan Autokorelasi	129
Tabel 4.21	Model Summary.....	129
Tabel 4.22	Perhitungan Durbin-Watson	130
Tabel 4.23	Model Summary.....	134
Tabel 4.24	Anova	135
Tabel 4.25	Coefficients	137
Tabel 4.26	Interpretasi Angka Partisipasi Sekolah (APS)	141
Tabel 4.27	Interpretasi Angka Partisipasi Murni (APM).....	142
Tabel 4.28	Interpretasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	143
Tabel 4.29	Interpretasi Harapan Lama Sekolah (HLS).....	145
Tabel 4.30	Interpretasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS).....	146
Tabel 4.31	Interpretasi Angka Melek Huruf (AMH)	147
Tabel 4.32	Interpretasi APS, APK, APM, HLS, RLS dan AMH	149

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Profil kemiskinan pada tahun 2018.....	9
Gambar 2.1	Model Konsep	61
Gambar 2.2.	Model Hipotesis 1	61
Gambar 2.3.	Model Hipotesis 2	63
Gambar 2.4.	Model Hipotesis 3	65
Gambar 4.1.	Keadaan Geografi Indonesia	93
Gambar 4.2	Scatterplot.....	103
Gambar 4.3	Histogram	105
Gambar 4.4	Normal Plot of Regression Standardized Residual	105
Gambar 4.5	Scatterplot.....	117
Gambar 4.6	Histogram	119
Gambar 4.7	Normal Plot of Regression Standardized Residual	119
Gambar 4.8	Scatterplot.....	131
Gambar 4.9	Histogram	133
Gambar 4.10	Normal Plot of Regression Standardized Residual	133



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No.20 Tahun 2003). Pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama membawa masyarakat yang baru bagi penunaian kewajiban dan tanggungjawab didalam masyarakat (Ahmadi, 2016:34). Sedangkan menurut Theodore Bramed dalam Husamah,dkk (2015:31) berpendapat bahwa pendidikan yaitu sebagai pengayom dan pengubah kehidupan suatu masyarakat jadi lebih baik dan membimbing masyarakat yang baru supaya mengenal tanggungjawab bersama masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai fungsi mengubah kehidupan masyarakat agar memiliki keterampilan hidup sehingga mampu mengubah kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan sumberdaya manusia.

Pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan terdapat tiga aliran yaitu naturalisme, empirisme dan konvergensi (Jalaluddin dan Abdullah, 2016:196). Aliran naturalisme menganggap bahwa manusia memiliki potensi bawaan yang dapat berkembang secara alami tanpa perlu bimbingan dari luar, aliran empirisme menganggap bahwa manusia tumbuh dan berkembang atas bantuan atau karena adanya intervensi lingkungan sedangkan aliran konvergensi memiliki pandangan gabungan dari kedua aliran tersebut (Jalaluddin dan Abdullah, 2016:196-197). Ketiga aliran tersebut kemudian menjadi dasar pemikiran tentang manusia dalam kaitan dengan problematika pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Lebih lanjut Husamah,dkk (2015:29-30) mengungkapkan bahwa konsep pendidikan sebagai proses transformasi budaya, proses pembentukan pribadi, proses penyiapan warga negara dan proses penyiapan tenaga kerja.

Permasalahan tenaga kerja dan pendidikan tidak terlepas dari pendidikan liberal yang dianut oleh beberapa negara. Pendidikan liberal sebagai filsafat pendidikan yang memberdayakan individu dengan pengetahuan yang luas dan keterampilan yang diberikan, menekankan secara kuat pada nilai-nilai, etika, dan kecakapan-kecakapan sipil dan dicirikan dengan mengarah pada tantangan terhadap isu-isu yang penting dan lebih tepat dipahami sebagai cara belajar daripada sebagai kegiatan mempelajari hal-hal khusus (Soyomukti, 2016:138). Liberalisme pendidikan identik dengan kapitalisme neoliberal yang mengupayakan pendidikan sebagai bentuk proses untuk melanggengkan kesadaran dan pola hubungan masyarakat

yang sesuai dengan tujuan untuk melanggengkan neoliberalisme yang menguntungkan pemilik modal (Soyomukti, 2016:141-142). Pandangan ini beranggapan bahwa pendidikan berfungsi sebagai penguatan sumberdaya manusia secara bebas dan individualis agar manusia memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia kerja.

Liberalisme pendidikan kemudian berkembang kearah liberalisme ekonomi pendidikan yang dikenal menjadi kapitalisme pendidikan. Teori pendidikan kapitalisme menyebutkan bahwa sistem ekonomi lahir untuk menggantikan tatanan feodal yang telah lama berdiri dengan didukung oleh model pendidikan tradisional dan budaya tradisi yang pengetahuannya sangat tidak ilmiah menuju pendidikan yang digunakan untuk mendukung industrialisasi dan ekonomi komersial (Soyomukti, 2016:168). Pendidikan secara tidak langsung diarahkan pada perkembangan ekonomi dan persaingan pasar sehingga sistem pendidikan dan sistem ekonomi saling mempengaruhi (Soyomukti, 2016:22). Keterkaitan antara sistem ekonomi dan sistem pendidikan bisa mengakibatkan ketimpangan sosial disebabkan tidak meratanya distribusi pendidikan dan ketidakmampuan ekonomi dalam menjangkau pendidikan sehingga mengakibatkan kemiskinan. Hubungan ekonomi pendidikan dan kemiskinan secara lebih rinci dijelaskan dalam teori lingkaran setan kemiskinan.

McKee (1981:227) dalam Ahmadi (2016:211) berpendapat bahwa pendidikan dan kemiskinan digambarkan dengan lingkaran setan yang artinya penduduk atau masyarakat miskin karena pendidikannya rendah dan

pendidikan masyarakat/penduduk rendah dikarenakan masyarakat miskin. Teori ini menekankan kemiskinan pada dimensi manusia sebagai penyebab kemiskinan dengan asumsi bahwa masyarakat miskin dikarenakan masyarakat tidak terdidik. Sandefur (1988:29-30) dalam Ahmadi (2016:211) juga menambahkan bahwa individu-individu memiliki rasio kemiskinan yang berbeda dalam beberapa kondisi kehidupan.

Ekonomi, politik, pendidikan dan kemiskinan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Politik digambarkan dengan kebijakan pemerintah atau kebijakan publik dalam penanggulangan masalah kemiskinan (Haughton & Shahidur, 2012:6). Kebijakan publik dalam hal ini dijabarkan dalam kebijakan pendidikan yang merupakan bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik dengan arti yang lebih luas kebijakan pendidikan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara dalam bidang pendidikan sebagai salah satu tujuan pembangunan negara secara keseluruhan (Rusdiana, 2015:36). Salah satu negara yang pernah menerapkan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan melalui pendidikan adalah Amerika Serikat. *No Child Left Behind* (NCLB) adalah kebijakan atau undang-undang yang paling luas dalam sejarah pendidikan publik di Amerika Serikat. NCLB memisahkan hasil penilaian di seluruh negara bagian dalam subkelompok, mengharuskan sekolah untuk membuat dan mengeluarkan kartu laporan untuk lebih memperhatikan Hispanik, Afro-Amerika, sosial ekonomi rendah, kemampuan berbahasa Inggris yang terbatas, dan siswa berkebutuhan khusus. Agenda ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan ada korelasi

langsung antara kemiskinan dan pencapaian pendidikan. Sebab, sebagai modal sosial tumbuh begitu pula modal manusia atau investasi pendidikan (Hunter, 2015).

Brazil melakukan hal yang sama dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Kebijakan pendidikan di Brazil untuk pengentasan kemiskinan dilakukan dengan tahapan (1) Langkah-langkah legislatif, (2) Desentralisasi, (3) Partisipasi masyarakat, (4) Isi kurikuler, (5) Buku-teks, (6) Televisi sekolah, (7) Program makan siang di sekolah, (8) Evaluasi sistematis (Boakari, 2015). Brazil dan Amerika Serikat melakukan hal sama dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan penerapan kebijakan untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui investasi pendidikan. Hal ini dikarenakan inisiatif kebijakan ini dilakukan tidak secara langsung mengatasi tantangan pendidikan yang dialami oleh siswa yang kurang beruntung tetapi meningkatkan pencapaian siswa secara keseluruhan atau untuk mengurangi pencapaian dan pencapaian pendidikan kesenjangan antara siswa yang diuntungkan dan kurang beruntung (Ladd, 2012).

Investasi pendidikan merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi dan sumberdaya manusia (Rusdiana, 2015:40). Selain itu Haughton & Shahidur (2012:5) berpendapat bahwa hubungan antara kemiskinan dan pendidikan cukup penting karena pendidikan memegang peran utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Secara lebih ringkas kemiskinan difungsikan sebagai objek dan subjek dalam sistem ekonomi, politik dan pendidikan atau

dengan kata lain kemiskinan dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan dan disisi lain kemiskinan menjadi penghambat pembangunan (Assegaf, 2015:19).

Tanzania memberikan contoh yang jelas tentang hubungan pendidikan dan kemiskinan bahwa mendapatkan anak-anak ke sekolah sendiri tidak cukup untuk pengurangan kemiskinan. Kualitas pendidikannya sangat miskin sehingga banyak manfaat potensial dari pendidikan belum terealisasi. Kasus Tanzania menggambarkan bahwa sistem pendidikan sekunder tidak menghasilkan kualitas yang cukup bagi lulusan untuk menyediakan cukup guru sehingga tidak cukup untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan menengah untuk membangun fondasi yang baik untuk membangun kualitas (Wedgwood, 2007). Yu & Tianhui (2011) menunjukkan bahwa dampak kekuatan pengeluaran keuangan dalam bidang pendidikan secara absolut mengurangi populasi kemiskinan semakin luar biasa dengan ekstensi waktu di provinsi Sichuan pada tahun 2000 hingga 2009.

Pendidikan dan kemiskinan telah menjadi isu pembangunan internasional yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Isu pendidikan menjadi tujuan keempat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan keempat *Sustainable Development Goals* (SDGs) pendidikan yaitu mencapai pendidikan berkualitas, mencapai pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua serta menegaskan kembali keyakinan bahwa pendidikan adalah salah satu kendaraan yang paling kuat dan terbukti untuk pembangunan berkelanjutan (undp.org, 2018). Lebih lanjut

United Nations Development Programme (UNDP) tujuan ini memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan sekolah dasar dan menengah gratis pada tahun 2030. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses yang sama ke pelatihan kejuruan yang terjangkau, untuk menghilangkan kesenjangan gender dan kekayaan, dan mencapai akses universal ke pendidikan tinggi yang berkualitas.

Sedangkan kemiskinan menjadi tujuan pertama dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu komitmen untuk menyelesaikan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi pada 2030 dengan menargetkan pengentasan masyarakat rentan, meningkatkan akses ke sumber daya dasar dan layanan, dan mendukung masyarakat yang terkena dampak konflik dan bencana terkait iklim (undp.org,2018). Lebih lanjut *United Nations Development Programme* (UNDP) menjelaskan lebih dari 800 juta orang masih hidup dengan kurang dari US \$ 1,25 per hari, banyak yang kekurangan akses ke makanan yang cukup, air minum yang bersih dan sanitasi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara seperti Cina dan India telah mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, tetapi kemajuannya tidak merata. Perempuan lebih mungkin hidup dalam kemiskinan daripada laki-laki karena akses yang tidak setara terhadap pekerjaan, pendidikan, dan properti berbayar.

Pendidikan dan kemiskinan dalam isu pembangunan global setidaknya ada tiga alasan utama yang menjelaskan batas-batas agenda global untuk pembangunan yaitu pertama, agenda global tidak memperhitungkan bahwa

meskipun pendidikan semakin diperlukan, itu juga tidak cukup sebagai satu-satunya strategi untuk mengurangi kemiskinan dan merangsang pengembangan, kedua, ini adalah agenda yang masih bergantung pada ortodoksi dan tidak mengubah esensi neo-liberalisme, ketiga, ini adalah agenda yang menghilangkan ketimpangan sosial dan pendidikan sebagai tujuan eksplisit untuk ditangani (Tarabini, 2010). Ketiga hal tersebut mengandung arti bahwa jika pendidikan yang lebih banyak dan lebih baik tidak sejajar dengan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, jika orang miskin tidak memiliki pilihan untuk mengambil keuntungan dari investasi pendidikan, dan jika hanya akses ke sekolah untuk murid miskin dijamin tanpa secara substansial mengubah sekolah dan kondisi sosial di mana sekolah proses berlangsung maka jumlah kemiskina akan terus ada (Tarabini, 2010).

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018. Penyebab penurunan persentase penduduk miskin dibagi atas peranan makanan dan non makanan.



Gambar 1.1: Profil kemiskinan pada tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pengukuran kemiskinan melalui pendidikan dapat diukur dengan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis atau sampai tingkat mana masyarakat mendapat pendidikan formal (Haughton & Shahidur, 2012:3). Lebih lanjut Haughton & Shahidur (2012:5) mengungkapkan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pendidikan cukup penting karena pendidikan memegang peran utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang diperlukan oleh kaum miskin adalah pendidikan fungsional untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah masyarakat, tanpa biaya atau biaya rendah serta dapat dituntaskan dalam waktu yang singkat (Ahmadi, 2016:212).

Pengentasan kemiskinan tidak hanya dapat dilakukan melalui pendidikan formal akan tetapi juga bisa dengan jalur pendidikan nonformal dan informal. Philip H. Combs dan Manzoor Ahmed dalam Ahmadi

(2016:213) mengungkapkan bahwa pendidikan nonformal cocok dan potensial bagi pemberdayaan masyarakat miskin, baik kalangan pemuda maupun orang dewasa, dan untuk masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Pendidikan nonformal merupakan aktivitas pendidikan yang berlangsung secara melembaga diluar sistem pendidikan formal yang berfungsi sebagai proses modal manusia yang selanjutnya menjadi aset bagi pemberdayaan masyarakat miskin sehingga mereka mampu memecahkan masalah hidupnya secara berkelanjutan (Ahmadi, 2016:215).

Pendidikan formal dan nonformal tidak hanya memberikan manfaat pembangunan secara ekonomi yaitu peningkatan produktivitas yang potensial bagi peningkatan pendapatan tetapi juga non-ekonomi yaitu peningkatan kualitas diri sosial peserta didik (Ahmadi, 2016:214). Efektifitas pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara tidak langsung memiliki dampak dari pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan termasuk dalam agenda pembangunan global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indikator pembangunan pendidikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia dikenal sebagai Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HRL). Capaian indikator pendidikan selama 7 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 1.1: Data capaian indikator pendidikan 2011-2017

INDIKATOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Partisipasi Sekolah(APS)							
7-12 Tahun	97,62	98,02	98,42	98,92	99,09	99,09	99,14
13-15 Tahun	87,99	89,76	90,81	94,44	94,72	94,88	95,08
16-18 Tahun	57,95	61,49	63,84	70,31	70,61	70,83	71,42
Angka Partisipasi Murni(APM)							
SD/MI/Paket A	91,07	92,54	95,59	96,45	96,70	96,82	97,19
SMP/Mts/Paket B	68,36	70,93	73,88	77,53	77,82	77,95	78,40
SM/SMK/MA/Paket C	48,07	51,88	54,25	59,35	59,71	59,95	60,37
Angka Partisipasi Kasar (APK)							
SD/MI/Paket A	102,57	104,3	107,71	108,87	110,50	109,31	108,50
SMP/Mts/Paket B	89,83	89,49	85,96	88,63	91,17	90,12	90,23
SM/SMK/MA/Paket C	64,9	68,8	66,61	74,26	78,02	80,89	82,84
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,1
Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85
Angka Melek Huruf (AMH)	92,81	93,25	93,92	95,12	95,22	95,38	95,92

Sumber: *Badan Pusat Statistik
Olahan Penulis, 2018*

Pembangunan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjamin dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial sehingga terhindar dari garis kemiskinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ahmadi, 2016:209-211).

Profil kemiskinan sebuah negara menjelaskan tentang fakta-fakta utama seputar kemiskinan (dan secara khusus, ketimpangan), kemudian membahas pola kemiskinan untuk melihat berbagai jenis kemiskinan berdasarkan geografi (misalnya, berdasarkan wilayah, perkotaan atau pedesaan, pegunungan atau dataran, dan sebagainya), berdasarkan karakteristik masyarakat (misalnya, dalam masyarakat yang mempunyai dan tidak mempunyai sekolah), dan berdasarkan karakteristik rumah tangga (misalnya, berdasarkan pendidikan kepala keluarga atau jumlah anggota rumah tangga)

(Haughton & Shahidur (2012:133). Profil kemiskinan merupakan suatu perbandingan tentang kemiskinan yang komprehensif yang menunjukkan beragamnya kemiskinan dalam beberapa subkelompok masyarakat. Sebuah profil kemiskinan yang disajikan dengan baik dapat memberi berbagai informasi dan sangat bermanfaat untuk menilai bagaimana pola perubahan perekonomian sektoral atau regional berpotensi memengaruhi kemiskinan secara keseluruhan, meskipun profil kemiskinan tersebut biasanya menggunakan teknik-teknik dasar seperti tabel dan grafik. Sandefur (1988:29-30) dalam Ahmadi (2016:211) juga menambahkan bahwa individu-individu memiliki rasio kemiskinan yang berbeda dalam beberapa kondisi kehidupan. Kemiskinan pada setiap individu atau kelompok masyarakat dapat berbeda berdasarkan kondisi geografis, karakteristik masyarakat dan karakteristik rumah tangga maka dari itu perlu diteliti kemiskinan pada tiap provinsi. Provinsi dalam penelitian ini meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua kecuali Kalimantan Utara dikarenakan Kalimantan Utara merupakan provinsi baru dan hanya memiliki 2 tahun data.

Permasalahan pendidikan dan kemiskinan penting untuk diteliti dan dikaji dalam sebuah negara. Isu mendasar masalah kemiskinan sebuah negara adalah pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yaitu pertumbuhan hanya disumbang oleh beberapa orang kaya sementara kemiskinan dan distribusi pendapatan semakin memburuk sehingga mengakibatkan ketimpangan (Kemendiknas, 2010:1). Fakta ini menyebabkan fenomena kemiskinan dan penyebab kemiskinan yaitu pendidikan menjadi topik yang sangat penting untuk diteliti.

Berdasar pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui pendidikan yang diproyeksikan oleh indikator pendidikan berupa Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HRL) memiliki pengaruh terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) seperti yang diungkapkan Gupta, dkk (2011) bahwa kemiskinan yang ditentukan oleh berbagai faktor salah satunya pendaftaran di Pendidikan Tinggi di Bengal Barat, maka dari itu peningkatan APK (*gross enrollment ratio*) secara signifikan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pendidikan terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2017 (Studi pada 33 Provinsi di Indonesia)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Angka Partisipasi Kasar (APK) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017?
5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017?
6. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-2017?
7. Apakah terdapat pengaruh terdapat pengaruh secara simultan Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka

Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HRL) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-2017?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
2. Mengetahui pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
3. Mengetahui pengaruh Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
4. Mengetahui pengaruh Angka Partisipasi Kasar (APK) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
5. Mengetahui pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
6. Mengetahui pengaruh Harapan Lama Sekolah (HRL) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-2017.

7. Mengetahui pengaruh secara simultan Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HRL) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-2017.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam teori Lingkaran Setan Kemiskinan, kebijakan pendidikan, ekonomi pendidikan dan kemiskinan. tentang pengaruh pendidikan yang digambarkan dengan Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HRL) terhadap Kemiskinan yang digambarkan dengan Persentase Penduduk Miskin (PPM).

2. Kontribusi Praktis

a. Pemerintah

Manfaat penelitian dapat memberikan gambaran tentang pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian bisa dijadikan bahan evaluasi, pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat serta cara alternatif dalam pengentasan kemiskinan.

b. Masyarakat

Manfaat penelitian bagi masyarakat dapat dijadikan referensi dan informasi dalam perubahan perilaku masyarakat akan pentingnya pendidikan baik formal, nonformal maupun informal dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat dalam melanjutkan pendidikan.

c. Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tambahan bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai penelitian dalam topik yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti beserta alasan-alasan yang mendukung rumusan masalah yang dijadikan dalam topik penelitian. Uraian berikutnya, perumusan masalah yang berisi tentang masalah- masalah yang akan dicari jawabannya melalui analisis data. Bab ini juga berisi tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai referensi dan kajian pustaka yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, seperti hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh pendidikan dan kemiskinan dengan penelitian yang akan dilakukan. Uraian berikutnya, teori-teori terkait permasalahan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai bagaimana rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya dapat terjawab dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Adapun metode dalam penelitian ini terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, serta variabel dan pengukuran. Bab ini juga berisi mengenai penjelasan terkait populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menggunakan deskripsi statistik variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan. Uraian selanjutnya yaitu pengujian berbagai asumsi klasik yang harus dipenuhi dan penjabaran hasil analisis data. Bab ini juga menjelaskan pembahasan hasil penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah, serta berbagai keterbatasan dalam penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dalam penelitian. Kesimpulan diambil dan ditunjukkan sebagai representasi dari seluruh hasil penelitian. Saran ditujukan oleh peneliti bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Dini Amaliah (2015)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap Persentase Penduduk Miskin (Studi Kasus di DKI Jakarta Pada Tahun 2009-2013). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan unit yang dianalisis adalah persentase penduduk miskin (PPM), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Sumber data adalah data sekunder berupa buku, kamus, artikel ilmiah, data yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Variabel penelitian ini yaitu Variabel Persentase Penduduk Miskin (Y), Variabel Angka Partisipasi Kasar (X1) dan Variabel Angka Partisipasi Murni (X2). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Tidak terdapat pengaruh signifikan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni terhadap persentase penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2009-2013 baik secara parsial maupun secara bersama-sama yang ditunjukkan oleh besarnya F hitung $0,572 <$ dari F tabel 9,55 pada taraf signifikan 0,05.

2. Ita Fitriati dan Muhammad Ghazali (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Ita Fitriati dan Muhammad berjudul Pemodelan Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia Menggunakan *Support Vector Regression*. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data SUSENAS dengan individu pengamatan adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode *Support Vector Regression* (SVR) untuk menaksir Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) dengan menggunakan variabel prediktor Rata-rata lama sekolah (X). Model *Support Vector Regression* (SVR) pada penelitian ini menggunakan beberapa kernel berbeda yaitu kernel linear, *polynomial* dan RBF. Kriteria model terbaik adalah model yang menghasilkan MSE yang terkecil dan R^2 terbesar. Model terbaik yang dihasilkan adalah model dengan menggunakan kernel RBF.

3. Durrotul Mahsunah (Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Unesa)

Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh parsial dan secara bersama-sama jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ekspansi asosiatif dengan menggunakan metode analisis regresi

berganda. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran sebagai variabel bebas. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil uji F terlihat ketiga variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (kemiskinan). Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dikarenakan jumlah penduduk di Jawa Timur lebih didominasi oleh usia-usia produktif sehingga kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masih terbuka lebar.

4. Pilih Karini (2018)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini mengkaji pengaruh angka partisipasi sekolah (APS) usia 16-18 tahun terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis statistik yaitu regresi sederhana. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik Provinsi Bangkabelitung tahun 2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian ini, perbandingan perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) usia 16-18 rentang tahun 2012 hingga 2016 sejalan dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangkabelitung mengalami tren

peningkatan, sedangkan tingkat kemiskinan mengalami tren penurunan meski tidak terlalu signifikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah, maka semakin baik pula perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bangkabelitung.

5. Indah Dewi Nirwana (2012)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin (Studi Pada 33 Provinsi Di Indonesia, 6 Provinsi di Pulau Jawa, Dan 27 Provinsi Di Luar Pulau Jawa Pada Tahun 2006-2011). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variabel pendidikan yang digambarkan oleh Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia, 6 provinsi di Pulau Jawa, dan 27 provinsi di luar Pulau Jawa pada tahun 2006-2011. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Unit yang dianalisis adalah PPM, AMH, APS, AMP, APK, dan RLS pada 33 provinsi di Indonesia, 6 provinsi di Pulau Jawa, dan 27 provinsi di luar Pulau Jawa pada tahun 2006-2011. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku, kamus, artikel ilmiah, data yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia, *United Nations Development Programme* (UNDP), dan *United Nations* (UN). Tipe data yang digunakan adalah data panel, berupa data runtun waktu selama tahun 2006-2011 dan data *cross section* berupa

33 provinsi di Indonesia, 6 provinsi di Pulau Jawa, dan 27 provinsi di luar Pulau Jawa. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa AMH, APS, APM, APK, dan RLS memiliki pengaruh terhadap PPM. Perhitungan untuk 33 provinsi di Indonesia pendidikan memiliki pengaruh sebesar 82.8% terhadap kemiskinan, untuk perhitungan pada 6 provinsi di Pulau Jawa pendidikan memiliki pengaruh 98.1% terhadap kemiskinan, dan untuk perhitungan pada 27 provinsi di luar Pulau Jawa pendidikan memiliki pengaruh sebesar 83.2% terhadap kemiskinan.

Perhitungan pada 33 provinsi di Indonesia, APS berpengaruh positif, APM dan RLS berpengaruh negatif, AMH dan APK tidak berpengaruh terhadap PPM pada tahun 2006-2011. Perhitungan pada 6 provinsi di Pulau Jawa, APS berpengaruh positif, RLS berpengaruh negatif, AMH, APM, dan APK tidak berpengaruh terhadap PPM pada tahun 2006-2011. Perhitungan pada 27 provinsi di Pulau Jawa, APS berpengaruh positif, APM dan RLS berpengaruh negatif, AMH dan APK tidak berpengaruh terhadap PPM pada tahun 2006-2011. Penelitian ini hanya berfokus kepada satu aspek penyebab kemiskinan, yaitu pendidikan yang digambarkan oleh AMH, APS, APM, APK, dan RLS. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap PPM yaitu produktivitas, pendapatan, investasi, dan tabungan. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai kondisi pendidikan dan kemiskinan di Indonesia pada tahun

2006-2011 dan dapat digunakan sebagai penelitian pendahuluan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan sebagai salah satu komponen untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	METODE ANALISIS	LOKASI dan JENIS DATA	HASIL
<i>Indah Dewi Nirwana</i>	Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia, 6 Provinsi Di Pulau Jawa, Dan 27 Provinsi Di Luar Pulau Jawa Pada Tahun 2006-2011)	Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM)	regresi linier berganda	33 provinsi di Indonesia, 6 provinsi di Pulau Jawa, dan 27 provinsi di luar Pulau Jawa pada tahun 2006-2011	Hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa AMH, APS, APM, APK, dan RLS memiliki pengaruh terhadap PPM. Pada perhitungan untuk 33 provinsi di Indonesia pendidikan memiliki pengaruh sebesar 82.8% terhadap kemiskinan, untuk perhitungan pada 6 provinsi di Pulau Jawa pendidikan memiliki pengaruh 98.1% terhadap kemiskinan, dan untuk perhitungan pada 27 provinsi di luar Pulau Jawa pendidikan memiliki pengaruh sebesar 83.2% terhadap kemiskinan. Perhitungan pada 33 provinsi di Indonesia, APS berpengaruh positif, APM dan RLS berpengaruh negatif, AMH dan

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	METODE ANALISIS	LOKASI dan JENIS DATA	HASIL
					<p>APK tidak berpengaruh terhadap PPM pada tahun 2006-2011. Perhitungan pada 6 provinsi di Pulau Jawa, APS berpengaruh positif, RLS berpengaruh negatif, AMH, APM, dan APK tidak berpengaruh terhadap PPM pada tahun 2006-2011.</p>
<p>Pilih Karini</p>	<p>Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16—18 Tahun Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>	<p>angka partisipasi sekolah, tingkat kemiskinan</p>	<p>regeresi sederhana</p>	<p>PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG tahun 2012—2016</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini, perbandingan perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) usia 16—18 rentang tahun 2012 hingga 2016 sejalan dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangkabelitung mengalami tren peningkatan, sedangkan tingkat kemiskinan mengalami tren penurunan meski tidak terlalu signifikan. Dengan demikian, semakin tinggi angka partisipasi sekolah, maka semakin baik pula perkembangan tingkat</p>

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	METODE ANALISIS	LOKASI dan JENIS DATA	HASIL
					kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bangkabelitung
Dini Amaliah	Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap Persentase Penduduk Miskin	regresi linier berganda	DKI Jakarta Pada Tahun 2009-2013	Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa Tidak terdapat pengaruh signifikan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni terhadap persentase penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2009-2013 baik secara parsial maupun secara bersama-sama yang ditunjukkan oleh besarnya F hitung $0,572 <$ dari F tabel 9,55 pada taraf signifikan 0,05
<i>Durrotul Mahsunah</i>	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur	jumlah penduduk (X1), pendidikan (X2), pengangguran (X3), sebagai variabel independen/bebas terhadap kemiskinan di Jawa Timur (Y) sebagai variabel dependen/terikat	regresi berganda	Jawa timur	Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Untuk uji F terlihat ketiga variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	METODE ANALISIS	LOKASI dan JENIS DATA	HASIL
					variabel terikat (kemiskinan).
Ita Fitriati ¹ , Muhammad Ghazali ²	Pemodelan Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan Di Indonesia Menggunakan Support Vector Regression	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) variabel prediktor Rata-rata lama sekolah (X).	<i>Support Vector Regression</i> (SVR)		Model terbaik untuk mengestimasi pengaruh faktor pendidikan masyarakat yang diukur melalui rata-rata lama sekolah terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia dengan metode <i>Support Vector Regression</i> (SVR) diperoleh dengan menggunakan kernel <i>Eksponetial Gaussian Radial Basis Function</i> (ERBF), yang ditunjukkan dengan nilai MSE yang paling rendah dan R ² yang sangat besar.

Sumber: Olahan Penulis, 2018

Penelitian terdahulu telah menguji pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan. Pendidikan digambarkan dengan variabel Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) atau Angka Buta Huruf (ABH) sedangkan kemiskinan digambarkan dengan persentase penduduk miskin. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil pengujian pengaruh beberapa variabel pendidikan di beberapa daerah tidak terlalu signifikan terhadap kemiskinan akan tetapi hasil pengujian yang dilakukan dengan hampir seluruh variabel pendidikan menunjukkan

pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian menguji seluruh variabel pendidikan yang digambarkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS,) Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) atau Angka Melek Huruf (AMH) pada 33 provinsi di Indonesia. Selain itu penelitian juga menggunakan 3 model pengujian yang menggambarkan tingkatan pendidikan pada variabel tersebut.

B. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Ahli mendefinisikan pendidikan dengan makna yang berbeda-beda tergantung disiplin dan ilmu dan pengalaman para ahli yang bersangkutan (Ahmadi, 2016:31). Menurut Prof. Logde seorang filsuf pendidikan mengatakan bahwa pendidikan dimaknai dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian pendidikan dalam arti luas adalah pengalaman dalam hidup atau pendidikan adalah kehidupan sedangkan dalam arti sempit pengertian pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu dan dalam jangka waktu tertentu (Ahmadi, 2016:31-32). Menurut Brubacher seorang filsuf pendidikan modern mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam menyesuaikan dirinya dengan alam, teman, dan alam semesta atau dengan kata lain pendidikan merupakan perkembangan terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi manusia,

moral, intelektual dan jasmani untuk perkembangan pribadi manusia yang digunakan untuk perkembangan masyarakat serta tujuan hidup manusia (Ahmadi, 2016:32-33). Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapapun terutama negara, hal ini dapat dimaknai pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan oleh sekolah sebagai lembaga tempat mendidik sebagai upaya penyadaran agar anak mempunyai kemampuan kognitif dan kesiapan mental sempurna agar berguna bagi masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan memikul tanggungjawab sebagai individu serta makhluk sosial (Soyomukti, 2016:30). Kesimpulan berdasarkan pendapat tersebut yaitu pendidikan merupakan suatu proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri dengan aspek penyadaran, pencerahan, pemberdayaan dan perubahan perilaku.

2. Kebijakan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan

Persoalan kemiskinan dan pembangunan terkait dengan kebijakan publik yang disebabkan kesalahan dalam mengambil kebijakan publik dengan artian kemiskinan dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan dan disisi lain kemiskinan menjadi penghambat pembangunan (Assegaf 2015:19). Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik dengan arti yang lebih luas kebijakan pendidikan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara dalam bidang pendidikan sebagai salah satu tujuan pembangunan negara secara keseluruhan (Rusdiana, 2015:36). Pengertian

tersebut mempunyai artian bahwa kesalahan dalam mengambil keputusan dalam kebijakan pendidikan dapat menyebabkan kemiskinan sehingga menghambat pembangunan. Maka dari itu kebijakan pendidikan berdasarkan tingkatan ekonomi diarahkan pada perkembangan ekonomi bukan sekedar pertumbuhan ekonomi dan investasi pendidikan (Rusdiana, 2015:40).

Fungsi ekonomi atau perkembangan ekonomi merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi, sedangkan investasi pendidikan merupakan perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang memasuki dunia kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan berdasarkan ekonomi bertujuan mengembangkan sumberdaya manusia dalam bentuk investasi pendidikan agar mempunyai penghasilan yang lebih setelah memasuki dunia kerja serta mengembangkan perekonomian sehingga menghindari kemiskinan.

Kebijakan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan telah diterapkan di Amerika Serikat dan Brazil. Amerika Serikat menerapkan kebijakan *No Child Left Behind* (NCLB) untuk mengurangi kemiskinan melalui pendidikan. Kebijakan *No Child Left Behind* (NCLB) menunjukkan ada korelasi langsung antara kemiskinan dan pencapaian pendidikan (Hunter,2015). Sedangkan Brazil menurut (Boakari,2015) menerapkan kebijakan pendidikan sebagai berikut: (1) Langkah-langkah

legislatif, (2) Desentralisasi, (3) Partisipasi masyarakat, (4) Isi kurikuler, (5) Buku-teks, (6) Televisi sekolah, (7) Program makan siang di sekolah, (8) Evaluasi sistematis. Kebijakan pendidikan dilakukan tidak secara langsung mengatasi tantangan pendidikan yang dialami oleh siswa yang kurang beruntung, tetapi untuk meningkatkan pencapaian siswa secara keseluruhan atau untuk mengurangi pencapaian dan pencapaian pendidikan kesenjangan antara siswa yang diuntungkan dan kurang beruntung (Ladd, 2012).

3. Ekonomi Pendidikan dan Pengurangan Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan melalui pendidikan dapat diukur dengan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis atau sampai tingkat mana masyarakat mendapat pendidikan formal (Haughton & Shahidur, 2012:3). Lebih lanjut Haughton & Shahidur (2012:5) mengatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pendidikan cukup penting karena pendidikan memegang peran utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang diperlukan oleh kaum miskin adalah pendidikan fungsional untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah masyarakat, tanpa biaya atau biaya rendah serta dapat dituntaskan dalam waktu yang singkat (Ahmadi, 2016:212).

Pengentasan kemiskinan tidak hanya dapat dilakukan melalui pendidikan formal akan tetapi juga bisa dengan jalur pendidikan nonformal dan informal. Philip H. Combs dan Manzoor Ahmed dalam Ahmadi (2016:213) mengungkapkan bahwa pendidikan nonformal cocok

dan potensial bagi pemberdayaan masyarakat miskin, baik kalangan pemuda maupun orang dewasa, dan untuk masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Pendidikan nonformal merupakan aktivitas pendidikan yang berlangsung secara melembaga diluar sistem pendidikan formal yang berfungsi sebagai proses modal manusia yang selanjutnya menjadi aset bagi pemberdayaan masyarakat miskin sehingga mereka mampu memecahkan masalah hidupnya secara berkelanjutan (Ahmadi, 2016:215).

Teori *Human Capital* yang digambarkan dengan statistik pengeluaran fiskal untuk pendidikan secara signifikan mampu mengurangi kemiskinan di provinsi Sichuan pada tahun 2000 hingga 2009 (Yu&Tianhui, 2011). Kasus Tanzania menunjukkan sistem pendidikan tidak menghasilkan kualitas lulusan yang cukup untuk menyediakan guru sehingga tidak cukup untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan untuk membangun fondasi yang baik untuk membangun kualitas pendidikan (Wedgwood, 2007).

C. Pembangunan Pendidikan

Pembangunan dan pendidikan merupakan dua hal yang saling terkait dan menentukan dimana tidak ada proses pembangunan tanpa pendidikan tidak ada pendidikan yang berhasil tanpa didukung pembangunan (Ahmadi, 2016:208). Pembangunan pendidikan global menurut (Tarabini, 2010)

setidaknya ada tiga alasan utama yang menjelaskan batas-batas agenda global untuk pembangunan:

- 1) Agenda global tidak memperhitungkan bahwa meskipun pendidikan semakin diperlukan, itu juga tidak cukup sebagai satu-satunya strategi untuk mengurangi kemiskinan dan merangsang pengembangan.
- 2) Agenda yang masih bergantung pada ortodoksi dan yang tidak mengubah esensi neo-liberalisme.
- 3) Agenda yang menghilangkan ketimpangan sosial dan pendidikan sebagai tujuan eksplisit untuk ditangani.

1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pertemuan antar negara telah dimulai sejak dua tahun lalu membicarakan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*). Tahun 2014, Kelompok Kerja Terbuka (OWG) dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mulai memformulasikan tujuan indikatif dari *SDGs*. Forum ini menjadi ajang diskusi dan negosiasi perwakilan negara anggota dalam menentukan tujuan dan target pembangunan Pasca 2015 dengan mempertimbangkan *Millennium Development Goals* (MDG) sebagai pijakan. Tujuh belas (17) Tujuan indikatif dan 169 Target indikatif dihasilkan dari forum ini untuk mendapatkan persetujuan dari negara anggota pada Sidang Umum PBB pada bulan September 2015. Komisi Statistik PBB (UNSC) selanjutnya akan memfasilitasi proses penyusunan indikator. Untuk dapat mengukur pencapaian dari Target *SDGs*,

diperlukan perangkat indikator dan ketersediaan data yang memungkinkan indikator tersebut untuk dapat dipergunakan (UNDP, 2015:8).

Hasil pemetaan indikator menunjukkan 323 indikator nasional dan 220 indikator internasional (diusulkan oleh UN-Statistik) yang relevan dan dapat digunakan untuk mengukur 17 Tujuan dan 169 Target SDGs. Hasil analisa data menunjukkan bahwa 67.8% indikator nasional termasuk kategori “Sangat Siap Digunakan” karena ketersediaan dan kualitas data, kesiapan metodologi untuk menghitung indikator dan kesiapan indikator tersebut untuk diadopsi tanpa perubahan yang signifikan; sementara 5.26% indikator masuk dalam kategori “Tidak Siap Digunakan” karena ketidakterediaan data dan metodologi penghitungan. Untuk indikator yang diusulkan oleh UN-Statistics, hanya 37.27% indikator yang termasuk kategori “Sangat Siap Digunakan” dan 36.36% termasuk “Tidak Siap Digunakan” sebagai indikator SDGs di Indonesia (UNDP, 2015:8).

Tujuan 4 dari SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan 4 bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan belajar yang merata selama hidupnya. Tujuan ini berfokus pada perolehan keterampilan dasar dan tinggi di semua jenjang pendidikan; akses yang lebih besar dan lebih adil terhadap pendidikan berkualitas di semua jenjang, termasuk pendidikan teknis dan kejuruan; dan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk

berfungsi dan berkontribusi dengan baik dalam kehidupan sosial. (BPS, 2016:65).

Indikator *Sustainable Development Goals* atau SDGs terbagi atas atas 3 target dan 7 indikator (BPS,2014:58-65) sebagai berikut:

1) Target 4A Semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas.

a. Persentase anak yang menerima setidaknya satu tahun dari program pendidikan usia dini (PAUD) yang berkualitas.

Indikator ini mengukur persentase anak-anak kelompok usia 36-59 bulan yang terdaftar dalam program anak usia dini. Program didefinisikan cukup luas mulai dari perawatan/pengasuhan privat atau berkelompok sampai program pra sekolah yang formal

b. Indeks Perkembangan Anak Usia Dini (ECDI)

Potensi perkembangan anak usia dini diukur sebagai indeks, saat ini diwakili dengan *Multiple Indicator Cluster Survey* (MICS) yang menilai anak-anak berusia 36-59 bulan dalam empat domain, yaitu bahasa/melek huruf, berhitung, fisik, sosial-emosional, dan pengembangan kognitif. Masing-masing domain diukur dengan instrumen berdasarkan pengamatan realtime. Survei MICS menghitung skor Indeks Keseluruhan sebagai persentase anak usia 36-59 bulan yang setidaknya memiliki tiga dari empat domain.

2) Target 4B. Semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang berfokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus sekolah menjadi nol.

a. Angka kelulusan Pendidikan Dasar untuk anak perempuan dan anak laki-laki.

Indikator ini mengukur persentase anak-anak yang masuk kelas 1 dan telah menamatkan sekolah dasar. Penyelesaian pendidikan dasar diukur dengan Angka Masukan Kasar terhadap Kelas Akhir pendidikan dasar yaitu angka total pendaftar baru di kelas akhir pendidikan dasar (berdasarkan ISCED97 atau *International Standard Classification of Education*), tanpa memandang umur, yang dinyatakan dengan persentase penduduk pada usia yang sesuai dengan kelas terakhir di sekolah dasar (*Gross Intake Ratio to Last Grade of Primary School*). Pendidikan dasar didefinisikan oleh ISCED97 sebagai program yang didesain pada unit atau proyek dasar yang diberikan pada siswa sebagai sebuah pendidikan dasar dalam membaca, menulis dan matematika bersama dengan pemahaman dasar mata pelajaran lain seperti sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan musik.

b. Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang menguasai berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan dalam membaca dan keterampilan matematika dasar pada akhir siklus

sekolah dasar (berdasarkan tolak ukur nasional yang dibentuk secara kredibel)

Indikator ini dirancang untuk mengukur proporsi anak-anak yang cakap dalam membaca dan memahami teks dalam bahasa utama mereka, serta memahami berbagai instruksi yang ada, seperti, menghitung dan memahami operasi dan konsep matematika inti, sebagai proporsi total anak-anak yang berada pada siklus akhir pendidikan dasar di negara tersebut. Kecakapan ini perlu disajikan pada level nasional, namun harus dapat mencakup kemampuan membaca, merumuskan, memahami dan menganalisis berbagai instruksi dalam bahasa utama mereka. Indikator ini merupakan indikator agregat baru yang diusulkan untuk dapat menangkap kecakapan dalam berbahasa sebagai bagian dalam pembelajaran kemampuan matematika dasar yang memiliki hubungan yang kuat dalam pendidikan akademik berikutnya.

- c. Angka kelulusan sekolah menengah untuk anak perempuan dan anak laki-laki.

Indikator ini mengukur persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang masuk kelas pertama sekolah menengah setelah menyelesaikan kelas akhir pendidikan sekolah dasar. Dihitung dengan membagi jumlah siswa di kelas akhir sekolah dasar yang telah dikurangi dengan siswa tinggal kelas, dengan jumlah total siswa usia lulus resmi. Indikator ini bertujuan untuk menangkap

angka putus sekolah selama sekolah dasar dan selama transisi sekolah dasar ke sekolah menengah dengan menggunakan pembagiannya yaitu jumlah total siswa dengan usia lulus resmi.

- d. Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang mencapai kecakapan di berbagai hasil belajar, termasuk dalam matematika pada akhir siklus sekolah menengah pertama

Indikator ini mengukur persentase anak perempuan dan anak laki-laki usia 14 tahun yang pandai dalam hasil belajar, setidaknya dalam membaca dan matematika. Kecakapan ini perlu didefinisikan melalui standar level nasional, namun harus mencakup kemampuan membaca, merumuskan, memahami, dan menganalisis berbagai instruksi dalam bahasa utama mereka, dan mampu memahami konsep, alasan dan penyelesaian masalah rumit matematika lanjutan.

- 3) Target 4C Memastikan transisi semua pemuda ke pasar tenaga kerja secara efektif

Target ini diukur dengan Angka partisipasi perguruan tinggi bagi perempuan dan laki-laki. Indikator ini mengukur total pendaftaran di pendidikan tinggi tanpa memandang usia, dinyatakan sebagai persentase dari total penduduk kelompok usia lima tahun sebagai lanjutan dari tamat sekolah menengah. Pendidikan tinggi didefinisikan sebagai Klasifikasi Baku Pendidikan Internasional (1997) tingkat 5 dan 6.

2. Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia

Keberhasilan SDGs dapat diukur dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator SDGs masih dalam skala global dan berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Indikator SDGs di Indonesia telah disesuaikan dengan indikator dan ketersediaan data (BPS,2016:63-78) sebagai berikut:

- 1) Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif

Target ini digambarkan dengan proporsi anak-anak dan remaja pada tingkat SD dan SMP yang mempunyai kemampuan minimum dalam membaca dan matematika. Indikator ini dihitung sebagai jumlah anak-anak dan orang muda di akhir pendidikan SD atau menengah, mencapai atau melebihi tingkat kemahiran minimum (membaca dan berhitung), dinyatakan sebagai persentase dari semua anak-anak dan orang muda di akhir tingkat pendidikan primer atau tingkat pendidikan menengah. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai pemantauan mutu pendidikan karena merupakan ukuran langsung dari hasil belajar yang dicapai dalam dua bidang studi pada akhir tingkat pendidikan yang relevan. Data untuk indikator ini dapat diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun

karena data belum diperoleh, data yang disajikan adalah data untuk indikator nasional sebagai indikator proksi.

1. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B dan indikator
 2. Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B
 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
 4. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
- 2) Target 4.2 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

Target ini digambarkan dengan proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin. Perkembangan balita dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial sangat penting untuk diperhatikan. Indikator ini merupakan ukuran perkembangan, kompetensi, pengetahuan, dan kesiapan anak untuk masuk ke pendidikan dasar. Namun demikian, data untuk indikator ini belum ada di Indonesia.

Selain itu target ini juga digambarkan dengan tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin. Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan

partisipasi dalam pembelajaran sebelum usia sekolah dasar, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD).

- 3) Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas

Target ini digambarkan dengan tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin. Indikator ini merupakan ukuran akses pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu tertentu bagi penduduk remaja dan dewasa. Idealnya, penyajian indikator ini dibedakan berdasarkan jenis program seperti TVRT, pendidikan tinggi, pendidikan orang dewasa, dan pendidikan lainnya baik formal maupun non formal. Namun, karena ketersediaan data di Indonesia, indikator global ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu (1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).

- 4) Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan

- 5) Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan

Target ini digambarkan dengan Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/SMK/MA/ sederajat, dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Perguruan Tinggi perempuan/laki-laki

- 6) Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi

Target ini digambarkan dengan Indikator Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan dalam membaca dan menghitung menurut jenis kelamin. Indikator ini adalah ukuran langsung dari tingkat keterampilan penduduk remaja dan dewasa pada dua hal, yaitu membaca dan menghitung. Akan tetapi, karena keterbatasan ketersediaan data, indikator global ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu (1) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun; dan (2) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.

- 7) Target 4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Target ini digambarkan dengan Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa. Indikator ini merupakan indikator yang belum ada metadanya secara global. Indonesia juga belum ada indikator proksi dan indikator ini adalah indikator global yang harus dikembangkan di Indonesia.

Keberhasilan pembangunan pendidikan digambarkan dengan beberapa variabel dan indikator dalam pendidikan. Variabel dan Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) pendidikan secara lebih ringkas meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH).

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan (Sirusa.BPS.go.id,2018). Angka Partisipasi Sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Rumus perhitungan Angka Partisipasi Sekolah sebagai berikut:

$$\text{APS 7 - 12 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS 13 - 15 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS 16 - 18 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS 19 - 24 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 19 - 24 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 - 24 tahun}} \times 100\%$$

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non

Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Angka Partisipasi Kasar digunakan sebagai:

- a. Menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan.
- b. Menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu.
- c. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Rumus perhitungan Angka Partisipasi Kasar sebagai berikut:

$$APK\ SD = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$$

$$APK\ SMP = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$$

$$APK\ SM = \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100\%$$

$$APK\ PT = \frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 - 24 tahun}} \times 100\%$$

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak

tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan

(Sirusa.BPS.go.id, 2018). Angka Partisipasi Murni digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Rumus perhitungan Angka Partisipasi Murni sebagai berikut:

APM SD =

$$\frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

APM SMP =

$$\frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

APM SM =

$$\frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat usia 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

APM PT =

$$\frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat usia 19 – 24 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

4. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Rumus perhitungan Angka Partisipasi Murni sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

HLS_s^t = Harapan lama Sekolah pada umur a ditahun t

E_i^t = jumlah penduduk usia i yang sekolah pada tahun t

I = usia (a,a+1,.....,n)

FK = Faktor koreksi pesantren

5. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan atau Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Rata-rata Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rumus perhitungan Angka Parisipasi Murni sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

RLS = Rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

N = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

6. Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH)

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang di baca atau ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan Angka Buta Huruf proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (Sirusa.BPS.go.id,

2018). Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Rumus perhitungan AHM dan ABH sebagai berikut:

$$AMH_{15+}^T = \frac{AMH_{15+}^T}{P_{15+}^T} \times 100$$

Bagi seorang pendidik profesional cara yang paling umum mengukur hasil pembangunan pendidikan dengan menggunakan data kuantitatif sebagai alat bantu, yaitu alat bantu untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan penilaian tersebut (Sudijono, 2015:20-11):

- a. Memperoleh gambaran-baik gambaran secara khusus maupun gambaran secara umum-tentang suatu gejala, keadaan atau peristiwa.
- b. Mengikuti perkembangan atau pasang-surut mengenai gejala, keadaan atau peristiwa tersebut, dari waktu ke waktu.
- c. Melakukan pengujian, apakah gejala yang satu berbeda dengan gejala yang lain ataukah tidak; jika terdapat perbedaan apakah perbedaan itu merupakan perbedaan yang berarti (meyakinkan) ataukah perbedaan itu terjadi hanya secara kebetulan saja.
- d. Mengetahui, apakah gejala yang satu ada hubungannya dengan gejala yang lain.

- e. Menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur, ringkas, dan jelas.
- f. Menarik kesimpulan secara logis, mengambil keputusan secara tepat dan mantap, serta dapat memperkirakan atau meramalkan hal-hal yang mungkin terjadi di masa mendatang, dan langkah konkret apa yang kemungkinan perlu dilakukan oleh seorang pendidik.

D. Kemiskinan

1. Pengertian kemiskinan

Pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera serta kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi tertentu (Houghton & Shahidur, 2012:1). Menurut Johnson & Schwartz (1991) yang dikutip oleh Assegaf (2015:34) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi sebagai kurangnya pendapatan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi dan perawatan medis. Menurut UNESCO (2007) kemiskinan adalah sebuah kondisi dengan berbagai dimensi yang saling berkaitan erat dan dapat dibagi menjadi tiga kategori besar yaitu: (1) minimnya pendapatan tetap, aset-aset produktif, dan akses terhadap jaring pengaman sosial; (2) minimnya akses terhadap

layanan seperti pendidikan, kesehatan, informasi, kredit, air bersih, dan sanitasi; (3) serta minimnya kekuatan politik, partisipasi, martabat dan kehormatan. Kategori pertama dan kedua merupakan kondisi secara nyata dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat miskin. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan pokok, tidak memiliki pendapatan atau pendidikan yang kurang memadai, memiliki kondisi kesehatan yang buruk, merasa tidak berdaya dan tidak memiliki kebebasan politik.

2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan menurut pandangan Sachs (2005) dalam Assegaf (2015:35) terdiri dari kemiskinan absolut (*extreme poverty*), kemiskinan moderat (*moderate poverty*) dan kemiskinan relatif (*relative poverty*). Perbedaan kemiskinan tersebut disebabkan berbagai faktor yang saling mempengaruhi, penjelasan jenis kemiskinan dijabarkan oleh Assegaf (2015:35) sebagai berikut:

- a. Kemiskinan Absolut, kemiskinan jenis mencakup rumah tangga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk memenuhi bertahan hidup, kelaparan kronis, tidak dapat mengakses perawatan kesehatan, tidak memiliki fasilitas air minum aman dan sanitasi, tidak mampu memberikan pendidikan untuk anak-anaknya, rumah bocor saat hujan, tidak ada penghalang asap kompor dan tidak mempunyai kebutuhan

dasar seperti pakaian dan sepatu. Kemiskinan jenis ini dipengaruhi tiga faktor yaitu:

1. Keterbatasan satu atau sejumlah kebutuhan dasar yang menimbulkan dampak kumulatif dan membawa kerentanan yang mempengaruhi dimensi lain dari kehidupan rumah tangga atau masyarakat miskin.
 2. Kemiskinan absolut tidak dipengaruhi oleh kerentanan yang terjadi dalam waktu yang panjang dan ketidakmampuan rumah tangga atau masyarakat miskin untuk keluar dari kondisi tersebut.
 3. Ketidakmampuan rumah tangga atau masyarakat miskin untuk menuntut haknya (*limit of power*)
 - b. Kemiskinan moderat, kemiskinan ini ditandai kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar meskipun secara terbatas.
 - c. Kemiskinan relatif, kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang ditandai dengan pendapatan dibawah rata-rata pendapatan nasional yang mengakibatkan rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan lain di luar kebutuhan paling dasar.
3. Pengukuran Kemiskinan

Kemiskinan erat kaitannya dengan lembaga pendidikan dan hubungan dengan struktur ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang (Soyomukti, 2016:22). Setidaknya terdapat 4 alasan pengukuran kemiskinan perlu dilakukan (Haughton & Shahidur, 2012:3-7) yang meliputi:

- a. Ukuran kemiskinan layak dijadikan sebagai instrumen yang sangat kuat untuk memfokuskan perhatian para pembuat kebijakan atau dengan kata lain ukuran kemiskinan diperlukan sebagai agenda politik dan ekonomi.
- b. Menetapkan target intervensi, hal ini merupakan tujuan dari sebuah profil kemiskinan yang menyebutkan fakta-fakta penting tentang kemiskinan kemudian menguji pola kemiskinan untuk melihat ragam pola kemiskinan berdasarkan geografi, sifat masyarakat dan sifat rumah tangga. Hal yang terpenting dalam pembuatan profil kemiskinan adalah untuk mendukung berbagai upaya penetapan target sumber daya pembangunan ke daerah yang lebih miskin.
- c. Membantu pemantauan dan evaluasi terhadap proyek dan intervensi kebijakan. Secara umum alasan pengukuran kemiskinan adalah untuk dapat memprediksi pengaruh dari dan kemudian mengevaluasi kebijakan dan program didesain untuk membantu masyarakat miskin.
- d. Mengevaluasi efektivitas lembaga, alasan pengukuran kemiskinan adalah untuk membantu mengevaluasi lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan pekerjaannya memberantas kemiskinan.

Secara keseluruhan pengukuran kemiskinan berkaitan dengan pembangunan kebijakan publik. Pengukuran kemiskinan menempatkan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan. Pengukuran kemiskinan dapat melihat sebaran masyarakat miskin yang dapat digunakan dalam penanggulangan kemiskinan pada daerah tertentu. Data

hasil pengukuran kemiskinan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kebijakan, program serta pelaksana kebijakan. Secara umum pengukuran kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu Garis Kemiskinan dan Ukuran Kemiskinan. Garis Kemiskinan dan Ukuran Kemiskinan merupakan hal yang berbeda namun saling menggantikan (Haughton & Shahidur, 2012:99).

1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan mengimplikasikan suatu titik balik yang jelas dalam fungsi kesejahteraan dan secara lebih formal menurut Ravallion (1998) dalam (Haughton & Shahidur, 2012:44) garis kemiskinan untuk sebuah rumah tangga, z_1 dapat didefinisikan sebagai pengeluaran atau konsumsi minimal yang diperlukan untuk mencapai sekurang-kurangnya suatu tingkatan utilitas minimal u_z dengan mengingat tingkat harga (p) dan sifat demografis rumah tangga (x).

$$z_i = e(p, x, u_z)$$

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Perhitungan Garis Kemiskinan menurut BPS (2018) yaitu Garis Kemiskina Makanan ditambah Garis Kemiskina Non-Makanan

$$GK = GKM + GKNM$$

2. Ukuran Kemiskinan

Tingkat kemiskinan (*headcount index*) digambarkan dengan P_0 digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin dalam suatu populasi dan indek kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) digambarkan dengan P_1 merupakan digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk berada dibawah garis kemiskinan dan indek keparahan kemiskinan (*squared poverty gab index*) digambarkan dengan P_2 digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah kuadrat kesenjangan kemiskinan relatif terhadap garis kemiskinan (Haughton & Shahidur, 2012:71). Ketiga ukuran kemiskinan tersebut mempunyai ukuran dan perhitungan yang berbeda-beda menurut kegunaannya. Lebih lanjut ukuran kemiskinan menurut Haughton & Shahidur (2012:73-76) sebagai berikut:

a. Tingkat Kemiskinan

Pengukuran ini hanya digunakan untuk mengukur masyarakat yang dianggap miskin dengan perhitungan sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{N_p}{N}$$

N_p : Jumlah masyarakat miskin

N :total populasi

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indek Kedalaman Kemiskinan sebuah ukuran kemiskinan untuk mengitung sejauh mana orang-orang berada dibawah garis kemiskinan dan dinyatakan sebagai suatu persentase garis

kemiskinan. Secara lebih spesifik perhitungan indek keparahan kemiskinan yaitu kesenjangan kemiskinan (G_i) didefinisikan sebagai garis kemiskinan (z) dikurangi pendapatan aktual (y_i) untuk individu-individu miskin, kesenjangan tersebut dianggap sebesar nol untuk orang lain dengan persamaan sebagai berikut:

$$G_i = (z - y_i) \times I(y_i < z)$$

Selanjutnya indek kedalaman kemiskinan P_1 dirumuskan sebagai berikut:

$$P_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \frac{G_i}{z}$$

Indek Kedalaman Kemiskinan Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dengan nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program (Sirusa.BPS.go.id, 2018).

$$P_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$$

Keterangan:

P_1 : Indeks Kedalaman Kemiskinan

Z : Garis Kemiskinan

y_i : rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

q : banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

c. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indek keparahan kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan dengan memperhitungkan ketimpangan diantara masyarakat miskin. Indek keparahan kemiskinan merupakan jumlah terbobot dari kesenjangan kemiskinan, oleh karena itu dengan mengkuadratkan indek kedalaman kemiskinan maka ukuran secara implisit menempelkan bobot yang lebih besar pada pengamatan yang berada jauh di bawah garis kemiskinan. Rumus perhitungan indek keparahan kemiskinan sebagai berikut:

$$P_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \left(\frac{G_i}{Z} \right)^2$$

Tebel tersebut menunjukkan cara perhitungan kesenjangan kemiskinan dibagi dengan garis kemiskinan kemudian dikuadratkan dan dirata-rata gunan memperoleh P_2 untuk indek keparahan kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin dengan interpretasi semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Rumus perhitungan sebagai berikut:

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2$$

Keterangan:

P_2 : Indeks Keparahan Kemiskinan

Z : Garis Kemiskinan

y_i : rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

q : banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

4. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. *Headcount Index* secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Persentase penduduk miskin digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Rumus perhitungan Persentase penduduk miskin sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

P_0 : Persentase Penduduk Miskin

Z : Garis Kemiskinan

y_i : rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$): $y_i < z$

q : banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

E. Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan

Perkembangan pendidikan terus berubah yang akhirnya menciptakan lembaga pendidikan dan hubungan dengan struktur ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang (Soyomukti, 2016:22). Hal tersebut menggambarkan bahwa sistem pendidikan merupakan sistem yang dipengaruhi sub-sistem yang lain. Teori pendidikan kapitalisme menyebutkan bahwa sistem ekonomi lahir untuk menggantikan tatanan feodal yang telah lama berdiri dengan didukung oleh model pendidikan tradisional dan budaya tradisi yang pengetahuannya sangat tidak ilmiah menuju pendidikan yang digunakan untuk mendukung industrialisasi dan ekonomi komersial (Soyomukti, 2016:168). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan ekonomi, sedangkan ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan kemiskinan.

Paradigma baru tentang kemiskinan menunjukkan bahwa bukan hanya diartikan sebagai keterbatasan pendapatan dan konsumsi melainkan mencakup ketidakberdayaan, ketidakmampuan bersuara, kerentanan dan ketakutan (World Bank, 2004). McKee (1981:227) dalam Ahmadi (2016:211) mengatakan bahwa pendidikan dan kemiskinan digambarkan dengan lingkaran setan yang artinya penduduk atau masyarakat miskin karena pendidikannya rendah dan pendidikan masyarakat/penduduk rendah dikarenakan masyarakat miskin. Pendapat lain yaitu Houghton & Shahidur (2012:5) mengatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pendidikan cukup penting karena pendidikan memegang peran utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Yu & Tianhui (2011) menunjukkan bahwa investasi jangka panjang dan stabil dalam pendidikan akan memiliki beberapa efek aditif dan dapat memainkan peran dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.

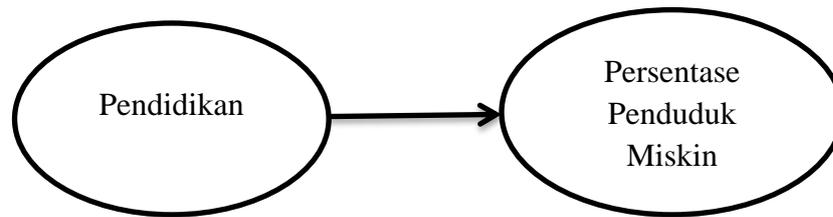
Selain itu Persoalan kemiskinan dan pembangunan terkait dengan kebijakan publik yang disebabkan kesalahan dalam mengambil kebijakan publik. kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik (Rusdiana, 2015:36). Kebijakan pendidikan berdasarkan tingkatan ekonomi diarahkan pada perkembangan ekonomi bukan sekedar pertumbuhan ekonomi dan investasi pendidikan (Rusdiana, 2015:40). Kebijakan dilakukan tidak secara langsung mengatasi tantangan pendidikan yang dialami oleh siswa yang kurang beruntung, tetapi untuk meningkatkan pencapaian siswa secara keseluruhan atau untuk mengurangi

pencapaian dan pencapaian pendidikan kesenjangan antara siswa yang diuntungkan dan kurang beruntung (Ladd, 2012). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan berdasarkan ekonomi bertujuan mengembangkan sumberdaya manusia dalam bentuk investasi pendidikan agar mempunyai penghasilan yang lebih setelah memasuki dunia kerja serta mengembangkan perekonomian sehingga menghindari kemiskinan.

Investasi dalam pendidikan penting untuk mencapai pengembangan, daya saing dan pertumbuhan. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan prioritas pada pendidikan dalam strategi untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa orang miskin akan berada dalam posisi yang lebih buruk jika mereka tidak memiliki akses ke pendidikan (Tarabini, 2010). Lebih lanjut Tarabini (2010) berpendapat bahwa Investasi pendidikan secara individu pendidikan selalu menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi.

Pembangunan pendidikan digambarkan dengan beberapa variabel dan indikator dalam pendidikan. global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indikator pembangunan pendidikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia dikenal sebagai Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) sedangkan kemiskinan secara umum digambarkan dengan Persentase Penduduk Miskin (PPM)

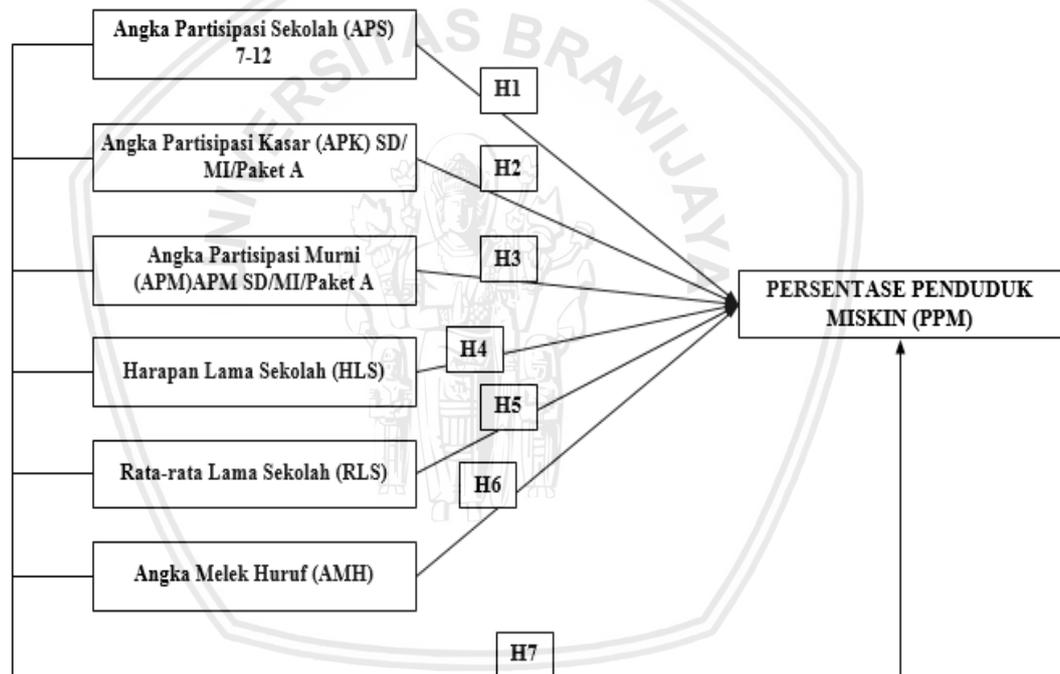
F. Model Konsep



Gambar 2.1. Model Konsep
 Sumber: Olahan Peneliti, 2018

G. Model Hipotesis

Hipotesis model 1

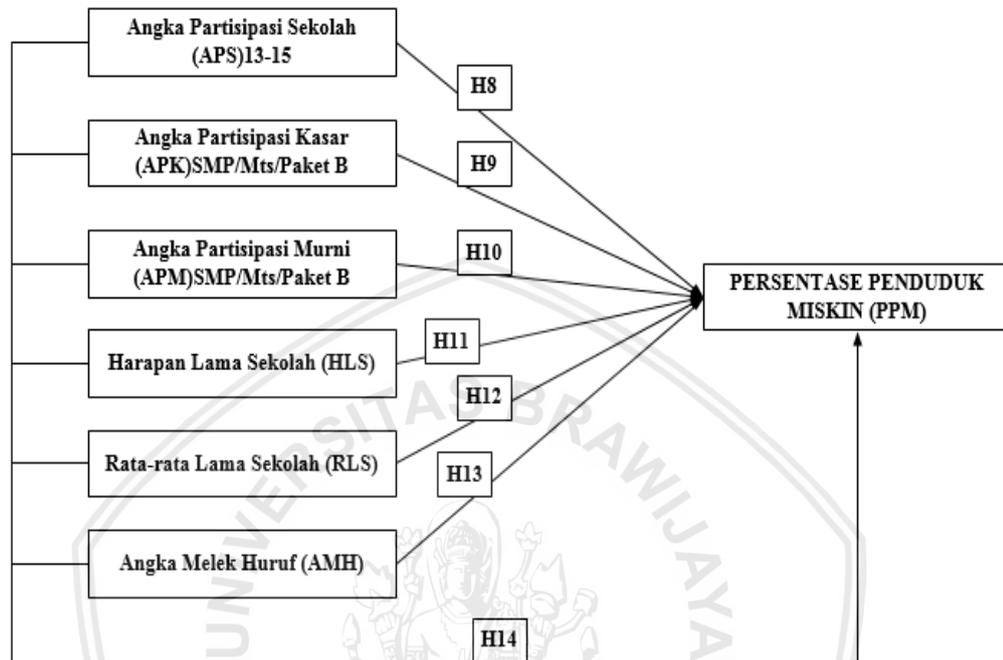


Gambar 2.2. Model Hipotesis 1
 Sumber: Olahan Peneliti, 2018

Hipotesis 1 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017

- Hipotesis 2 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 3 : Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 4 : Harapan Lama Sekolah (HLS) berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 5 : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 6 : Angka Melek Huruf (AMH) berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 7 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) berpengaruh secara simultan terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-2017

Hipotesis model 2

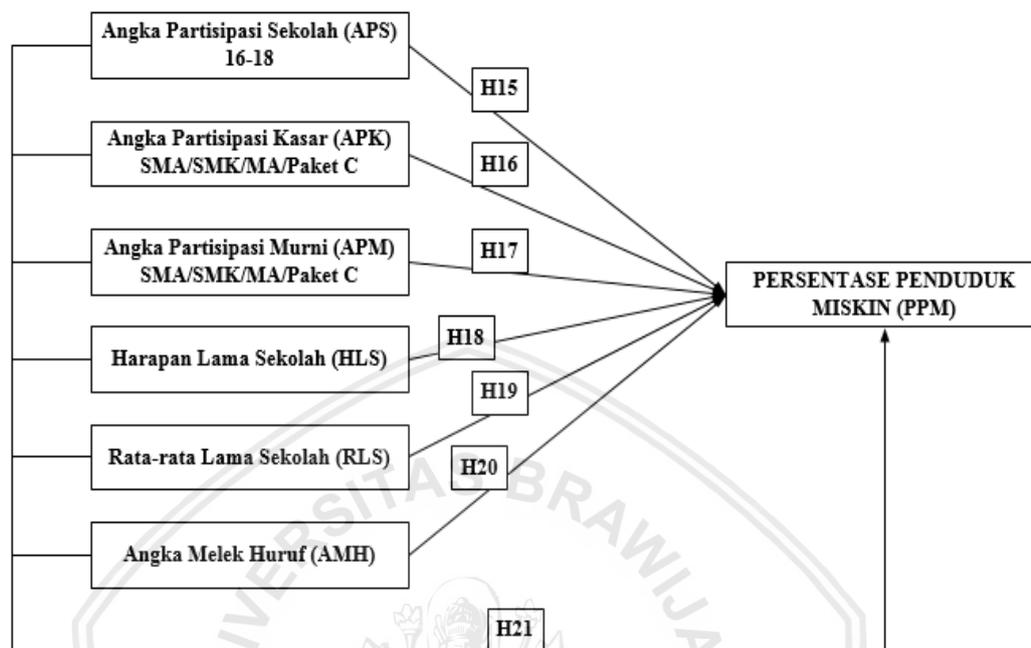


Gambar 2.3. Model Hipotesis 2
 Sumber: Olahan Peneliti, 2018

- Hipotesis 8 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 9 : Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts/Paket B berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 10 : Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/Mts/Paket B berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017

- Hipotesis 11 : Harapan Lama Sekolah (HLS) berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 12 : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 13 : Angka Melek Huruf (AMH) berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 14 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15, Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/Mts/Paket B, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) berpengaruh secara simultan terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-2017

Hipotesis model 3



Gambar 2.4. Model Hipotesis 3

Sumber: *Olahan Peneliti, 2018*

- Hipotesis 15 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 16 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 17 : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 18 : Harapan Lama Sekolah (HLS) berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017

- Hipotesis 19 : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 20 : Angka Melek Huruf (AMH) berpengaruh secara parsial terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia 2011-2017
- Hipotesis 21 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) berpengaruh secara simultan terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian Eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian Eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel (Silalahi, 2010: 30). Penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan dikarenakan peneliti ingin mengetahui pengaruh antara variabel pendidikan dengan variabel persentase kemiskinan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh provinsi di Indonesia dengan melihat data publikasi Badan Pusat Statistik tentang pencapaian variabel pendidikan yang meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH) dan persentase penduduk miskin. Pemilihan lokasi tersebut bertujuan melihat pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan pada masing-masing wilayah.

C. Konsep Penelitian

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pendidikan

Pengukuran kemiskinan melalui pendidikan dapat diukur dengan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis atau sampai tingkat

mana masyarakat mendapat pendidikan formal (Haughton & Shahidur, 2012:3). Lebih lanjut Haughton & Shahidur (2012:5) mengatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pendidikan cukup penting karena pendidikan memegang peran utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang diperlukan oleh kaum miskin adalah pendidikan fungsional untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah masyarakat, tanpa biaya atau biaya rendah serta dapat dituntaskan dalam waktu yang singkat (Ahmadi, 2016:212).

Pengentasan kemiskinan tidak hanya dapat dilakukan melalui pendidikan formal akan tetapi juga bisa dengan jalur pendidikan nonformal dan informal. Philip H. Combs dan Manzoor Ahmed dalam Ahmadi (2016:213) mengungkapkan bahwa pendidikan nonformal cocok dan potensial bagi pemberdayaan masyarakat miskin, baik kalangan pemuda maupun orang dewasa, dan untuk masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Pendidikan nonformal merupakan aktivitas pendidikan yang berlangsung secara melembaga diluar sistem pendidikan formal yang berfungsi sebagai proses modal manusia yang selanjutnya menjadi aset bagi pemberdayaan masyarakat miskin sehingga mereka mampu memecahkan masalah hidupnya secara berkelanjutan (Ahmadi, 2016:215). Maka dari itu diperlukan pembangunan pendidikan untuk mengurangi kemiskinan.

Pembangunan pendidikan digambarkan dengan beberapa variabel dan indikator dalam pendidikan. Variabel dan Indikator pendidikan

meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) sedangkan kemiskinan secara umum digambarkan dengan Persentase Penduduk Miskin (PPM).

2. Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan

Teori pendidikan kapitalisme menyebutkan bahwa sistem ekonomi lahir untuk menggantikan tatanan feodal yang telah lama berdiri dengan didukung oleh model pendidikan tradisional dan budaya tradisi yang pengetahuannya sangat tidak ilmiah menuju pendidikan yang digunakan untuk mendukung industrialisasi dan ekonomi komersial (Soyomukti, 2016:168). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan ekonomi, sedangkan ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan kemiskinan. Perkembangan pendidikan terus berubah yang akhirnya menciptakan lembaga pendidikan dan hubungan dengan struktur ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang (Soyomukti, 2016:22). Hal tersebut menggambarkan bahwa sistem pendidikan merupakan sistem yang dipengaruhi sub-sistem yang lain.

Paradigma baru tentang kemiskinan menunjukkan bahwa bukan hanya diartikan sebagai keterbatasan pendapatan dan konsumsi melainkan mencakup ketidakberdayaan, ketidakmampuan bersuara, kerentanan dan ketakutan (World Bank, 2004). McKee (1981:227) dalam Ahmadi (2016:211) mengatakan bahwa pendidikan dan kemiskinan digambarkan

dengan lingkaran setan yang artinya penduduk atau masyarakat miskin karena pendidikannya rendah dan pendidikan masyarakat/penduduk rendah dikarenakan masyarakat miskin. Pendapat lain yaitu Haughton & Shahidur (2012:5) mengatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pendidikan cukup penting karena pendidikan memegang peran utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:60). Variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2016:61). Variabel bebas yang digunakan terdiri dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) (X1), Angka Partisipasi Kasar (APK) (X2), Angka Partisipasi Murni (APM) (X3), Harapan Lama Sekolah (HLS) (X4), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (X5), Angka Melek Huruf (AMH) (X6).

b. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016: 61). Variabel terikat yang digunakan adalah Persentase Penduduk Miskin (PPM) (Y).

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Angka Partisipasi Sekolah (X1)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Angka Partisipasi Sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan APS 7-12 tahun, APS, 13-15 tahun dan APS 16-18 Tahun.

Rumus perhitungan Angka Partisipasi Sekolah sebagai berikut:

$$\text{APS 7 – 12 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS 13 – 15 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS 16 – 18 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS 19 – 24 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

b. Angka Partisipasi Kasar (X2)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Penelitian ini menggunakan APK SD, APK SMP dan APK SM.

Rumus perhitungan Angka Partisipasi Kasar sebagai berikut:

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SM} = \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK PT} = \frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 - 24 tahun}} \times 100\%$$

c. Angka Partisipasi Murni (X3)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut

diperhitungkan (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Angka Partisipasi Murni digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Penelitian ini menggunakan APM SD, APM SMP dan APM SM.

Rumus perhitungan Angka Partisipasi Murni sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{APM SD} &= \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\% \\ \text{APM SMP} &= \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\% \\ \text{APM SM} &= \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat usia 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\% \\ \text{APM PT} &= \frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat usia 19 – 24 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\% \end{aligned}$$

d. Harapan Lama Sekolah (X4)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Rumus perhitungan Angka Partisipasi Murni sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

HLS_a^t = Harapan lama Sekolah pada umur a ditahun t

E_i^t = jumlah penduduk usia i yang sekolah pada tahun t

I = usia (a,a+1,.....,n)

FK = Faktor koreksi pesantren

e. Rata-rata Lama Sekolah (X5)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan atau Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Rata-rata Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rumus perhitungan Angka Partisipasi Murni sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

RLS = Rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

N = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

f. Angka Melek Huruf (X6)

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin

dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang di baca atau ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan Angka Buta Huruf proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (Sirusa.BPS.go.id,2018). Rumus perhitungan AHM sebagai berikut:

$$AMH_{15+}^T = \frac{AMH_{15+}^T}{P_{15+}^T} \times 100$$

g. Persentase Penduduk Miskin (Y)

Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.

Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Persentase penduduk miskin digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Rumus perhitungan Persentase penduduk miskin sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

P_0 :Indeks Keparahan Kemiskinan

Z:Garis Kemiskinan

y_i : rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1,2,3,\dots, q$): $y_i < z$

q: banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

n: Jumlah penduduk

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diperoleh ringkasan masing-masing variabel dalam tabel 3.1 Konsep Variabel Penelitian sebagai berikut:

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Rumus
Pendidikan	Variabel Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (X1)	a. Jumlah penduduk usia ke-n yang masih bersekolah. b. Jumlah penduduk usia ke-n	Jumlah penduduk usia ke-n yang masih bersekolah $\frac{\text{Jumlah penduduk usia ke-n}}{\text{Jumlah penduduk usia ke-n}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Kasar (APK) (X2)	a. Jumlah siswa pada jenjang pendidikan b. Jumlah penduduk usia sekolah	Jumlah siswa pada jenjang pendidikan $\frac{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}}$
		Angka Partisipasi Murni (APM) (X3)	a. Jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya b. jumlah penduduk usia sekolah	Jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya $\frac{\text{jumlah penduduk usia sekolah}}{\text{jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100\%$
		Harapan Lama Sekolah (HLS) (X4)	$HLS_a^t =$ Harapan lama Sekolah pada umur a ditahun t	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$

			<p>E_i^t = jumlah penduduk usia i yang sekolah pada tahun t</p> <p>I = usia ($a, a+1, \dots, n$) FK = Faktor koreksi pesantren</p>	
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (X5)	<p>RLS = Rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas</p> <p>x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>N = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$
		Angka Melek Huruf (AMH) (X6)	<p>$AMH_{15+}^T =$ penduduk usia 15 ke atas yang mempunyai kemampuan membaca</p> <p>$P_{15+}^T =$ jumlah penduduk usia 15 ke atas</p>	$AMH_{15+}^T = \frac{AMH_{15+}^T}{P_{15+}^T} \times 100$

Kemiskinan	Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (PPM) (Y)	<p>P_0: Indeks Keparahan Kemiskinan</p> <p>Z:Garis Kemiskinan</p> <p>y_i: rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1,2,3,....., q): $y_i < z$</p> <p>q: banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan</p> <p>n: Jumlah penduduk</p>	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$
------------	------------------	--------------------------------------	--	---

Sumber: Olahan Penulis,2018

E. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:117). Populasi dalam penelitian ini adalah negara Seluruh Provinsi di Indonesia. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:118). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan sampel jenuh atau sensus

untuk mendapatkan akurasi data yang representatif. Sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016:124). Adapun sampel dalam penelitian yaitu variabel pendidikan dan persentase kemiskinan dengan rentang pengambilan data dimulai dari 2011-2017. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 data Panel dengan cara perhitungan rentang pengambilan data sebanyak 7 tahun dan masing-masing data berjumlah 231.

F. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber sekunder atau tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:193). Sedangkan menurut Silalahi (2010:291) data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Berdasarkan skala pengukuran penelitian ini menggunakan jenis data rasio. Data rasio tergolong data metrik yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok yang bisa diukur dan mempunyai titik nol mutlak serta dikategorikan sebagai data kuantitatif (Silalahi, 2010:282).

G. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk kegiatan mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data. Tujuan dari instrumen penelitian yaitu agar memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data serta informasi penting lainnya agar kegiatan penelitian menjadi sistematis dan mudah untuk dilakukan (Arikunto, 2010: 13). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi merupakan alat bantu berupa alat tulis serta peralatan elektronik penunjang lainnya yang digunakan untuk mencatat dan mendokumentasikan dokumen-dokumen yang ingin digunakan oleh peneliti.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai satu proses mendapatkan data empiris dengan menggunakan metode tertentu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau untuk mengumpulkan data (Silalahi, 2010:280). Teknik pengumpulan dapat dilakukan dengan berbagai macam metode yaitu *Interview* (wawancara), kuesioner, observasi dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2016:193-194). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga data yang diperoleh melalui dokumen (Sugiyono, 2016:193). Data dalam penelitian penelitian ini sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2011-2017

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2011-2017
3. Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2011-2017
4. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2011-2017
5. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2011-2017
6. Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2011-2017
7. Persentase Penduduk Miskin (PPM) tahun 2011-2017

I. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 21.0*. Teknik analisis data digunakan sebagai alat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Regresi Berganda. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 model yaitu:

1. Model 1

Model ini menguji Angka Partisipasi Sekolah (APS)7-12, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM).

2. Model 2

Model ini menguji Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15, Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/Mts/Paket B, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama

Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM).

3. Model 3

Model ini menguji Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM).

Pembagian model tersebut dikarenakan masing-masing data memiliki kriteria yang sama antara data satu dengan data lainnya. Selain itu pembagian data tersebut untuk mengetahui aspek pendidikan yang paling mempengaruhi Persentase Penduduk Miskin (PPM).

J. Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik untuk pencatatan, pengorganisasian, dan peringkasan informasi dari data numerik ke bentuk lain yang dapat digunakan dan dapat dikomunikasikan atau dapat dimengerti (Silalahi, 2010:336). Penelitian ini akan mendeskripsikan pengaruh Pendidikan yang digambarkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM).

2. Analisis Inferensial

Statistik inferensial merupakan teknik untuk mengetahui atau mengukur derajat hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih dengan penggeneralisasian informasi atau secara lebih spesifik membuat simpulan dari data sampel untuk populasi yang didasarkan pada sampel yang diambil dari populasi (Silalahi, 2010:337). Adapun uji statistik inferensial dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda dapat dikatakan baik apabila dinyatakan bebas dari asumsi-asumsi klasik, yaitu:

1) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel bebas dalam model regresi yang baik, yaitu tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ghozali (2013:105-106) menjelaskan jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal, yaitu variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

a. Penelitian ini menguji multikolinieritas dengan cara melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai tolerance untuk menunjukkan setiap variabel bebas lainnya. variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diukur oleh nilai *cut off* multikolinieritas sebesar $VIF \geq 10$ dan nilai tolerance sebesar > 0.10 . Tolerance

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang semakin rendah sama dengan nilai VIF Tinggi.

- b. Nilai koefisien determinasi baik dari R^2 maupun R square diatas 0.6 namun tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependent, maka diduga model multikolinieritas.
- c. Nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,95 maka model dinyatakan bebas asumsi multikolinieritas. Jika koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen lebih dari 0,95 maka terjadi multikolinieritas antar masing-masing independen.

2) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji korelasi antara kesalahan pengganggu atau kesalahan residual pada saat t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau sebelum t dalam model regresi linier. Korelasi atau problem autokorelasi timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lain yang sering ditemukan pada data Panel. Penelitian ini mendeteksi autokorelasi dengan *Run Test* bisa juga dengan Uji Durbin-Watson (DW test). Sebagai bagian dari statistik non parametrik untuk menguji korelasi yang tinggi antar residual dan kemungkinan residual terjadi secara random atau tidak.

Berikut dasar analisis yang digunakan pada *Run Test* dan Uji Durbin-Watson (DW test):

1. Uji Durbin-Watson (DW test)

Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* dalam model regresi dan tidak ada variabel yang lag di antara variabel independen.

Hipotesis yang akan di uji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r=0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

Tabel 3.2 pengambilan keputusan autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Desicion	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Desicion	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$D_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali,2013

2. Run Test

- a) Jika nilai signifikan \geq taraf nyata (0,05), maka residual random atau tidak terjadi gejala autokorelasi antar nilai residual

b) Jika nilai signifikansi $<$ taraf nyata (0,05), maka residual tidak random atau terjadi gejala autokorelasi antar nilai residual (Ghozali, 2013:120-121).

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi dan dikatakan baik jika terjadi variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (homoskedastisitas), bukan sebaliknya atau heteroskedastisitas. Data Panel memiliki kemungkinan mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas adalah grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat, yaitu ZPRED (Sumbu X) dengan residualnya SRESID (Sumbu Y). Apabila titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk memprediksi variabel terikat berdasarkan masukan variabel bebas (Ghozali, 2013:139-141).

4) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji kemungkinan variabel residual memiliki distribusi normal dalam model regresi karena uji

signifikansi simultan (uji F) dan uji signifikansi parameter individual (uji t) mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, maka bila dilanggar uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013:160). Penelitian ini menguji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan membandingkan antara distribusi data yang akan diuji dan distribusi normal baku atau bisa juga dengan analisis grafik. Berikut dasar analisis yang digunakan pada uji Kolmogorov-Smirnov:

- a) Jika nilai signifikansi \geq taraf nyata (0,05), maka distribusi data dinyatakan normal.
- b) Jika nilai signifikansi $<$ taraf nyata (0,05), maka distribusi data dinyatakan tidak normal.

Sedangkan metode analisis grafik adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya atau membentuk lonceng.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh dan hubungan antara

satu variabel terikat tunggal dengan beberapa variabel bebas untuk menggunakan nilai variabel-variabel bebas dalam memprediksi nilai variabel terikat tunggal yang diteliti (Silalahi, 2010:430-431). Adapun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_6 + e$$

Keterangan:

Y : Persentase Penduduk Miskin (PPM)

a : Konstanta

b_1 : Koefisien regresi Angka Partisipasi Sekolah (APS)

b_2 : Koefisien regresi Angka Partisipasi Kasar (APK)

b_3 : Koefisien regresi Angka Partisipasi Murni (APM)

b_4 : Koefisien regresi Harapan Lama Sekolah (HLS)

b_5 : Koefisien regresi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

b_6 : Koefisien regresi Angka Melek Huruf (AMH)

x_1 : Angka Partisipasi Sekolah (APS)

x_2 : Angka Partisipasi Kasar (APK)

x_3 : Angka Partisipasi Murni (APM)

x_4 : Harapan Lama Sekolah (HLS)

x_5 : Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

x_6 : Angka Melek Huruf (AMH)

e : Faktor residual

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat dengan nilai antara nol dan satu. Nilai $R^2 = 0$ berarti variabel bebas tidak memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel terikat dan nilai $R^2 = 1$ berarti variabel bebas memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Secara umum data time series atau panel memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi dengan kelemahan bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Bias atau penambahan variabel bebas yang meningkatkan R^2 tanpa melihat signifikansi variabel menjadi dasar peneliti menggunakan adjusted R^2 karena memiliki sensitivitas atas perubahan jumlah variabel bebas (Ghozali, 2013:97).

2. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol.

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol.

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Menguji hipotesis ini sebagai berikut:

- a. Quick look: bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Artinya dengan kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat menggunakan uji t untuk menunjukkan pengaruh secara parsial variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013:98). Uji t menggunakan beberapa dasar analisis untuk menentukan pengaruh dan hubungan variabel dalam penelitian. Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang akan diuji adalah suatu parameter (b_i) sama dengan nol.

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (H_A) parameter suatu variabel tidak sama nol.

$$H_A : b_i \neq 0$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Cara melihat uji t ada 2 cara yaitu:

- a. Quick look: bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $H_0 : b_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Berikut dasar analisis yang digunakan pada uji t:

Perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}

- a) Jika $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- b) Jika $|t_{hitung}| > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Perbandingan nilai signifikansi dengan taraf nyata

- a) Jika nilai signifikansi \geq taraf nyata (0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- b) Jika nilai signifikansi $<$ taraf nyata (0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan letak astronomis Indonesia, Indonesia berada di garis lintang 6° LU – 11° LS sedangkan garis bujurnya adalah 95° BT – 141° BT (ilmugeografi.com,2018). Menurut Badan Pusat Statistik (2018:5) Secara astronomis, Indonesia terletak antara garis lintang terletak pada 6° LU - 11° LS dan garis bujur terletak pada 95° BT - 141° BT, Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas: Utara - Negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan; Selatan - Negara Australia, Timor Leste dan Samudera Hindia; Barat - Samudera Hindia; Timur - Negara Papua Nugini, dan Samudera Pasifik. Batas-batas tersebut ada pada 111 pulau terluar yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik. Pulau-pulau tersebut digunakan untuk menentukan garis pangkal batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain (Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar). Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terletak di lima pulau besar dan empat kepulauan, yaitu:

1. Pulau Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.
2. Kepulauan Riau: Kepulauan Riau.
3. Kepulauan Bangka Belitung: Kepulauan Bangka Belitung.

4. Pulau Jawa: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
5. Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil): Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
6. Pulau Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
7. Pulau Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
8. Kepulauan Maluku: Maluku dan Maluku Utara.
9. Pulau Papua: Papua dan Papua Barat



Gambar 4.1: Keadaan Geografi Indonesia

Sumber: Statistik Indonesia, 2018

Secara lebih rinci luas wilayah menurut provinsi sebagai berikut:

Tabel 4.1: Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi 2002-2016

Provinsi	Luas	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Jumlah Pulau
Aceh	57 956,00	3,03	663
Sumatera Utara	72 981,23	3,81	419
Sumatera Barat	42 012,89	2,20	391
Riau	87 023,66	4,55	139
Kepulauan Riau	8 201,72	0,43	2 408
Jambi	50 058,16	2,62	19
Sumatera Selatan	91 592,43	4,79	53
Kepulauan Bangka Belitung	16 424,06	0,86	950
Bengkulu	19 919,33	1,04	47
Lampung	34 623,80	1,81	188
DKI Jakarta	664,01	0,03	218
Jawa Barat	35 377,76	1,85	131
Banten	9 662,92	0,50	131
Jawa Tengah	32 800,69	1,71	296
DI Yogyakarta	3 133,15	0,16	23
Jawa Timur	47 799,75	2,50	287
Bali	5 780,06	0,30	85
Nusa Tenggara Barat	18 572,32	0,97	864
Nusa Tenggara Timur	48 718,10	2,55	1 192
Kalimantan Barat	147 307,00		339

Provinsi	Luas	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Jumlah Pulau
		7,70	
Kalimantan Tengah	153 564,50	8,02	32
Kalimantan Selatan	38 744,23	2,02	320
Kalimantan Timur	129 066,64	6,74	370
Kalimantan Utara	75 467,70	3,94	-
Sulawesi Utara	13 851,64	0,72	668
Gorontalo	11 257,07	0,59	136
Sulawesi Tengah	61 841,29	3,23	750
Sulawesi Selatan	46 717,48	2,44	295
Sulawesi Barat	16 787,18	0,88	-
Sulawesi Tenggara	38 067,70	1,99	651
Maluku	46 914,03	2,45	1 422
Maluku Utara	31 982,50	1,67	1 474
Papua	319036,05	16,67	598
Papua Barat	99 671,63	5,21	1 945
Indonesia	1 913578,68	100,00	17 504

Sumber: BPS, 2018

B. STATISTIK DESKRIPTIF

Penelitian ini menggunakan data hasil publikasi Badan Pusat Statistik mengenai pendidikan dan kemiskinan. Variabel dan Indikator pendidikan meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata

Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) sedangkan kemiskinan secara umum digambarkan dengan Persentase Penduduk Miskin (PPM).

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Rang e	Minim um	Maxim um	Mean		Std. Deviation	Varian ce
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
APS 7-12	231	27,33	72,63	99,96	98,0868	,24285	3,69102	13,624
APS 13-15	231	27,35	72,61	99,96	95,7676	,27433	4,16939	17,384
APS 16-18	231	36,72	61,63	98,35	80,1111	,64294	9,77183	95,489
APK SD/MI/Paket A	231	32,40	84,06	116,46	107,9238	,32342	4,91554	24,163
APK SMP/Mts/Paket B	231	35,82	65,01	100,83	88,2762	,38493	5,85042	34,227
APK SM/SMK/MA/Paket C	231	55,28	44,23	99,51	76,4052	,67062	10,19260	103,889
APM SD/MI/Paket A	231	29,69	69,60	99,29	94,5565	,29200	4,43801	19,696
APM SMP/Mts/Paket B	231	42,70	43,61	86,31	72,4819	,51275	7,79316	60,733
APM SM/SMK/MA/Paket C	231	43,24	29,16	72,40	56,9249	,53183	8,08311	65,337
Harapan Lama Sekolah (HLS)	231	6,50	8,92	15,42	12,3778	,06171	,93785	,880
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	231	5,42	5,60	11,02	7,9319	,06476	,98422	,969
Angka Melek Huruf (AMH)	231	35,71	64,08	99,79	94,7861	,37516	5,70190	32,512
Persentase Penduduk Miskin (PPM)	231	28,37	3,61	31,98	11,9738	,41482	6,30472	39,750
Valid N (listwise)	231							

Sumber: Olahan SPSS, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui statistik deskriptif masing-masing data sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun mempunyai nilai minimal 72,63 dan maksimal 99,96 dengan rata-rata 98,0868 dan standar deviasi 3,69102.

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun mempunyai nilai minimal 72,61 dan maksimal 99,96 dengan rata-rata 95,7676 dan standar deviasi 4,16939.
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun mempunyai nilai minimal 61,63 dan maksimal 98,35 dengan rata-rata 80,1111 dan standar deviasi 9,77183.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A mempunyai nilai minimal 84,06 dan maksimal 116,46 dengan rata-rata 107,9238 dan standar deviasi 4,91554.
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B mempunyai nilai minimal 65,01 dan maksimal 100,83 dengan rata-rata 88,2762 dan standar deviasi 5,85042.
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/SMK/MA/Paket C mempunyai nilai minimal 44,23 dan maksimal 99,51 dengan rata-rata 76,4052 dan standar deviasi 10,19260.
7. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A mempunyai nilai minimal 69,60 dan maksimal 99,29 dengan rata-rata 94,5565 dan standar deviasi 4,43801.
8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B mempunyai nilai minimal 43,61 dan maksimal 86,31 dengan rata-rata 72,4819 dan standar deviasi 7,79316.

9. Angka Partisipasi Murni (APM) SM/SMK/MA/Paket C mempunyai nilai minimal 29,16 dan maksimal 72,40 dengan rata-rata 56,9249 dan standar deviasi 8,08311.
10. Harapan Lama Sekolah (HLS) mempunyai nilai minimal 8,92 dan maksimal 15,42 dengan rata-rata 12,3778 dan standar deviasi 0,93785.
11. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mempunyai nilai minimal 5,60 dan maksimal 11,02 dengan rata-rata 7,9319 dan standar deviasi 0,98422.
12. Angka Melek Huruf (AMH) mempunyai nilai minimal 64,08 dan maksimal 99,79 dengan rata-rata 94,7861 dan standar deviasi 5,70190.
13. Persentase Penduduk Miskin (PPM) mempunyai nilai minimal 3,61 dan maksimal 31,98 dengan rata-rata 11,9738 dan standar deviasi 6,30472.

C. PENYAJIAN DATA

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)7-12, Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM)APM SD/MI/Paket A, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM)

a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel bebas dalam model regresi yang baik, yaitu tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ghazali (2013:105-106) menjelaskan jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal, yaitu variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama

variabel bebas sama dengan nol. Hasil pengujian menguji multikolinieritas dengan cara melihat Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance untuk menunjukkan setiap variabel bebas lainnya. variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diukur oleh nilai cut off multikolinieritas sebesar $VIF \geq 10$ dan nilai tolerance sebesar > 0.10 . Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang semakin rendah sama dengan nilai VIF Tinggi. Selain itu untuk memperkuat asumsi multikolinieritas juga dapat melihat Nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independent kurang dari 0,95 maka model dinyatakan bebas asumsi multikolinieritas. Jika koefisien korelasi antar masing-masing variabel independent lebih dari 0,95 maka terjadi multikolinieritas antar masing-masing independen.

Tabel 4.3: Coefficients

Coefficients^a

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
,136	7,333
,238	4,204
,145	6,908
,348	2,870
,284	3,523
,146	6,868

a. Dependent Variable: PPM

Sumber: Olahan SPSS,2018

Hasil perhitungan nilai Tolerance tidak ada variabel yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Faktor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 yang artinya tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4.4: Coefficient Correlations

Coefficient Correlations^a

Model		AMH	HLS	APK	RLS	APM	APS
Correlations	AMH	1,000	,483	-,467	-,724	,133	-,608
	HLS	,483	1,000	-,307	-,591	-,170	-,268
	APK	-,467	-,307	1,000	,524	-,515	,213
	RLS	-,724	-,591	,524	1,000	-,114	,291
	APM	,133	-,170	-,515	-,114	1,000	-,572
	APS	-,608	-,268	,213	,291	-,572	1,000
Covariances	AMH	,014	,026	-,006	-,042	,002	-,013
	HLS	,026	,214	-,015	-,134	-,012	-,023
	APK	-,006	-,015	,011	,027	-,008	,004
	RLS	-,042	-,134	,027	,239	-,008	,027
	APM	,002	-,012	-,008	-,008	,023	-,016
	APS	-,013	-,023	,004	,027	-,016	,035

a. Dependent Variable: PPM

Sumber: *Olahan SPSS, 2018*

Uji multikolinieritas juga dapat dilihat dari tabel Coefficient Correlations. Besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa hanya Angka Melek Huruf (AMH) 15 Keatas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mempunyai nilai korelasi paling tinggi yaitu -0,724 atau 72,4%. Oleh karena korelasi ini masih dibawah

95% maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius.

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji korelasi antara kesalahan pengganggu atau kesalahan residual pada saat t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau sebelum t dalam model regresi linier. Penelitian ini mendeteksi autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson (DW test). Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel yang lag di antara variabel independen. Hipotesis yang akan di uji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r=0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

Tabel 4.5: pengambilan keputusan autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Desicion	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Desicion	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali, 2013

Berikut hasil pengujian autokorelasi dengan melihat nilai Durbin-Watson. Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,031.

Tabel 4.6: Model Summary

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,793 ^a	,630	,620	3,88797	2,031

a. Predictors: (Constant), AMH, HLS, APK, RLS, APM, APS

b. Dependent Variable: PPM

Sumber: Olahan SPSS,2018

Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,031.

Nilai hasil pengujian DW-test dibandingkan dengan nilai DW Tabel dengan jumlah sampel 231 dan nilai signifikansi 5% dengan nilai variabel independen 6 ($k=6$), maka tabel Durbin-Watson akan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7: Perhitungan Durbin-Watson

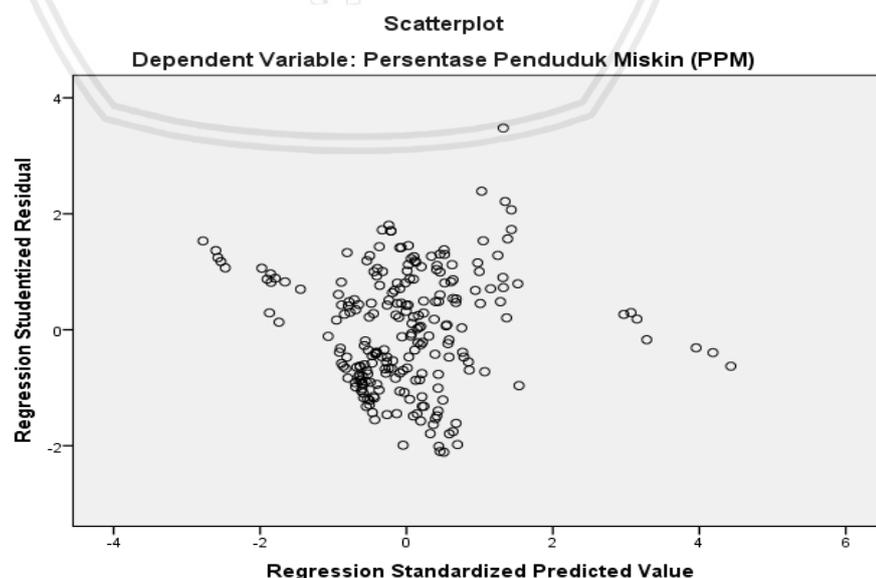
Kriteria	Ragu-ragu		Ragu-ragu			Autokorelasi
	Negatif		Bebas		Positif	
DW _{hitung}	Min	dl	du	4-du	4-dl	Max
2,031	0	1,73977	1,82854	2,17146	2,26023	4

Sumber: Olahan Penulis,2018

Perhitungan tersebut menggunakan rumus $du < d < 4-du$ pada tabel pengambilan keputusan yang menunjukkan hasil $1,82854 < 2,031 < 2,17146$ yang artinya Tidak ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini acak atau tidak terjadi gejala autokorelasi antar nilai residual.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi dan dikatakan baik jika terjadi variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (homoskedastisitas), bukan sebaliknya atau heteroskedastisitas. Metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas adalah grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat, yaitu ZPRED (Sumbu X) dengan residualnya SRESID (Sumbu Y). Apabila titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk memprediksi variabel terikat berdasarkan masukan variabel bebas (Ghozali, 2013:139-141).

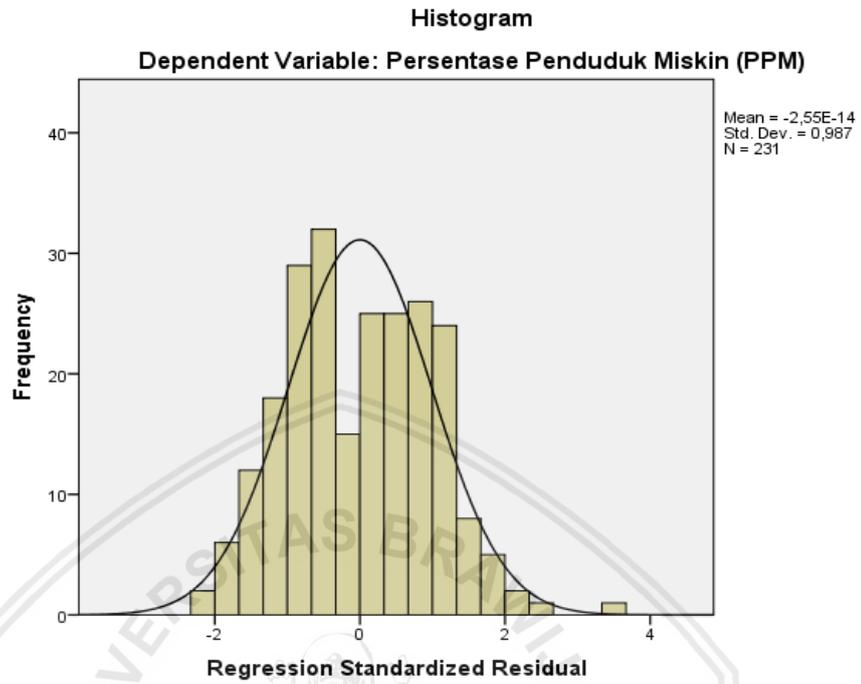


Gambar 4.2: Scatterplot
Sumber: Olahan SPSS, 2018

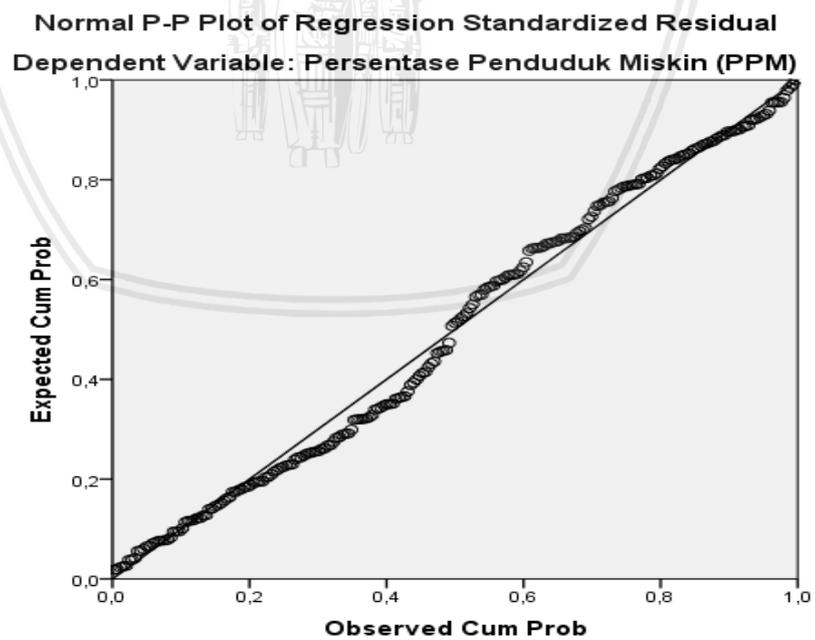
Grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji kemungkinan variabel residual memiliki distribusi normal dalam model regresi karena uji signifikansi simultan (uji F) dan uji signifikansi parameter individual (uji t) mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, maka bila dilanggar uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013:160). Penelitian menggunakan metode analisis grafik adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya atau membentuk lonceng.



Gambar 4.3: Histogram
Sumber: *Olahan SPSS,2018*



Gambar 4.4: Normal Plot of Regression Standardized Residual
Sumber: *Olahan SPSS,2018*

Tampilan grafik histogram memberikan pola data (skewness) membentuk lonceng dan grafik normal plot menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Regresi Linier Berganda

1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat dengan nilai antara nol dan satu. Nilai $R^2 = 0$ berarti variabel bebas tidak memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel terikat dan nilai $R^2 = 1$ berarti variabel bebas memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Bias atau penambahan variabel bebas yang meningkatkan R^2 tanpa melihat signifikansi variabel menjadi dasar peneliti menggunakan adjusted R^2 karena memiliki sensitivitas atas perubahan jumlah variabel bebas (Ghozali, 2013:97).

Tabel 4.8: Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,793 ^a	,630	,620	3,88797

a. Predictors: (Constant), AMH, HLS, APK, RLS, APM, APS

b. Dependent Variable: PPM

Sumber: Olahan SPSS, 2018

Tampilan output SPSS model summary besarnya adjusted R^2 adalah 0,620, hal ini berarti variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen yaitu Angka Melek Huruf (AMH) 15 Keatas, Harapan Lama Sekolah (HLS), APK SD/MI/Paket A, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), APM SD/MI/Paket A, APS 7-12 sebesar 62%. Sedangkan sisanya 38% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model.

2. Uji Simultan (F-test)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Penelitian ini membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A pada derajat kepercayaan 5%.

H_A : semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

H_0 : semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 4.9: Anova

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5756,348	6	959,391	63,467	,000 ^b
Residual	3386,045	224	15,116		
Total	9142,393	230			

a. Dependent Variable: PPM

b. Predictors: (Constant), AMH, HLS, APK, RLS, APM, APS

Sumber: Olahan SPSS,2018

Hasil uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 63,467 dengan probabilitas 0,000. Sedangkan nilai signifikan yang ditetapkan sebesar 0,05 dan F tabel sebesar 2,138141. Hal ini berarti probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 dan F hitung lebih besar dari F tabel. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Persentase Penduduk Miskin (PPM) atau dapat dikatakan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) 15 Keatas, Harapan Lama Sekolah (HLS), APK SD/MI/Paket A, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), APM SD/MI/Paket A, APS 7-12 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM). Hal ini berarti H_A diterima dan H_0 ditolak yang artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji Parsial (t-test)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel

dependen. Penelitian ini membandingkan nilai statistik t hitung dengan nilai t menurut tabel pada derajat kepercayaan 5%. Dasar analisis yang digunakan pada uji t yaitu:

- a) Jika $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b) Jika $|t_{hitung}| > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Hipotesis dan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_1 : variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

H_0 : variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 4.10: Coefficients

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	95,162	8,055		11,814	,000
APS	-,668	,188	-,391	-3,551	,000
APK	,380	,107	,296	3,556	,000
APM	-1,126	,152	-,793	-7,420	,000
HLS	4,422	,463	,658	9,549	,000
RLS	-3,514	,489	-,549	-7,190	,000
AMH	,221	,118	,200	1,875	,062

a. Dependent Variable: PPM

Sumber: *Olahan SPSS, 2018*

Hasil uji t dapat dilihat dari tabel Coefficients pada olahan SPSS.

Peneliti menetapkan tingkat signifikan sebesar 5% dan hasil t tabel menunjukkan jumlah sebesar 1,652. Enam variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi hanya Angka Melek Huruf

(AMH) 15 Keatas tidak signifikan pada 5% yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan APS 7-12, APK SD/MI/Paket A, APM SD/MI/Paket A, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) signifikan pada 5% dan hasil t hitung lebih besar dari t tabel. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen dengan persamaan matematis:

$$\text{PPM} = 95,162 - 0,668 \text{ APS 7-12} + 0,380 \text{ APK SD/MI/Paket A} - 1,126 \text{ APM SD/MI/Paket A} + 4,422 \text{ Harapan Lama Sekolah (HLS)} - 3,514 \text{ Rata-rata Lama Sekolah (RLS)} + 0,221 \text{ Angka Melek Huruf (AMH) 15 Keatas.}$$

- a. Konstanta sebesar 95,162 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka PPM sebesar 95,162 persen.
- b. Koefisien regresi APS 7-12 sebesar -0,668 menyatakan bahwa APS 7-12 bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar 0,668%. Tanda (-) menunjukkan adanya hubungan terbalik antara APS 7-12 dan Persentase Penduduk Miskin, yaitu jika APS 7-12 tinggi maka Persentase Penduduk Miskin menurun.

- c. Koefisien regresi APK SD/MI/Paket A sebesar 0,380 menyatakan bahwa jika APK SD/MI/Paket A bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,380% tahun. Tanda (+) menunjukkan adanya hubungan yang berbanding searah antara APK SD/MI/Paket A dengan Persentase Penduduk Miskin, yaitu jika APK SD/MI/Paket A tinggi maka Persentase Penduduk Miskin juga tinggi.
- d. Koefisien regresi APM SD/MI/Paket A sebesar -1,126 menyatakan bahwa APM SD/MI/Paket A bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar 1,126%. Tanda (-) menunjukkan adanya hubungan terbalik antara APM SD/MI/Paket A dan Persentase Penduduk Miskin, yaitu jika APM SD/MI/Paket A tinggi maka Persentase Penduduk Miskin menurun.
- e. Koefisien regresi Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 4,422 menyatakan bahwa jika Harapan Lama Sekolah (HLS) bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 4,422%. Tanda (+) menunjukkan adanya hubungan yang berbanding searah antara Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan Persentase Penduduk Miskin juga tinggi, yaitu

jika Harapan Lama Sekolah (HLS) tinggi maka Persentase Penduduk Miskin juga tinggi.

- f. Koefisien regresi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar -3,514 menyatakan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar 3,514%. Tanda (-) menunjukkan adanya hubungan terbalik antara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Persentase Penduduk Miskin, yaitu jika Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tinggi maka Persentase Penduduk Miskin akan menurun.

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15, Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/Mts/Paket B, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM)

- a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel bebas dalam model regresi yang baik, yaitu tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ghazali (2013:105-106) menjelaskan jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal, yaitu variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Hasil pengujian menguji multikolinieritas dengan cara melihat Variance Inflation Factor

(VIF) dan nilai tolerance untuk menunjukkan setiap variabel bebas lainnya. variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diukur oleh nilai cut off multikolinieritas sebesar $VIF \geq 10$ dan nilai tolerance sebesar > 0.10 . Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang semakin rendah sama dengan nilai VIF Tinggi. Selain itu untuk memperkuat asumsi multikolinieritas juga dapat melihat Nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independent kurang dari 0,95 maka model dinyatakan bebas asumsi multikolinieritas. Jika koefisien korelasi antar masing-masing variabel independent lebih dari 0,95 maka terjadi multikolinieritas antar masing-masing independen.

Tabel 4.11: Coefficients

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LN APS	,453	2,206
LN APK	,409	2,446
LN APM	,340	2,941
LN HLS	,450	2,223
LN RLS	,437	2,287
LN AMH	,365	2,736

a. Dependent Variable: LN PPM

Sumber: *Olahan SPSS, 2018*

Hasil perhitungan nilai Tolerance tidak ada variabel yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar

variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Faktor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 yang artinya tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4.12: Coefficient Correlations

			Coefficient Correlations ^a					
Model			LN AMH	LN APK	LN HLS	LN APS	LN RLS	LN APM
1	Correlations	LN AMH	1,000	,108	,002	-,486	-,476	-,161
		LN APK	,108	1,000	-,024	-,337	-,172	-,454
		LN HLS	,002	-,024	1,000	-,102	-,221	-,440
		LN APS	-,486	-,337	-,102	1,000	,106	,044
		LN RLS	-,476	-,172	-,221	,106	1,000	-,049
		LN APM	-,161	-,454	-,440	,044	-,049	1,000

a. Dependent Variable: LN PPM

Sumber: Olahan SPSS, 2018

Uji multikolinieritas juga dapat dilihat dari tabel Coefficient Correlations. Besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa hanya Angka Melek Huruf (AMH) 15 Keatas dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 yang mempunyai nilai korelasi paling tinggi yaitu -,486 atau 48,6%. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 95% maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius.

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji korelasi antara kesalahan pengganggu atau kesalahan residual pada saat t dengan kesalahan

pengganggu pada periode $t-1$ atau sebelum t dalam model regresi linier. Penelitian ini mendeteksi autokorelasi dengan Run Test.

H1 :Jika nilai signifikan \geq taraf nyata (0,05), maka residual random atau tidak terjadi gejala autokorelasi antar nilai residual

H0 :Jika nilai signifikansi $<$ taraf nyata (0,05), maka residual tidak random atau terjadi gejala autokorelasi antar nilai residual

Berikut ini hasil pengujian dengan Run Test:

Tabel 4.13: Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,16034
Cases < Test Value	115
Cases \geq Test Value	116
Total Cases	231
Number of Runs	95
Z	-2,835
Asymp. Sig. (2-tailed)	,005

a. Median

Sumber: Olahan SPSS,2019

Hasil pengujian pertama menunjukkan taraf signifikan sebesar 0,005 yang berarti belum mencapai 0,05 atau 5% maka residual tidak random atau terjadi gejala autokorelasi antar nilai residual. Karena terjadi gejala autokorelasi maka dilakukan pengeobatan atau perbaikan dengan cara melakukan transformasi data. Setelah

melakukan transformasi data nilai signifikan mengalami peningkatan. Berikut pengujian autokorelasi setelah dilakukan transformasi data.

Tabel 4.14: Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,01432
Cases < Test Value	115
Cases >= Test Value	116
Total Cases	231
Number of Runs	109
Z	-,989
Asymp. Sig. (2-tailed)	,323

a. Median

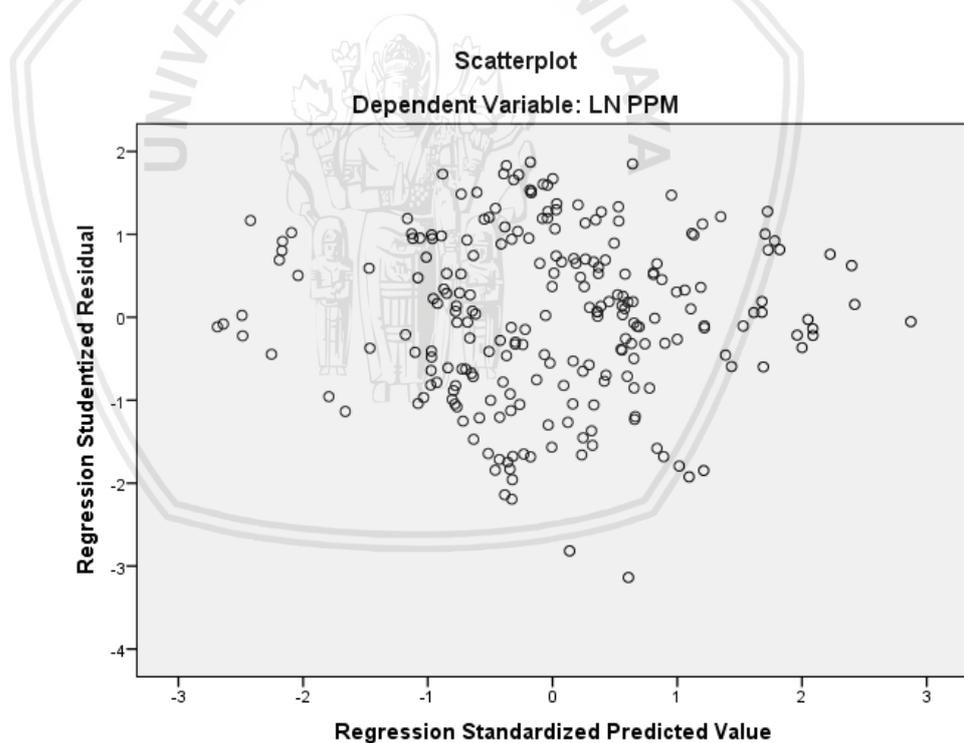
Sumber: Olahan SPSS, 2019

Hasil pengujian pertama menunjukkan taraf signifikan sebesar 0,323 yang berarti jauh diatas 0,05 atau 5% maka residual random atau tidak terjadi gejala autokorelasi antar nilai residual. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan hasil bahwa Tidak ada autokorelasi positif antar variabel independen yang artinya tidak terdapat autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi dan dikatakan baik jika terjadi variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap

(homoskedastisitas), bukan sebaliknya atau heteroskedastisitas. Metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas adalah grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat, yaitu ZPRED (Sumbu X) dengan residualnya SRESID (Sumbu Y). Apabila titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk memprediksi variabel terikat berdasarkan masukan variabel bebas (Ghozali, 2013:139-141).



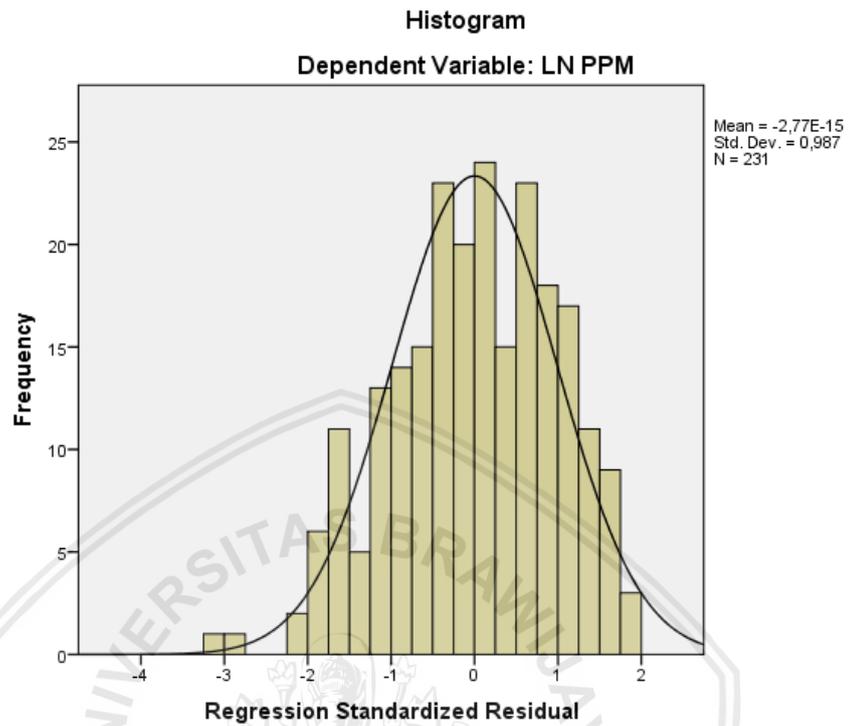
Gambar 4.5: Scatterplot
Sumber: Olahan SPSS, 2018

Grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

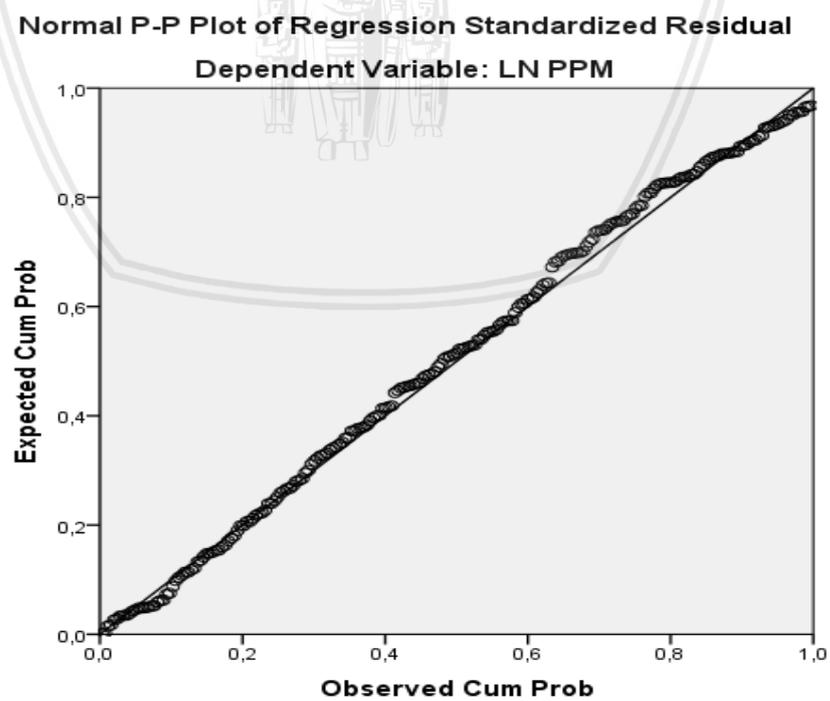
Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji kemungkinan variabel residual memiliki distribusi normal dalam model regresi karena uji signifikansi simultan (uji F) dan uji signifikansi parameter individual (uji t) mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, maka bila dilanggar uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013:160). Penelitian menggunakan metode analisis grafik adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya atau membentuk lonceng.



Gambar 4.6: Histogram
Sumber: Olahan SPSS,2018



Gambar 4.7: Normal Plot of Regression Standardized Residual
Sumber: Olahan SPSS,2018

Tampilan grafik histogram memberikan pola data (skewness) membentuk lonceng dan grafik normal plot menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Regresi Linier Berganda

1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat dengan nilai antara nol dan satu. Nilai $R^2 = 0$ berarti variabel bebas tidak memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel terikat dan nilai $R^2 = 1$ berarti variabel bebas memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Bias atau penambahan variabel bebas yang meningkatkan R^2 tanpa melihat signifikansi variabel menjadi dasar peneliti menggunakan adjusted R^2 karena memiliki sensitivitas atas perubahan jumlah variabel bebas (Ghozali, 2013:97).

Tabel 4.15: Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,722 ^a	,522	,509	,36923

a. Predictors: (Constant), LN AMH, LN APK, LN HLS, LN APS, LN RLS, LN APM

b. Dependent Variable: LN PPM

Sumber: Olahan SPSS, 2018

Tampilan output SPSS model summary besarnya adjusted R^2 adalah 0,509, hal ini berarti variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen yaitu Angka Melek Huruf (AMH) 15 Tahun Keatas, Harapan Lama Sekolah (HLS), APK SMP/Mts/Paket B, APS 13-15, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), APM SMP/Mts/Paket B sebesar 50,9%. Sedangkan sisanya 49,1% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model.

2. Uji Simultan (F-test)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Penelitian ini membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A pada derajat kepercayaan 5%.

H_A : semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

H_0 : semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 4.16: Anova

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	33,303	6	5,551	40,714	,000 ^b
Residual	30,538	224	,136		
Total	63,841	230			

a. Dependent Variable: LN PPM

b. Predictors: (Constant), LN AMH, LN APK, LN HLS, LN APS, LN RLS, LN APM

Sumber: Olahan SPSS,2018

Hasil uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 40,714 dengan probabilitas 0,000. Sedangkan nilai signifikan yang ditetapkan sebesar 0,05 dan F tabel sebesar 2,138141. Hal ini berarti probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 dan F hitung lebih besar dari F tabel. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Persentase Penduduk Miskin (PPM) atau dapat dikatakan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) 15 Tahun Keatas, Harapan Lama Sekolah (HLS), APK SMP/Mts/Paket B, APS 13-15, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), APM SMP/Mts/Paket B secara bersama-sama berpengaruh terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM). Hal ini berarti H_A diterima dan H_0 ditolak yang artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji Parsial (t-test)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Penelitian ini membandingkan nilai statistik t hitung

dengan nilai t menurut tabel pada derajat kepercayaan 5%. Dasar analisis yang digunakan pada uji t yaitu:

- a) Jika $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b) Jika $|t_{hitung}| > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Hipotesis dan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_1 : variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

H_0 : variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 4.17: Coefficients

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,757	2,709		2,864	,005
LN APS	-1,325	,771	-,118	-1,719	,087
LN APK	2,871	,550	,377	5,217	,000
LN APM	-2,742	,364	-,598	-7,542	,000
LN HLS	4,030	,471	,590	8,560	,000
LN RLS	-2,382	,298	-,559	-7,997	,000
LN AMH	-1,255	,601	-,159	-2,086	,038

a. Dependent Variable: LN PPM

Sumber: Olahan SPSS, 2018

Hasil uji t dapat dilihat dari tabel Coefficients pada olahan SPSS.

Peneliti menetapkan tingkat signifikan sebesar 5% dan hasil t tabel menunjukkan jumlah sebesar 1,652. Enam variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi yaitu APK, SMP/Mts/Paket B, APM SMP/Mts/Paket B, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata

Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) 15 Tahun Keatas semua signifikan pada 5% dan hasil t hitung lebih besar dari t tabel. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan APS 13-15 tidak signifikan pada taraf signifikan 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Persamaan matematis:

$$\text{PPM: } 7,757 + 2,871 \text{ APK SMP/Mts/Paket B} - 2,742 \text{ APM SMP/Mts/Paket B} + 4,030 \text{ Harapan Lama Sekolah (HLS)} - 2,382 \text{ Rata-rata Lama Sekolah (RLS)} - 1,255 \text{ Angka Melek Huruf (AMH) 15 Tahun Keatas}$$

- a. Konstanta sebesar 7,757 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka PPM sebesar 7,757 persen.
- b. Koefisien regresi APK SMP/Mts/Paket B sebesar 2,871 menyatakan bahwa jika APK SMP/Mts/Paket B bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 2,871%. Tanda (+) menunjukkan adanya hubungan yang berbanding searah antara APK SMP/Mts/Paket B dengan Persentase Penduduk Miskin, yaitu jika APK SMP/Mts/Paket B tinggi maka Persentase Penduduk Miskin juga tinggi.

- c. Koefisien regresi APM SMP/Mts/Paket B sebesar $-2,742$ menyatakan bahwa jika APM SMP/Mts/Paket B bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin (Y) akan mengalami penurunan sebesar $-2,742\%$. Tanda (-) menunjukkan adanya hubungan yang berbanding terbalik antara APM SMP/Mts/Paket B dengan Persentase Penduduk Miskin, yaitu jika APM SMP/Mts/Paket B tinggi maka Persentase Penduduk Miskin akan rendah.
- d. Koefisien regresi Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar $4,030$ menyatakan bahwa jika Harapan Lama Sekolah (HLS) bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin (Y) akan mengalami kenaikan sebesar $4,030\%$. Tanda (+) menunjukkan adanya hubungan yang berbanding searah antara Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan Persentase Penduduk Miskin, yaitu jika Harapan Lama Sekolah (HLS) tinggi maka Persentase Penduduk Miskin juga tinggi.
- e. Koefisien regresi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar $-2,382$ menyatakan bahwa jika Rata-rata Lama Sekolah (RLS) bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar $2,382\%$. Tanda (-) menunjukkan adanya hubungan terbalik antara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Persentase

Penduduk Miskin, yaitu jika Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tinggi maka Persentase Penduduk Miskin menurun.

- f. Koefisien regresi Angka Melek Huruf (AMH) 15 Tahun Keatas sebesar -1,255 menyatakan bahwa jika Angka Melek Huruf (AMH) bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar 1,255%. Tanda (-) menunjukkan adanya hubungan terbalik antara Angka Melek Huruf (AMH) dan Persentase Penduduk Miskin, yaitu jika Angka Melek Huruf (AMH) tinggi maka Persentase Penduduk Miskin menurun.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM)

- a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel bebas dalam model regresi yang baik, yaitu tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ghazali (2013:105-106) menjelaskan jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal, yaitu variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama

variabel bebas sama dengan nol. Hasil pengujian menguji multikolinieritas dengan cara melihat Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance untuk menunjukkan setiap variabel bebas lainnya. variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diukur oleh nilai cut off multikolinieritas sebesar $VIF \geq 10$ dan nilai tolerance sebesar > 0.10 . Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang semakin rendah sama dengan nilai VIF Tinggi. Selain itu untuk memperkuat asumsi multikolinieritas juga dapat melihat Nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independent kurang dari 0,95 maka model dinyatakan bebas asumsi multikolinieritas. Jika koefisien korelasi antar masing-masing variabel independent lebih dari 0,95 maka terjadi multikolinieritas antar masing-masing independen.

Tabel 4.18: Coefficients

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
APS	,837	1,195
APK	,355	2,816
APM	,980	1,021
HLS	,369	2,709
RLS	,449	2,225
AMH	,542	1,844

a. Dependent Variable: PPM

Sumber: Olahan SPSS, 2018

Hasil perhitungan nilai Tolerance tidak ada variabel yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Faktor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 yang artinya tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4.19: Coefficient Correlation

Coefficient Correlations^a

Model		AMH	APM	APS	APK	RLS	HLS
1	Correlations						
	AMH	1,000	-,056	,039	,014	-,537	-,132
	APM	-,056	1,000	,121	,079	-,020	-,039
	APS	,039	,121	1,000	,346	-,245	-,196
	APK	,014	,079	,346	1,000	-,234	-,679
	RLS	-,537	-,020	-,245	-,234	1,000	-,095
	HLS	-,132	-,039	-,196	-,679	-,095	1,000

a. Dependent Variable: PPM

Sumber: Olahan SPSS, 2018

Uji multikolinieritas juga dapat dilihat dari tabel Coefficient Correlations. Besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa hanya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mempunyai nilai korelasi paling tinggi yaitu -0,679 atau 67,9%. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 95% maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius.

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji korelasi antara kesalahan pengganggu atau kesalahan residual pada saat t dengan kesalahan

pengganggu pada periode $t-1$ atau sebelum t dalam model regresi linier. Penelitian ini mendeteksi autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson (DW test). Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel yang lag di antara variabel independen. Hipotesis yang akan di uji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r=0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

Tabel 4.20: Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Desicion	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Desicion	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali,2013

Berikut hasil pengujian autokorelasi dengan melihat nilai Durbin-Watson. Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,820.

Tabel 4.21: Model Summary

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,638 ^a	,407	,391	4,92022	1,820

a. Predictors: (Constant), AMH, APM, APS, APK, RLS, HLS

b. Dependent Variable: PPM

Sumber: *Olahan SPSS,2018*

Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,820. Nilai hasil pengujian DW-test dibandingkan dengan nilai DW Tabel dengan jumlah sampel 231 dan nilai signifikansi 5% dengan nilai variabel independen 6 ($k=6$), maka tabel Durbin-Watson akan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.22: Perhitungan Durbin-Watson

Kriteria	Ragu-ragu		Ragu-ragu		Autokorelasi		
	Negatif		Bebas			Positif	
DW _{hitung}	Min	dl	du	4-du	4-dl	Max	
1,820	0	1,73977	1,82854	2,17146	2,26023	4	Ragu-ragu

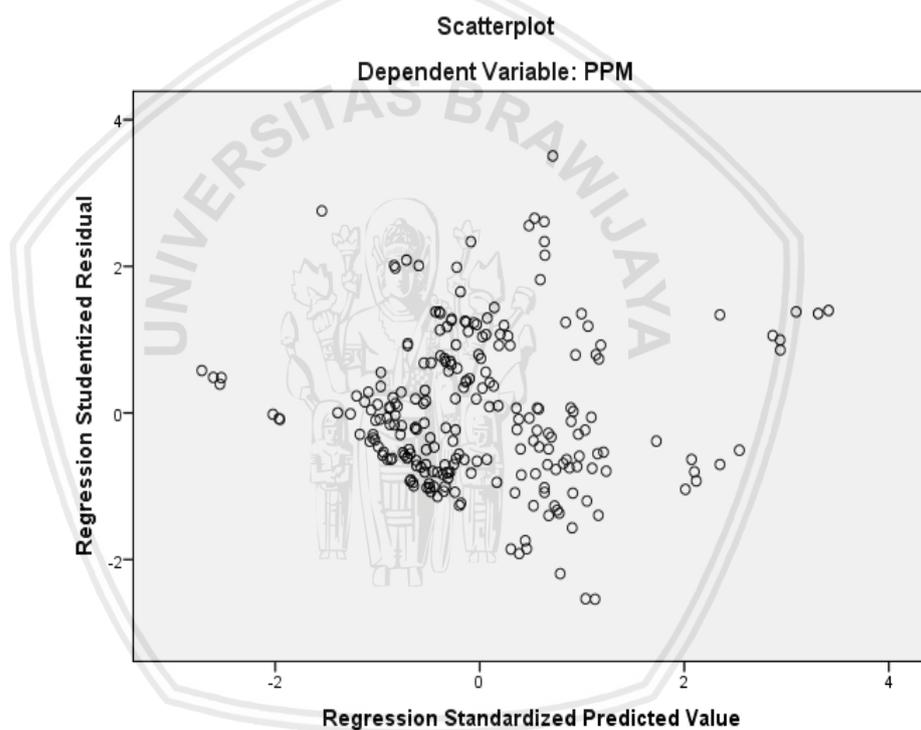
Sumber: Olahan Penulis, 2018

Perhitungan tersebut menggunakan rumus $dl \leq d \leq du$ pada tabel pengambilan keputusan yang menunjukkan hasil $1,73977 \leq 1,820 \leq 1,82854$ yang artinya *No Decision* atau tidak ada kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini acak atau tidak terjadi gejala autokorelasi antar nilai residual

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi dan dikatakan baik jika terjadi variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (homoskedastisitas), bukan sebaliknya atau heteroskedastisitas. Metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas adalah grafik Scatterplot antara nilai prediksi

variabel terikat, yaitu ZPRED (Sumbu X) dengan residualnya SRESID (Sumbu Y). Apabila titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk memprediksi variabel terikat berdasarkan masukan variabel bebas (Ghozali, 2013:139-141).

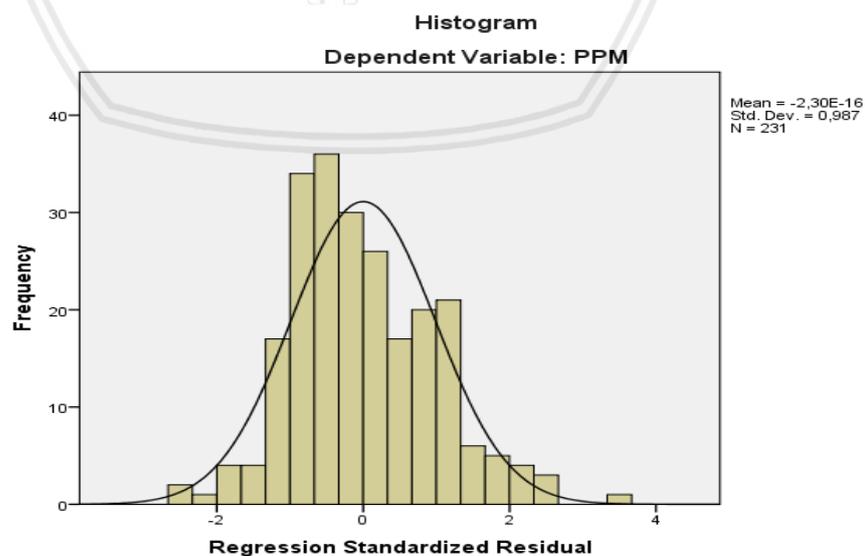


Gambar 4.8: Scatterplot
 Sumber: Olahan SPSS, 2018

Grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan.

4. Uji Normalitas

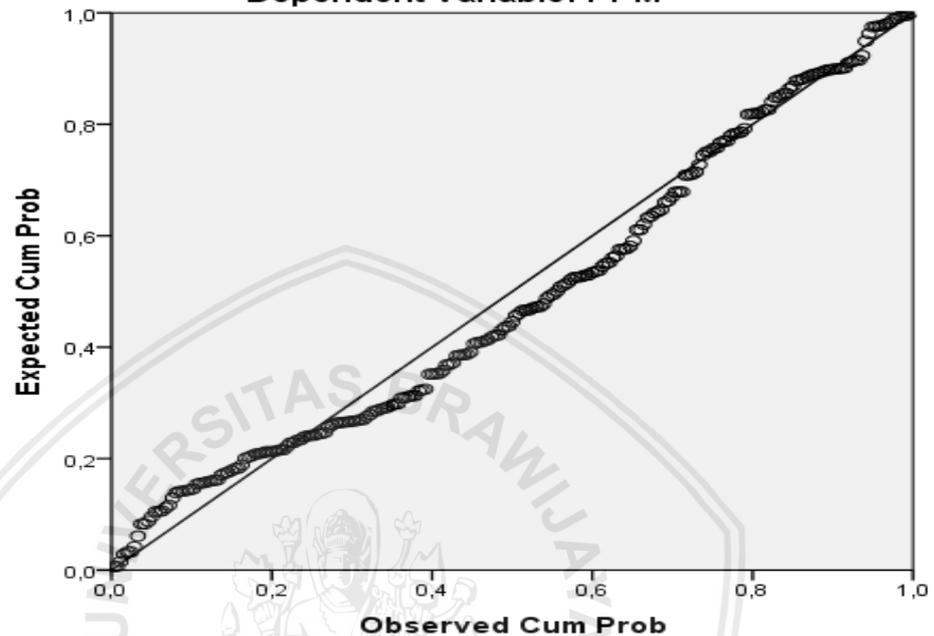
Uji normalitas digunakan untuk menguji kemungkinan variabel residual memiliki distribusi normal dalam model regresi karena uji signifikansi simultan (uji F) dan uji signifikansi parameter individual (uji t) mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, maka bila dilanggar uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013:160). Penelitian menggunakan metode analisis grafik adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya atau membentuk lonceng.



Gambar 4.9: Histogram
Sumber: *Olahan SPSS, 2018*

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PPM



Gambar 4.10: Normal Plot of Regression Standardized Residual

Sumber: *Olahan SPSS, 2018*

Tampilan grafik histogram memberikan pola data (skewness) membentuk lonceng dan grafik normal plot menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Regresi Linier Berganda

1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat dengan nilai antara nol dan satu. Nilai $R^2 = 0$ berarti variabel bebas tidak memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel terikat dan

nilai $R^2 = 1$ berarti variabel bebas memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Bias atau penambahan variabel bebas yang meningkatkan R^2 tanpa melihat signifikansi variabel menjadi dasar peneliti menggunakan adjusted R^2 karena memiliki sensitivitas atas perubahan jumlah variabel bebas (Ghozali, 2013:97).

Tabel 4.23: Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,638 ^a	,407	,391	4,92022

a. Predictors: (Constant), AMH, APM, APS, APK, RLS, HLS

b. Dependent Variable: PPM

Sumber: Olahan SPSS, 2018

Tampilan output SPSS model summary besarnya adjusted R^2 adalah 0,391, hal ini berarti variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen yaitu Angka Melek Huruf (AMH) 15 Tahun Keatas, APS 16-18, APK SMA/SMK/MA/Paket C, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 39,1%. Sedangkan sisanya 60,9% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model.

2. Uji Simultan (F-test)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Penelitian ini membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A pada derajat kepercayaan 5%.

H_A : semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

H_0 : semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 4.24: Anova

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3719,676	6	619,946	25,609	,000 ^b
Residual	5422,717	224	24,209		
Total	9142,393	230			

a. Dependent Variable: PPM

b. Predictors: (Constant), AMH, APM, APS, APK, RLS, HLS

Sumber: Olahan SPSS, 2018

Hasil uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 25,609 dengan probabilitas 0,000. Sedangkan nilai signifikan yang ditetapkan sebesar 0,05 dan F tabel sebesar 2,138141. Hal ini berarti probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 dan F hitung lebih besar dari F tabel. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Persentase Penduduk Miskin (PPM) atau dapat dikatakan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) 15 Tahun Keatas, APS 16-18, APK

SMA/SMK/MA/Paket C, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), APM SMA/SMK/MA/Paket C secara bersama-sama berpengaruh terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM). Hal ini berarti H_A diterima dan H_0 ditolak yang artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji Parsial (t-test)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Penelitian ini membandingkan nilai statistik t hitung dengan nilai t menurut tabel pada derajat kepercayaan 5%. Dasar analisis yang digunakan pada uji t yaitu:

- a) Jika $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b) Jika $|t_{hitung}| > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Hipotesis dan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_1 : variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

H_0 : variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 4.25: Coefficients

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	52,212	6,695		7,799	,000
APS	,087	,036	,135	2,396	,017
APK	,106	,053	,171	1,977	,049
APM	,000	,001	-,022	-,415	,678
HLS	,816	,569	,121	1,434	,153
RLS	-2,645	,492	-,413	-5,380	,000
AMH	-,468	,077	-,423	-6,058	,000

a. Dependent Variable: PPM

Sumber: Olahan SPSS, 2018

Hasil uji t dapat dilihat dari tabel Coefficients pada olahan SPSS. Peneliti menetapkan tingkat signifikan sebesar 5% dan hasil t tabel menunjukkan jumlah sebesar 1,652. Enam variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi yaitu APS 16-18, APK, SMA/SMK/MA/Paket C, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) 15 Tahun Keatas semua signifikan pada 5% dan hasil t hitung lebih besar dari t tabel, Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan APM SMA/SMK/MA/Paket C, Harapan Lama Sekolah (HLS) tidak signifikan pada taraf 5%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Persamaan matematis:

PPM: $52,212 + 0,087 \text{ APS } 16-18 + 0,106 \text{ APK SMA/SMK/MA/Paket C} - 2,645 \text{ Rata-rata Lama Sekolah (RLS)} - 0,468 \text{ Angka Melek Huruf (AMH) } 15 \text{ Keatas.}$

- a. Konstanta sebesar 52,212 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka PPM sebesar 52,212 persen.
- b. Koefisien regresi APS 16-18 sebesar 0,087 menyatakan bahwa jika APS 16-18 bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami kenaikan sebesar 0,087%. Tanda (+) menunjukkan adanya hubungan yang berbanding searah antara APS 16-18 dengan Persentase Penduduk Miskin, yaitu jika APS 16-18 tinggi maka Persentase Penduduk Miskin juga tinggi.
- c. Koefisien regresi APK SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 0,106 menyatakan bahwa jika APK SMA/SMK/MA/Paket C bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,106%. Tanda (+) menunjukkan adanya hubungan yang berbanding searah antara APK SMA/SMK/MA/Paket C dengan Persentase Penduduk Miskin, yaitu jika APK SMA/SMK/MA/Paket C tinggi maka Persentase Penduduk Miskin juga tinggi.
- d. Koefisien regresi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar -2,645 menyatakan bahwa jika Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar 2,645%. Tanda (-) menunjukkan adanya hubungan terbalik antara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Persentase Penduduk Miskin, yaitu jika Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tinggi maka Persentase Penduduk Miskin akan rendah.

- e. Koefisien regresi Angka Melek Huruf (AMH) 15 Tahun Keatas sebesar -0,468 menyatakan bahwa jika Angka Melek Huruf (AMH) bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar 0,468%. Tanda (-) menunjukkan adanya hubungan terbalik antara Angka Melek Huruf (AMH) dan Persentase Penduduk Miskin, yaitu jika Angka Melek Huruf (AMH) tinggi maka Persentase Penduduk Miskin menurun.

D. ANALISIS DAN INTERPRETASI

Prof. Logde mengartikan bahwa pendidikan dimaknai dalam arti luas dan arti sempit, pendidikan dalam arti luas adalah pengalaman dalam hidup atau pendidikan adalah kehidupan sedangkan dalam arti sempit pengertian pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu dan dalam jangka waktu tertentu (Ahmadi, 2016:31-32). UU Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisakan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan pendidikan dan pengentasan menjadi agenda global yang tertuang dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa tidak semua indikator SDGs siap dan bisa digunakan di Indonesia. Indikator pembangunan pendidikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia yang digunakan untuk mengukur pencapaian pendidikan yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HRL) sedangkan salah satu indikator kemiskinan yang mengacu pada kuantitas adalah Persentase Penduduk Miskin.

Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang digunakan dalam penelitian menggunakan 3 jenis tingkatan dari 4 jenis tingkatan yang ada. Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang digunakan dalam penelitian yaitu APS 7-12, 13-15 dan 16-18. Angka Partisipasi Murni (APM) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu APM SD/MI/Paket A, SMP/Mts/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SD/MI/Paket A, SMP/Mts/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C.

1. Interpretasi

Penelitian ini menggunakan tiga jenis model pengujian yang berbeda berdasarkan tingkatan pada Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pengujian dengan 3 jenis model tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing tingkatan pendidikan terhadap persentase penduduk miskin. Model pengujian dijelaskan pada ketiga model hipotesis.

- a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap Terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Tabel 4.26: Interpretasi Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Hipotesis	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	t hitung	sig.	Koefidien Regresi
H1	APS 7-12	-3,551	,000	-0,668
H8	APS 13-15	-1,719	,087	-1,325
H15	APS 16-18	2,396	,017	0,087

Sumber: Olahan Penulis, 2018

Angka Partisipasi Sekolah (APS) terbagi atas APS 7-12 tahun, APS, 13-15 tahun dan APS 16-18 Tahun. Hasil pengujian secara parsial pada APS 7-12 menunjukkan hasil bahwa APS 7-12 tahun berpengaruh sebesar -3,551 dan koefisien regresi sebesar sebesar -0,668 menyatakan bahwa APS 7-12 bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar 0,668%. Hasil pengujian secara parsial pada APS 13-15 tahun menunjukkan hasil bahwa APS 13-15 tahun tidak berpengaruh dengan t hitung sebesar -3,184 dan tidak signifikan pada 0,05. Sedangkan Hasil pengujian secara parsial pada APS 16-18 tahun

menunjukkan hasil bahwa APS 16-18 tahun berpengaruh sebesar 2,396 dan koefisien regresi sebesar sebesar 0,087 menyatakan bahwa APS 16-18 bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami kenaikan sebesar 0,087%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua Angka Partisipasi Sekolah (APS) berpengaruh terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM). APS 7-12 tahun berpengaruh negatif dan APS 16-18 Tahun berpengaruh positif sedangkan APS, 13-15 tahun tidak berpengaruh berpengaruh. Hasil perhitungan koefisien regresi tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah (APS) maka semakin kecil pengaruhnya terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM).

- b. Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap Terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Tabel 4.27: Interpretasi Angka Partisipasi Murni (APM)

Hipotesis	Angka Partisipasi Murni (APM)	t hitung	sig.	Koefisien Regresi
H3	SD/MI/Paket A	-7,420	,000	-1,126
H10	SMP/Mts/Paket B	-7,542	,000	-2,742
H17	SMA/SMK/MA/Paket C	-,415	,678	-0,000

Sumber: Olahan Penulis, 2018

Angka Partisipasi Murni (APM) terbagi atas APM APM SD/MI/Paket A, SMP/Mts/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C. Hasil pengujian secara parsial pada APM SD/MI/Paket A menunjukkan hasil bahwa APM SD/MI/Paket A berpengaruh sebesar -7,420 dan koefisien regresi sebesar sebesar -1,126 menyatakan bahwa APM SD/MI/Paket

A bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar 1,126%. Pengujian secara parsial pada SMP/Mts/Paket B menunjukkan hasil bahwa SMP/Mts/Paket B berpengaruh sebesar -7,542 dan koefisien regresi sebesar sebesar -2,742 menyatakan bahwa SMP/Mts/Paket B bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar 2,742%. Sedangkan Pengujian secara parsial pada SMA/SMK/MA/Paket C menunjukkan hasil bahwa SMA/SMK/MA/Paket C tidak berpengaruh dengan t hitung sebesar -0,415 dan koefisien regresi sebesar sebesar -0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) berpengaruh negatif terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hasil perhitungan koefisien regresi tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi Angka Partisipasi Murni (APM) maka semakin kecil pengaruhnya terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM).

- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) terhadap Terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Tabel 4.28: Interpretasi Angka Partisipasi Kasar (APK)

Hipotesis	Angka Partisipasi Kasar (APK)	t hitung	sig.	Koefidien Regresi
H2	APK SD/MI/Paket A	3,556	,000	0,380
H9	APK SMP/Mts/Paket B	5,217	,000	2,871
H16	APK SMA/SMK/MA/Paket C	1,977	,049	0,106

Sumber: Olahan Penulis, 2018

Angka Partisipasi Kasar (APK) terbagi atas APK SD/MI/Paket A, APK SMP/Mts/Paket B dan APK SMA/SMK/MA/Paket C. Hasil pengujian secara parsial pada APK SD/MI/Paket A menunjukkan hasil bahwa APK SD/MI/Paket A berpengaruh sebesar 3,556 dan koefisien regresi sebesar 0,380 menyatakan bahwa APK SD/MI/Paket A bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami kenaikan sebesar 0,380%. Pengujian secara parsial pada APK SMP/Mts/Paket B menunjukkan hasil bahwa APK SMP/Mts/Paket B berpengaruh sebesar 5,217 dan koefisien regresi sebesar 2,871 menyatakan bahwa APK SMP/Mts/Paket B bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami kenaikan sebesar 2,871%. Sedangkan hasil pengujian secara parsial pada APK SMA/SMK/MA/Paket C menunjukkan hasil bahwa APK SMA/SMK/MA/Paket C berpengaruh sebesar 1,977 dan koefisien regresi sebesar 0,106 menyatakan bahwa APK SMA/SMK/MA/Paket C bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami kenaikan sebesar 0,106%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) berpengaruh positif terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hasil perhitungan koefisien regresi tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun Angka Partisipasi Kasar (APK) terhadap Persentase

Penduduk Miskin tetapi tidak secara signifikan mampu mengurangi Persentase Penduduk Miskin. Hal ini dapat dilihat pada hasil ketiga koefisien regresi yang menunjukkan nilai positif.

- d. Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap Terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Tabel 4.29: Interpretasi Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS)	Model 1 (H4)			Model 2 (H11)			Model 3 (H18)		
	t tabel	sig.	Koefisien Regresi	t tabel	sig.	Koefisien Regresi	t tabel	sig.	Koefisien Regresi
	9,549	,000	4,422	8,560	,000	4,030	1,414	,153	0,816

Sumber: *Olahan Penulis, 2018*

Pengujian Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap Terhadap Persentase Penduduk Miskin dilakukan pada ketiga model sekaligus. Pengujian ini didasarkan pada ketiga tingkatan dalam pendidikan yang telah ditetapkan dalam uji hipotesis sebelumnya. Hasil pengujian secara parsial pada model pertama sebesar 9,549 dan koefisien regresi sebesar 4,422 yang menyatakan bahwa jika Harapan Lama Sekolah (HLS) bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami kenaikan sebesar 4,422%. Pengujian secara parsial pada model kedua sebesar 8,560 dan koefisien regresi sebesar 4,030 yang menyatakan bahwa jika Harapan Lama Sekolah (HLS) bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami kenaikan sebesar 4,030%. Sedangkan hasil Pengujian secara parsial pada model ketiga sebesar 1,414 dengan nilai signifikan 0,153 yang

artinya lebih besar dari 5% yang berarti Harapan Lama Sekolah tidak berpengaruh dipengujian model ketiga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi harapan sekolah maka semakin kecil pengaruhnya terhadap Persentase Penduduk Miskin karena penurunan pada Harapan Lama Sekolah (HLS) bernilai positif.

- e. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Tabel 4.30: Interpretasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Model 1 (H5)			Model 2 (H12)			Model 3 (H19)		
	t tabel	sig.	Koefidien Regresi	t tabel	sig.	Koefidien Regresi	t tabel	sig.	Koefidien Regresi
	-7,190	,000	-3,514	-7,997	,000	-2,382	-5,380	,000	-2,645

Sumber: Olahan Penulis, 2018

Pengujian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Terhadap Persentase Penduduk Miskin dilakukan pada ketiga model sekaligus. Pengujian ini didasarkan pada ketiga tingkatan dalam pendidikan yang telah ditetapkan dalam uji hipotesis sebelumnya. Hasil pengujian secara parsial pada model pertama sebesar -7,190 dan koefisien regresi sebesar -3,514 yang menyatakan bahwa jika Rata-rata Lama Sekolah (RLS) bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan pula sebesar -3,514%. Pengujian secara parsial pada model kedua sebesar -7,997 dan koefisien regresi sebesar -2,382 yang menyatakan bahwa jika Rata-rata Lama Sekolah (RLS) bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase

Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar 2,382%. Sedangkan hasil Pengujian secara parsial pada model ketiga sebesar -5,380 dan koefisien regresi sebesar -2,645 yang menyatakan bahwa jika Rata-rata Lama Sekolah (RLS) bertambah 1%, sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar 2,645%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh secara negatif terhadap Persentase Penduduk Miskin yang artinya jika Rata-rata Lama Sekolah (RLS) bertambah maka Persentase Penduduk Miskin akan berkurang. Hal ini dapat dilihat pada nilai t tabel maupun koefisien regresi yang menunjukkan nilai negatif.

- f. Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Tabel 4.31: Interpretasi Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH)	Model 1 (H6)			Model 2 (H13)			Model 3 (H20)		
	t tabel	sig.	Koefidien Regresi	t tabel	sig.	Koefidien Regresi	t tabel	sig.	Koefidien Regresi
	1,875	,062	0,221	-2,086	,038	-1,255	-6,058	,000	-0,468

Sumber: Olahan Penulis, 2018

Pengujian Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Terhadap Persentase Penduduk Miskin dilakukan pada ketiga model sekaligus. Pengujian ini didasarkan pada ketiga tingkatan dalam pendidikan yang telah ditetapkan dalam uji hipotesis sebelumnya. Hasil pengujian secara parsial pada model pertama sebesar 1,875 namun tidak memenuhi taraf signifikan sebesar 5% yaitu dengan nilai 0,062. Pengujian secara

parsial pada model kedua sebesar -2,086 dan koefisien regresi sebesar -1,255 menyatakan bahwa jika bahwa Angka Melek Huruf (AMH) bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar 1,255%. Sedangkan hasil Pengujian secara parsial pada model ketiga sebesar -6,058 dengan koefisien regresi sebesar -0,468 menyatakan bahwa jika bahwa Angka Melek Huruf (AMH) bertambah 1% sedangkan Persentase Penduduk Miskin tetap maka Persentase Penduduk Miskin akan mengalami penurunan sebesar 0,468%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Angka Melek Huruf seseorang maka semakin besar pengaruhnya terhadap Persentase Penduduk Miskin.

- g. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM)

Pengujian pendidikan terhadap persentase Penduduk Miskin menggunakan 3 model pengujian berdasarkan tingkatan pendidikan dan jenjang pendidikan. Model 1 menguji Angka Partisipasi Sekolah (APS)7-12, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM)APM SD/MI/Paket A, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM). Model 2

menguji Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15, Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/Mts/Paket B, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM). Sedangkan model 3 menguji Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM).

Pengujian tersebut bertujuan melihat pengaruh pendidikan terhadap Pesentase Penduduk Miskin dari masing-masing jenjang dan tingkat pendidikan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat dari nilai F hitung dan koefisien determinasi dari masing-masing model kemudian membandingkan antar model tersebut. Hasil pengjian sebaagai berikut:

Tabel 4.32: Interpretasi APS, APK, APM, HLS, RLS dan AMH

Hipotesis	Model	Adjusted R Square	F Hitung	Sig.
H7	1	0,620	63,467	,000 ^b
H14	2	0,509	40,714	,000 ^b
H21	3	0,391	25,609	,000 ^b

Sumber: Olahan Penulis,2018

Berdasarkan model summary pada model 1 besarnya adjusted R² adalah 0,620 atau 62% dan F hitung sebesar 63,467. Model summary pada model 2 besarnya adjusted R² adalah 0,509 atau 50,9%

dan F hitung sebesar 40,714. Sedangkan model summary pada model 3 besarnya adjusted R^2 sebesar 0,391 atau 39,1% dan F hitung sebesar 25,609. Berdasarkan perhitungan dari ketiga model tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan secara berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin serta semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kecil pengaruhnya terhadap kemiskinan. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan ketiga model perhitungan R^2 dan F hitung yaitu semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin kecil hasil perhitungan pada R^2 dan F hitung.

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kecil pengaruhnya terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini didasarkan pada pengujian ketiga model pada variabel pendidikan yang menggambarkan tingkatan pendidikan. Model pertama menggambarkan tingkat pendidikan dasar (SD Sederajat), model kedua menggambarkan tingkat pendidikan menengah (SMP Sederajat) dan model ketiga menggambarkan tingkat pendidikan atas (SMA Sederajat).

2. Analisis

A. Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan

Kaitan antara pendidikan dan kemiskinan telah dibuktikan diberbagai negara. Saat ini negara-negara di dunia telah berfokus pada mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendidikan yang berkualitas melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal tersebut

membuktikan bahwa isu tentang kemiskinan dan pendidikan menjadi isu yang serius untuk ditangani. Permasalahan pendidikan dan kemiskinan penting untuk diteliti dan dikaji dalam sebuah negara.

McKee (1981:227) dalam Ahmadi (2016:211) mengatakan bahwa pendidikan dan kemiskinan digambarkan dengan lingkaran setan yang artinya penduduk atau masyarakat miskin karena pendidikannya rendah dan pendidikan masyarakat/penduduk rendah dikarenakan masyarakat miskin. Hasil perhitungan dalam penelitian ini telah membuktikan adanya pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan.

Penelitian ini menguji pendidikan dengan variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) sedangkan kemiskinan menggunakan variabel Persentase Penduduk Miskin (PPM). Pengujian menggunakan 3 jenis model pengujian yang didasarkan tingkat dan jenjang pendidikan. Ketiga model pengujian tersebut membuktikan bahwa pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan dengan melihat hasil perhitungan berdasarkan F hitung pada model 1 sebesar 63,467, Model 2 sebesar 40,714 dan model 3 sebesar 25,609. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan model summary pada model 1 besarnya adjusted R^2 adalah 0,620 atau 62% dan F hitung sebesar 63,467. Model summary pada

model 2 besarnya adjusted R^2 adalah 0,509 atau 50,9% dan F hitung sebesar 40,714. Sedangkan model summary pada model 3 besarnya adjusted R^2 sebesar 0,391 atau 39,1% dan F hitung sebesar 25,609. Berdasarkan perhitungan dari ketiga model tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan secara berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin serta semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kecil pengaruhnya terhadap kemiskinan. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan ketiga model perhitungan R^2 dan F hitung yaitu semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin kecil hasil perhitungan pada R^2 dan F hitung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa AMH, APS, APM, APK, dan RLS memiliki pengaruh terhadap PPM. Pada perhitungan untuk 33 provinsi di Indonesia pendidikan memiliki pengaruh sebesar 82.8% terhadap kemiskinan,. Perhitungan pada 33 provinsi di Indonesia, APS berpengaruh positif, APM dan RLS berpengaruh negatif, AMH dan APK tidak berpengaruh terhadap PPM pada tahun 2006-2011. Namun penelitian ini tidak menguji seluruh tingkatan pada APS, APM dan APK sehingga penelitian belum secara rinci menyajikan aspek pendidikan terutama APS, APM dan APK.

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kecil pengaruhnya terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini didasarkan pada pengujian ketiga model pada variabel pendidikan yang menggambarkan tingkatan pendidikan. Model

pertama menggambarkan tingkat pendidikan dasar (SD Sederajat), model kedua menggambarkan tingkat pendidikan menengah (SMP Sederajat) dan model ketiga menggambarkan tingkat pendidikan atas (SMA Sederajat).

Hal ini memperkuat Teori McKee (1981:227) dalam Ahmadi (2016:211) mengatakan bahwa pendidikan dan kemiskinan digambarkan dengan lingkaran setan yang artinya penduduk atau masyarakat miskin karena pendidikannya rendah dan pendidikan masyarakat/penduduk rendah dikarenakan masyarakat miskin. Akan tetapi tingkat pendidikan mempengaruhi seberapa besar pengaruhnya terhadap kemiskinan. hal ini sejalan dengan Tarabini (2010) yang menyatakan bahwa meskipun agenda global memperhitungkan bahwa pendidikan semakin diperlukan, tetapi tidak cukup sebagai satu-satunya strategi untuk mengurangi kemiskinan dan merangsang pengembangan.

B. Pembangunan Pendidikan di Indonesia

Pembangunan dan pendidikan merupakan dua hal yang saling terkait dan menentukan dimana tidak ada proses pembangunan tanpa pendidikan tidak ada pendidikan yang berhasil tanpa didukung pembangunan (Ahmadi, 2016:208). Pembangunan pendidikan telah menjadi salah satu komitmen negara-negara di dunia dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*). Pembangunan pendidikan global menurut (Tarabini, 2010) setidaknya ada tiga alasan utama yang menjelaskan batas-batas agenda global untuk pembangunan:

- 1) Agenda global tidak memperhitungkan bahwa meskipun pendidikan semakin diperlukan, itu juga tidak cukup sebagai satu-satunya strategi untuk mengurangi kemiskinan dan merangsang pengembangan.
- 2) Agenda yang masih bergantung pada ortodoksi dan yang tidak mengubah esensi neo-liberalisme.
- 3) Agenda yang menghilangkan ketimpangan sosial dan pendidikan sebagai tujuan eksplisit untuk ditangani.

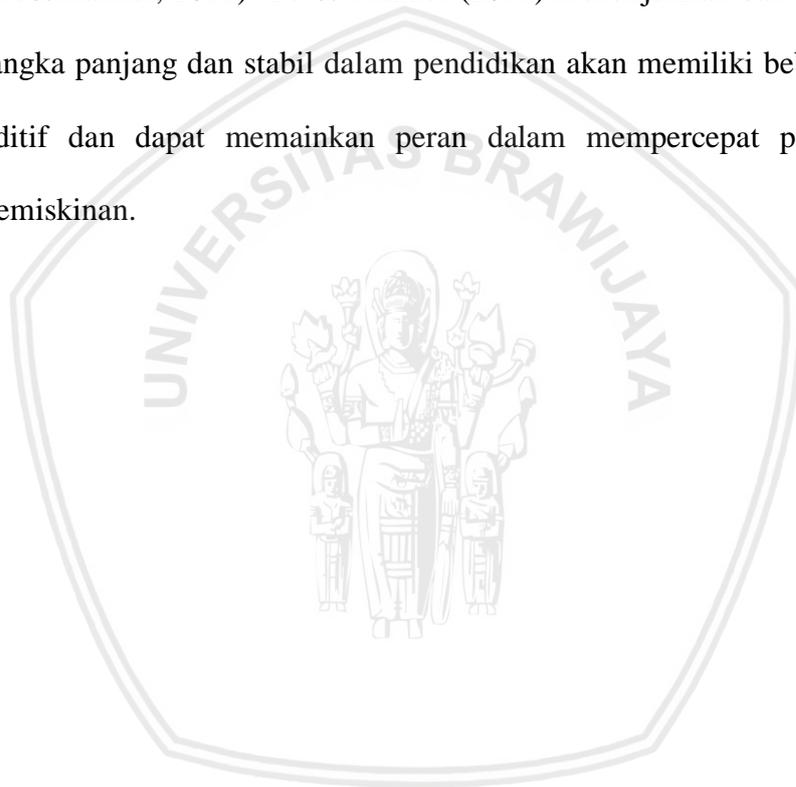
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global tidak terlepas dari agenda global tersebut. Saat ini Indonesia berusaha menghilangkan ketimpangan sosial melalui pendidikan dengan menerapkan kebijakan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam bidang pendidikan. Namun sesuai dengan pendapat Tarabini (2010) yaitu meskipun pendidikan semakin diperlukan, itu juga tidak cukup sebagai satu-satunya strategi untuk mengurangi kemiskinan dan merangsang pengembangan. Permasalahan pendidikan di Indonesia lebih kompleks yang disebabkan kondisi demografi, sosial ekonomi dan budaya yang beragam. Meskipun pemerintah telah memprioritaskan pendidikan namun belum mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Hal tersebut terlihat dalam hasil penelitian dan data dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa pendidikan masih belum merata diseluruh wilayah Indonesia.

C. Ekonomi Pendidikan dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia

Isu mendasar masalah kemiskinan sebuah negara adalah pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yaitu pertumbuhan hanya disumbang oleh beberapa orang kaya sementara kemiskinan dan distribusi pendapatan semakin memburuk sehingga mengakibatkan ketimpangan (Kemendiknas, 2010:1). Pengukuran kemiskinan melalui pendidikan dapat diukur dengan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis atau sampai tingkat mana masyarakat mendapat pendidikan formal (Haughton & Shahidur, 2012:3). Kemampuan membaca dan menulis masyarakat dalam penelitian digambarkan dengan Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut menunjukkan nilai negatif terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini membuktikan bahwa kedua variabel tersebut mampu mengurangi kemiskinan. Lebih lanjut Haughton & Shahidur (2012:5) mengatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pendidikan cukup penting karena pendidikan memegang peran utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan. Akan tetapi hasil perhitungan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kecil pengaruhnya terhadap kemiskinan. Hal ini didasarkan pada pengujian ketiga model pada variabel pendidikan yang menggambarkan tingkatan pendidikan. Model pertama menggambarkan tingkat pendidikan dasar (SD Sederajat), model kedua menggambarkan

tingkat pendidikan menengah (SMP Sederajat) dan model ketiga menggambarkan tingkat pendidikan atas (SMA Sederajat).

Teori *Human Capital* yang digambarkan dengan statistik pengeluaran fiskal untuk pendidikan secara signifikan mampu mengurangi kemiskinan di provinsi Sichuan pada tahun 2000 hingga 2009 (Yu&Tianhui, 2011). Yu & Tianhui (2011) menunjukkan bahwa investasi jangka panjang dan stabil dalam pendidikan akan memiliki beberapa efek aditif dan dapat memainkan peran dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pendidikan dengan variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) sedangkan kemiskinan menggunakan variabel Persentase Penduduk Miskin (PPM). Pengujian menggunakan 3 jenis model pengujian yang didasarkan tingkat dan jenjang pendidikan. Pengujian tersebut bertujuan melihat pengaruh pendidikan terhadap Pesentase Penduduk Miskin dari masing-masing jenjang dan tingkat pendidikan.

Model 1 menguji Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM). Model 2 menguji Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15, Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/Mts/Paket B, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM). Sedangkan model 3 menguji Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket

C, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM).

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun berpengaruh sebesar -3,551 dan koefisien regresi sebesar -0,668.
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun menunjukkan hasil bahwa APS 13-15 tahun tidak berpengaruh dengan t hitung sebesar -3,184 dan tidak signifikan pada 0,05.
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun berpengaruh sebesar 2,396 dan koefisien regresi sebesar 0,087.
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A berpengaruh sebesar -7,420 dan koefisien regresi sebesar -1,126.
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B berpengaruh sebesar -7,542 dan koefisien regresi sebesar -2,742.
6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C tidak berpengaruh dengan t hitung sebesar -0,415 dan koefisien regresi sebesar -0,000.
7. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A berpengaruh sebesar 3,556 dan koefisien regresi sebesar 0,380.
8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B berpengaruh sebesar 5,217 dan koefisien regresi sebesar 2,871.
9. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C berpengaruh sebesar 1,977 dan koefisien regresi sebesar 0,106.

10. Harapan Lama Sekolah (HLS) pada model pertama sebesar 9,549 dan koefisien regresi sebesar 4,422, model kedua sebesar 8,560 dan koefisien regresi sebesar 4,030, model ketiga sebesar 1,414 dengan nilai signifikan 0,153.
11. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada model pertama sebesar -7,190 dan koefisien regresi sebesar -3,514, model kedua sebesar -7,997 dan koefisien regresi sebesar -2,382, model ketiga sebesar -5,380 dan koefisien regresi sebesar -2,645.
12. Angka Melek Huruf (AMH) pada model pertama sebesar 1,875 namun tidak memenuhi taraf signifikan sebesar 5% yaitu dengan nilai 0,062, model kedua sebesar -2,086 dan koefisien regresi sebesar -1,255, model ketiga sebesar -6,058 dengan koefisien regresi sebesar -0,468.
13. Berdasarkan pengujian secara simultan, model model 1 menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh sebesar 62%. Model model 2 menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh sebesar 50,9%. Sedangkan model model 3 menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh sebesar 39,1%.

Berdasarkan pengujian variabel pendidikan yang diuji secara simultan menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) mampu mempengaruhi Persentase Penduduk Miskin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pendidikan berpengaruh terhadap

kemiskinan. Akan tetapi semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kecil pengaruhnya terhadap kemiskinan. Hal ini didasarkan pada pengujian ketiga model pada variabel pendidikan yang menggambarkan tingkatan pendidikan. Model pertama menggambarkan tingkat pendidikan dasar (SD Sederajat), model kedua menggambarkan tingkat pendidikan menengah (SMP Sederajat) dan model ketiga menggambarkan tingkat pendidikan atas (SMA Sederajat).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut kesimpulan yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Berdasarkan teori lingkaran setan Kemiskinan menyatakan bahwa penduduk atau masyarakat miskin karena pendidikannya rendah dan pendidikan masyarakat/penduduk rendah dikarenakan masyarakat miskin maka pemerintah perlu memperluas akses pendidikan masyarakat melalui bantuan pendidikan serta fokus pada pemerataan pendidikan pada setiap provinsi di Indonesia. Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi dan perluasan lapangan pekerjaan nantinya bisa memutus rantai kemiskinan.
2. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan akan tetapi semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kecil pengaruhnya terhadap kemiskinan. Maka dari itu pemerintah perlu membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas untuk tingkat SD sederajat, SMP Sederajat dan SMA Sederajat baik

lapangan pekerjaan formal dan informal agar siswa mendapat pekerjaan yang sesuai setelah lulus sehingga mengurangi kemiskinan.

3. Saran bagi pemerintah untuk menghitung Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Pendidikan Tinggi. Adanya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Tinggi dapat mengitung dan menganalisis pengaruh Pendidikan Tinggi terhadap Kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi,Rulam.2016.*Pengantar Pendidikan:Asas Dan Filsafat Pendidikan*. Sleman.AR-Ruzz Media
- Amaliah,Dini.2015. *Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin*. Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 2 No. 3 Nopember 2015. Universitas Indraprasta PGRI
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*.Rineka Cipta. Jakarta
- Assegaf, Nurhayati Ali.2015.*Konsep Kesejahteraan dan Problematika Kemiskinan:Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program BLT*.Intrans Publishing.Malang
- Badan Pusat Statistik.2018. *Statistik Indonesia 2018*.Jakarta. Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik.2018. *Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016*. Jakarta. [diakses pada 4 November 2018 pukul 21.11] <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi--2002-2016.html>
- Badan Pusat Statistik.2018. *Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen*.Jakarta [diakses pada 19 September 2018 pukul 13.03] <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Badan Pusat Statistik.2016.*Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.Jakarta
- Badan Pusat Statistik.2014. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Badan Pusat Statistik.Jakarta
- Boakari, Francis Musa.2015. *11. Poverty And Education: Brazil's Search For Viable Solutions?*.Advances in Education in Diverse Communities: Research, Policy and Praxis, Volume 4, 253–294. ISSN: 1479-358X/doi:10.1016/S1479-358X(04)04011-2
- Departemen Pendidikan Nasional.2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.Depdiknas.Jakarta
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Gupta, Subir., Anirban Das., Mauparna Nandan., Priyabrata Bandyopadhyay.2011. *A Study to Identify Poverty as a Key Factor to Less Enrolments in Higher Education in West Bengal: e- Learning and e-Monitoring as Best Way Out to Increase GER*. Department of Mathematics, National Institute of Technology, Durgapur. India. 978-1-4577-0240-2/11/IEEE

Ilmugeografi.com.2018. *Arti Letak Astronomis dan Geografis*. 12 January 2016 [diakses pada 4 November 2018 pukul 21.11]

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/arti-letak-astronomis-dan-geografis>

Kuncoro, Dkk .2010.*Pengentasan Kemiskinan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.Jakarta

Fitriati,Ita dan Muhammad Ghazali.2017. *Pemodelan Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia Menggunakan Support Vector Regression*. Seminar Nasional Riset Kuantitatif Terapan 2017. STKIP Taman Siswa Bima

Haughton, jonathan & Shahidur R. Khandker.2012.*Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*.Salemba Empat.Jakarta terjemahan dari Haughton, jonathan & Shahidur R. Khandker.2010.*Handbook on Poverty And Inequality*.The World Bank

Husamah, Arina Restian dan Rohmad Widodo.2015.*Pengantar Pendidikan*.UMM Press.Malang

Hunter, Richard C.2015. *Nclb And The New Esea Title I Program: Poverty And Education*. Advances in Educational Administration, Volume 9, 91–110. ISSN: 1479-3660/doi:10.1016/S1479-3660(06)09005-6

Jalaluddin dan Abdullah Idi.2016.*Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat Dan Pendidikan*.Rajawali Pers.Jakarta

Karini,Pilih.2018. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16—18 Tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Jurnal Pendidikan. ISSN: 2087-9490 (p); 2597-940X (o) Vol. 10, No. 1 (2018). SMAN 1 Pangkalpinang

Ladd, Helen F.2012. *Presidential Address: Education and Poverty: Confronting the Evidence*. Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 31, No. 2, 203–227 (2012). DOI:10.1002/pam.21615

- Mahsunah, Durrotul. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya
- Nirwana, Indah Dewi. 2013. *Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin (Studi Pada 33 Provinsi Di Indonesia, 6 Provinsi Di Pulau Jawa, Dan 27 Provinsi Di Luar Pulau Jawa Pada Tahun 2006-2011)*. Skripsi Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang
- Rusdiana, H. Ahmad. 2015. *Kebijakan Pendidikan "dari Filosofi ke Implementasi"*. CV. Pustaka Setia. Bandung
- Silalahi, Uber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sirusa, Badan Pusat Statistik. 2018. *Angka Partisipasi Kasar (APK)*. Jakarta [diakses pada 9 September 2018 pukul 13:57] <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/8>
- Sirusa, Badan Pusat Statistik. 2018. *Angka Partisipasi Murni (APM)*. Jakarta [diakses pada 9 September 2018 pukul 13:58] <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/9>
- Sirusa, Badan Pusat Statistik. 2018. *Angka Partisipasi Sekolah (APS)*. Jakarta [diakses pada 9 September 2018 pukul 13:59] <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/10>
- Sirusa, Badan Pusat Statistik. 2018. *Harapan Lama Sekolah (HLS)*. Jakarta [diakses pada 9 September 2018 pukul 14:01] <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1016>
- Sirusa, Badan Pusat Statistik. 2018. *Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)*. Jakarta [diakses pada 9 September 2018 pukul 14:02] <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/572>
- Sirusa, Badan Pusat Statistik. 2018. *Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH)*. Jakarta [diakses pada 9 September 2018 pukul 14:05] <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/7>
- Sirusa, Badan Pusat Statistik. 2018. *Persentase Penduduk Miskin (Headcount Index/PO)*. Jakarta [diakses pada 9 September 2018 pukul 14:06] <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/18>
- Sirusa, Badan Pusat Statistik. 2018. *Garis Kemiskinan (GK)*. Jakarta [diakses pada 14 September 2018 pukul 16:02] <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/50>

- Sirusa, Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1)*. Jakarta [diakses pada 14 September 2018 pukul 16:05] <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/19>
- Sirusa, Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2)*. Jakarta [diakses pada 14 September 2018 pukul 16:08] <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/20>
- Soyomukti, Nurani. 2016. *Teori-Teori Pendidikan Dari Tradisional, Neo-Liberal, Marxis-Sosialis Hingga Pos-Modern*. AR-Ruzz Media. Sleman
- Sudijono, Anas. 2015. *Pengantar Statistik Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sugoyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Tarabini, Aina. 2010. *Education and poverty in the global development agenda: Emergence, evolution and consolidation*. International Journal of Educational Development, 30 (2010) 204–212. doi:10.1016/j.ijedudev.2009.04.009
- United Nations Development Programme. 2018. *Goal 1: No poverty*. PBB [diakses pada 19 September 2018 pukul 13.30] <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html>
- United Nations Development Programme. 2018. *Goal 4: Quality education*. PBB [diakses pada 19 September 2018 pukul 13.37] <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html>
- United Nations Development Programme. 2015. *Report Indicators and Data Mapping to Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Targets Case of Indonesia 2015*. United Nations Development Programme in Indonesia. Jakarta
- Wedgwood, Ruth. 2007. *Education and poverty reduction in Tanzania*. International Journal of Educational Development, 27 (2007) 383–396. doi:10.1016/j.ijedudev.2006.10.005
- World Bank. 2004. *Education in Rwanda: Rebalancing Resources to Accelerate Post-Conflict Development and Poverty Reduction*. Washington, D.C.

Yu, Chongyuan & Tianhui Zhuang.2011. *Empirical analyses of the relationship between Financial education expenditure and Poverty population*. Sichuan Agricultural UniversityYa'an, China. 978-1-4244-8694-6/11/IEEE



Lampiran 1: Angka Partisipasi Kasar menurut Provinsi 2011-2017

Provinsi	2011			2012			2013		
	Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)		
	SD/MI /Paket A	SMP/ Mts/Paket B	SM/SM K/MA/ Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/ Mts/Paket B	SM/SM K/MA/ Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/ Mts/Paket B	SM/SMK /MA/Paket C
ACEH	105,67	97,15	79,29	108,7	96,47	77,62	110,7	94,39	75,09
SUMATERA UTARA	104,76	89,18	78,97	106,4	88,59	80,81	110	86,84	77,15
SUMATERA BARAT	104,02	88,7	70	107	87,81	72,53	109,9	85,46	71
RIAU	103,59	89,96	71,82	103,6	93,3	68,73	107,3	88,49	69,6
JAMBI	105,01	87,14	66,66	106,7	88,11	65,8	109,4	85,17	65,61
SUMATERA SELATAN	103,74	90,61	64,49	106,1	86,65	69,73	110,7	86,07	63,78
BENGKULU	105,45	91,33	67,61	107,6	95,93	67,42	111,4	85	72,71
LAMPUNG	104,02	89,25	61,76	106,6	93,41	62,03	110,7	85,47	63,81
KEP. BANGKA BELITUNG	106,14	81,34	61,34	109,5	78,35	59,69	110	73,38	68,5
KEP. RIAU	102,56	96,96	80,96	105,6	92,45	74,38	108,9	90,21	80,26
DKI JAKARTA	98,28	91,92	72,53	98,37	94,58	75,34	103,9	86,35	72,72
JAWA BARAT	101,09	87,96	56,09	103,3	87,44	64,9	106,8	85,26	60,12
JAWA TENGAH	102,67	92,8	64,02	104,9	91,51	67,03	109	87,42	64,02
DI YOGYAKARTA	104,54	90,08	86,51	107,2	89,05	83,02	108,5	83,37	90,04
JAWA TIMUR	101,01	92,65	63,58	102,4	93,6	67,25	105,8	90,34	62,91
BANTEN	104,12	91,62	60,1	104,8	87,96	69,65	107,5	89,85	63,32
BALI	99,34	92,43	82,18	98,79	94,78	86,83	105,6	93,88	79,92
NUSA TENGGARA BARAT	102,74	92,93	69,04	104,9	93,89	68,52	107,9	88,72	65
NUSA TENGGARA TIMUR	110,9	80,23	57,92	112,3	82,05	59,96	113,4	80,25	64,85
KALIMANTAN BARAT	107,07	78,44	52,75	108,2	82,24	52,57	110,6	75,68	59,02
KALIMANTAN TENGAH	104,47	90,19	58,32	109,2	79,2	60,65	110,8	80,85	58,85
KALIMANTAN SELATAN	103,22	88,21	56,04	104,5	84,55	66,75	108,8	79,52	62,14

Provinsi	2011			2012			2013		
	Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)		
	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C
KALIMANTAN TIMUR	104,92	97,59	73,55	107,1	92,9	81,33	107,1	90,79	83,02
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI UTARA	102,31	92,46	75,71	104,7	94,02	74,58	107,4	84,68	80,88
SULAWESI TENGAH	102,4	85,93	68,65	103,1	81,22	71,83	103,1	86,1	77,98
SULAWESI SELATAN	101,87	87,69	66,68	102,8	88,3	74,87	108,5	78,72	74,71
SULAWESI TENGGARA	103,42	93,23	71,3	108,2	89,83	71,55	110,2	81,91	72,31
GORONTALO	104,25	84,82	61,13	105,4	81,34	62,39	109,8	73,88	65,6
SULAWESI BARAT	101,43	84,87	63,13	102,6	81,06	64,16	105,8	70,13	71,57
MALUKU	104,67	94,83	87,49	107,9	91,16	83,08	109,7	87,77	85,44
MALUKU UTARA	107,75	90,48	81,85	107,9	87,57	85,45	110,6	82,08	81,19
PAPUA BARAT	103,57	88,06	67,35	106,4	89,15	67,83	105,2	87,45	73,24
PAPUA	84,06	67,39	46,29	84,32	71,71	44,23	85,95	65,01	53,48

Provinsi	2014			2015			2016			2017		
	Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)		
	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C
ACEH	111,66	95,87	81,53	113,4	97,88	83,33	111,3	99,15	87,47	110,31	98,74	87,52
SUMATERA UTARA	110,34	90,29	82,96	112,6	95,41	84,14	110,9	90,71	93,25	109,5	90,74	93,64
SUMATERA BARAT	110,89	89,05	80,46	113,3	90,94	81,42	110,4	91,05	84,7	110,46	90,4	88,39
RIAU	109,42	90,79	76,33	110,4	94,14	76,16	110	93,84	78,3	108,3	92,4	85,05
JAMBI	110,73	87,83	73,63	112	91,78	76,12	113	90,75	80,36	112,4	86,37	83,54
SUMATERA SELATAN	112,01	88,43	72,51	114,5	93,56	73,18	114,3	88,54	82,51	112,14	89,09	83,44

Provinsi	2014			2015			2016			2017		
	Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)		
	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/S MK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/S MK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/S MK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/S MK/MA/Paket C
N												
BENGKULU	113,95	88,23	79,49	116,2	88,79	82,79	113,1	90,38	83,56	112,71	90,52	87,1
LAMPUNG	112,74	86,76	68,49	113,4	100,8	73,9	111,4	93,58	82,98	109,77	91,04	85,16
KEP. BANGKA BELITUNG	113,22	82,52	75,51	111,1	87,6	76,41	111,8	84,38	79,1	110,58	84,53	82,88
KEP. RIAU	108,99	91,06	81,36	108,3	92,38	93,2	108,9	90,4	89,47	106,82	90,45	95,79
DKI JAKARTA	104,18	90,86	74,71	105,3	88,35	76,35	104,3	90,89	73,09	103,37	93,88	79,51
JAWA BARAT	106,98	87,5	68,55	109,4	90,07	70,23	108,1	89,58	70,56	107,54	88,8	76,48
JAWA TENGAH	110,18	89,4	73,55	110,4	91,4	82,15	109,5	89,96	86,27	108,44	91,09	84,35
DI YOGYAKARTA	109,11	90,66	94,62	106,7	97,88	82,64	106,8	93,15	91,87	106,29	94,77	93,38
JAWA TIMUR	106,88	91,98	72,24	108,6	91,13	80,02	108,2	92,54	81,23	106,79	92,22	81,43
BANTEN	109,89	89,55	72,94	112,1	92,27	69,76	109,1	92,17	71,65	109,56	91,14	75,89
BALI	105,59	95,99	85,27	105	96,82	86,61	105	96,19	86,41	104,35	96,29	90,04
NUSA TENGGARA BARAT	109,08	92,44	76,68	111,5	91,94	89,51	110,8	93,4	91,25	109,63	94,97	93,89
NUSA TENGGARA TIMUR	114,68	88,66	71,86	116,5	88,96	75,54	114,1	89,56	79,34	114,05	91,35	78,83
KALIMANTAN BARAT	113,75	80,15	65,72	114,8	82,3	81,88	113,8	79,79	87	115,05	81,2	82,48
KALIMANTAN TENGAH	112,01	84,89	67,74	114,8	95,94	70,7	114	86,3	78,44	112,48	87,3	80,38
KALIMANTAN SELATAN	110,52	82,45	71,36	111,1	82,81	73,88	111,6	85,78	76,88	110,3	85,7	77,44
KALIMANTAN	110,32	92,04	85,97	112,6	97,9	90,31	110	95,28	95,38	108,07	91,46	99,51

Provinsi	2014			2015			2016			2017		
	Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)			Angka Partisipasi Kasar (A P K)		
	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/S MK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/S MK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/S MK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/S MK/MA/Paket C
TIMUR												
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	101,7	100,5	83,77	104	96,6	89,85	103,86	98,12	87,68
SULAWESI UTARA	108,86	87,7	83,48	111,2	91,06	86,3	110,3	89,5	86,32	108,74	88,52	91,73
SULAWESI TENGAH	104,71	88,53	83,35	107,3	90,73	82,87	105,8	89,48	83,45	104,19	91,86	84,85
SULAWESI SELATAN	109,06	82,77	78,51	111,3	85,56	78,03	109,7	83,38	83,66	109,63	83,97	83,14
SULAWESI TENGGARA	112,4	85,97	82,22	111,6	87,39	81,39	110	86,7	81,81	112,1	88,06	80,01
GORONTALO	111,88	78,64	76,95	110,6	81,87	86,74	108,3	83,71	88,67	111,3	81,7	80,89
SULAWESI BARAT	108,42	80,41	76,3	105,9	80,25	84,98	106,2	81	83,49	110,19	83,02	80,34
MALUKU	111,35	90,5	86,04	113	88,92	95,13	110,3	90,61	92,12	112,07	94,99	89,71
MALUKU UTARA	110,75	86,06	84,23	115,4	93,9	84,61	113,7	89,13	83,67	113,14	87,05	91,56
PAPUA BARAT	109,36	87,86	83,12	113,5	90,33	89	111,5	92,44	89,59	110,21	90,96	89,69
PAPUA	90,67	71,02	61,53	95,15	73,59	66,97	94,74	72,07	66,85	92,94	82,2	67,94

Lampiran 2: Angka Partisipasi Sekolah menurut Provinsi 2011-2017

Provinsi	2011			2012			2013		
	Angka Partisipasi Sekolah (A P S)			Angka Partisipasi Sekolah (A P S)			Angka Partisipasi Sekolah (A P S)		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
ACEH	98,99	94,37	72,14	99,36	94,34	74,59	99,66	95,23	74,7
SUMATERA UTARA	98,34	89	67,1	98,6	90,83	69,86	99,03	92,11	71,24
SUMATERA BARAT	98,09	90,12	68,84	98,34	90,5	71,24	98,81	92,2	74,1
RIAU	97,68	88,28	65,41	98,13	88,01	66,55	98,59	90,35	69,79
JAMBI	98,27	88,08	59,99	98,7	91,11	59,71	98,81	91,96	63,97

Provinsi	2011			2012			2013		
	Angka Partisipasi Sekolah (A P S)			Angka Partisipasi Sekolah (A P S)			Angka Partisipasi Sekolah (A P S)		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
SUMATERA SELATAN	97,95	86,45	56,54	98,11	88,75	58,66	98,57	89,47	60,74
BENGKULU	98,41	90,97	62,86	98,97	93,22	67,76	99,5	93,16	71,21
LAMPUNG	97,94	86,39	56,24	98,64	90	60,43	99,03	91,06	64,41
KEP. BANGKA BELITUNG	97,28	84,53	49,92	97,72	84,09	52,02	98,13	84,63	56,42
KEP. RIAU	97,61	96,57	68,17	98,44	94,93	70,94	98,63	96,67	73,66
DKI JAKARTA	98,14	92,38	59,72	99,04	94,07	61,87	99,4	95,47	66,09
JAWA BARAT	97,89	85,97	50,36	98,36	88,68	56,3	98,85	89,4	59,98
JAWA TENGAH	98,61	88,38	54,76	98,87	89,59	58,65	99,28	90,73	59,88
DI YOGYAKARTA	99,43	97,66	75,6	99,77	98,35	80,04	99,96	96,79	81,41
JAWA TIMUR	98,27	90,11	58,54	98,65	91,62	61,87	99,05	92,83	62,32
BANTEN	98,22	88,47	56,01	98,26	91,1	59,8	98,6	91,32	62,89
BALI	98,38	92,36	68,22	99,18	95,04	71,44	99,26	95,9	74,03
NUSA TENGGARA BARAT	97,85	91,4	60,09	98,18	91,25	61,07	98,2	92,23	66,4
NUSA TENGGARA TIMUR	96,03	86,01	60,06	96,15	88,62	61,92	97,34	89,43	64,81
KALIMANTAN BARAT	96,28	83,94	50,17	96,66	85,52	55,13	96,91	85,94	58,8
KALIMANTAN TENGAH	98,12	85,53	55,75	98,62	85,68	55,06	99,05	86,14	59,18
KALIMANTAN SELATAN	97,75	83,05	53,89	97,85	85,62	58,16	98,76	86,6	60,19
KALIMANTAN TIMUR	98,62	92,4	69,1	99,12	96,32	71,73	99,46	96,49	73,92
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI UTARA	98,02	87,59	60,77	98,16	88,34	65,28	98,92	90,48	66,88
SULAWESI TENGAH	97	85,32	59,49	96,87	85,81	61,05	97,7	87,49	66,12
SULAWESI SELATAN	97,22	84,67	57,15	97,62	87,85	62,16	98,24	89,66	62,67
SULAWESI TENGGARA	97,36	86,89	62,29	97,57	88,25	65,04	98	89,12	65,84
GORONTALO	96,91	83,75	58,14	97,74	82,91	59,37	97,9	86,23	59,91
SULAWESI BARAT	95,86	82,69	57,3	96,19	82,17	56,8	95,2	84,55	59,62
MALUKU	98,39	92,06	67,34	98,27	94,76	68,33	98,79	94,44	70,28
MALUKU UTARA	97,15	90,11	65,12	98,31	90,83	69,01	98,02	93,4	69,04
PAPUA BARAT	94,5	88,37	65,53	95,59	91,13	65,04	95,59	92,94	71,89
PAPUA	72,61	70,43	49,71	75,45	69,07	50,01	75,23	72,64	53,19

Provinsi	2014			2015			2016			2017		
	Angka Partisipasi Sekolah (A P S)			Angka Partisipasi Sekolah (A P S)			Angka Partisipasi Sekolah (A P S)			Angka Partisipasi Sekolah (A P S)		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
ACEH	99,84	97,38	80,89	99,9	97,71	81,43	99,82	97,89	81,82	99,85	98,09	82,15
SUMATERA UTARA	99,26	96,06	75,78	99,35	96,34	76,23	99,42	96,48	76,43	99,49	96,6	76,76
SUMATERA BARAT	99,27	95,84	81,97	99,44	95,98	82,53	99,43	96,17	82,62	99,5	96,29	82,86
RIAU	98,67	94,36	75,3	98,79	94,48	75,57	98,87	94,62	75,68	98,98	94,73	76,52
JAMBI	99,46	94,88	70,41	99,55	95,06	70,75	99,57	95,35	71,2	99,59	95,89	71,54
SUMATERA SELATAN	99,47	93,36	67,84	99,53	93,52	68,4	99,61	93,68	68,67	99,63	94,01	69,05

Provinsi	2014			2015			2016			2017		
	Angka Partisipasi Sekolah (A P S)			Angka Partisipasi Sekolah (A P S)			Angka Partisipasi Sekolah (A P S)			Angka Partisipasi Sekolah (A P S)		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
BENGKULU	99,45	96,71	77,92	99,65	96,83	78,16	99,7	96,96	78,37	99,8	97,2	79,07
LAMPUNG	99,56	94,01	68,75	99,62	94,24	69,04	99,63	94,32	69,31	99,78	94,76	70,03
KEP. BANGKA BELITUNG	99,16	91,53	65,78	99,22	91,82	66,17	99,25	92,03	66,35	99,64	92,41	66,99
KEP. RIAU	99,12	98,56	81,57	99,34	98,67	81,84	99,33	98,78	82,04	99,32	99,08	82,8
DKI JAKARTA	99,47	96,69	70,23	99,56	97,19	70,73	99,61	97,47	70,83	99,67	97,64	71,5
JAWA BARAT	99,3	92,84	65,48	99,57	93,19	65,72	99,54	93,41	65,82	99,51	93,77	66,62
JAWA TENGAH	99,51	94,85	67,54	99,56	95,3	67,66	99,58	95,41	67,95	99,62	95,48	68,48
DI YOGYAKARTA	99,94	99,48	86,44	99,89	99,68	86,78	99,84	99,62	87,2	99,87	99,63	87,61
JAWA TIMUR	99,38	96,36	70,5	99,45	96,53	70,44	99,46	96,69	70,54	99,57	96,77	71,51
BANTEN	99,29	94,87	66,25	99,41	95,29	66,73	99,43	95,59	67	99,31	95,67	67,77
BALI	99,36	97,23	81,59	99,41	97,41	81,69	99,35	97,55	81,98	99,44	97,72	82,16
NUSA TENGGARA BARAT	99,11	97,27	75,68	99,48	97,44	75,86	99,42	97,6	76,24	99,43	97,69	76,61
NUSA TENGGARA TIMUR	97,99	94,26	73,96	98,13	94,39	74,25	98,24	94,6	74,56	98,27	94,76	74,65
KALIMANTAN BARAT	98,18	91,76	66,48	98,27	91,91	66,83	98,39	92,12	67,16	98,44	92,51	67,53
KALIMANTAN TENGAH	99,46	92,94	65,84	99,54	93,13	66	99,49	93,25	66,12	99,5	93,37	66,62
KALIMANTAN SELATAN	99,24	91,83	67,18	99,43	91,91	67,49	99,48	92,21	67,91	99,55	92,33	68,3
KALIMANTAN TIMUR	99,35	97,89	80,5	99,63	97,92	80,68	99,54	98,18	80,81	99,67	98,79	81,32
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	98,39	93,55	74,41	98,45	93,79	74,72	98,34	96,04	75,12
SULAWESI UTARA	98,95	94,34	71,98	99,33	94,59	72,22	99,36	94,89	72,57	99,37	94,91	73,04
SULAWESI TENGAH	97,71	91,23	73,64	98,02	91,8	73,8	98	92,08	73,96	98,15	92,41	74,87
SULAWESI SELATAN	98,91	92,57	69,38	99,03	92,66	69,66	99,12	92,85	70,09	99,16	93,09	70,6
SULAWESI TENGGARA	99,11	93,53	72,25	99,3	93,67	72,42	99,28	93,94	72,67	99,32	94,08	72,94
GORONTALO	98,4	90,47	68,69	98,69	90,75	69,03	98,71	91,01	69,12	98,76	91,23	69,86
SULAWESI BARAT	97,91	89,26	66,97	98	89,84	67,14	98,08	89,93	67,34	98,1	89,88	68,03
MALUKU	99,19	96,35	77,48	99,38	96,44	77,87	99,39	96,6	78,19	99,72	96,86	79,08

Provinsi	2014			2015			2016			2017		
	Angka Partisipasi Sekolah (A P S)			Angka Partisipasi Sekolah (A P S)			Angka Partisipasi Sekolah (A P S)			Angka Partisipasi Sekolah (A P S)		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
MALUKU UTARA	98,89	96,24	74,83	99,08	96,68	75,16	99,14	96,9	75,58	99,19	97,24	76,06
PAPUA BARAT	96,65	96,28	79,87	96,74	96,58	79,99	96,85	96,86	80,28	97,27	96,92	80,6
PAPUA	80,69	78,07	61,63	81,04	78,14	61,96	81,11	78,86	62,07	81,8	79,09	63,35

Lampiran 3: Angka Partisipasi Murni menurut Provinsi 2011-2017

Provinsi	2011			2012			2013		
	Angka Partisipasi Murni (A P M)			Angka Partisipasi Murni (A P M)			Angka Partisipasi Murni (A P M)		
	SD/MI/ Paket A	SMP/ Mts/ Paket B	SM/SM K/MA/ Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mt s/Paket B	SM/SM K/MA/ Paket C	SD/M I/Pak et A	SMP/ Mts/ Paket B	SM/SM K/MA/ Paket C
ACEH	92,51	74,87	61,37	94,66	78,61	61,82	97,09	82,57	63,43
SUMATERA UTARA	91,61	68,08	57,48	93,35	70,57	60,29	95,64	73,98	62,19
SUMATERA BARAT	93,44	67,77	54,78	95,77	70,08	55,68	97,1	72,56	61
RIAU	91,63	66,26	53,31	92,62	70,18	53,06	95,33	74,23	58,74
JAMBI	92,36	67,43	49,46	94,1	69,56	46,09	96,43	73,23	52,13
SUMATERA SELATAN	89,57	64,74	45,79	92,79	67,94	49,34	95,12	72,06	51,67
BENGGULU	92,6	68,81	50,78	94,1	71,97	50,83	97,37	73,07	60,32
LAMPUNG	91,63	67,06	46,05	93,5	72,08	46,14	97,41	74,96	53,48
KEP. BANGKA BELITUNG	90,92	60,85	41,92	94,12	63,28	42,93	95,72	63,83	50,8
KEP. RIAU	92,24	74,29	56,85	94,5	78,67	63,53	97,64	83,31	67,62
DKI JAKARTA	90,26	69,66	49,91	90,48	70,31	54,25	96,07	75,46	55,4
JAWA BARAT	92,26	69,89	42,45	93,41	73,54	51,24	97,08	76,76	52,25
JAWA TENGAH	90,2	69,92	47,17	92,05	72,52	51,11	95,68	74,94	51,81
DI YOGYAKARTA	92,04	69,48	59,25	96,11	72,44	63,54	98,75	75,64	64,86
JAWA TIMUR	91,9	71,78	49,29	92,93	74,42	52,36	96,1	77,36	53,3
BANTEN	92,41	71,01	46,24	93,67	73,79	53	96,24	78,17	53,28
BALI	90,08	69,53	59,48	91,01	74,46	63,55	94,11	80,69	67,04
NUSA TENGGARA BARAT	92,61	76,56	53,41	93,61	77,44	53,81	96,71	80,21	58
NUSA TENGGARA TIMUR	91,97	56,51	40,33	92,16	55,83	38,19	93,53	59,32	47,3
KALIMANTAN BARAT	92,3	59,05	36,86	92,93	59,72	37,44	94,39	59,53	44,79
KALIMANTAN TENGAH	92,15	66,62	44,99	96,03	65,11	43,55	97,41	68,15	45,43
KALIMANTAN SELATAN	92,24	66,35	43,36	93,16	66,94	49,39	96,74	69,57	50,05
KALIMANTAN TIMUR	92,29	72,5	55,52	94,06	74,12	60,34	95,76	75,79	62,91
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI UTARA	85,88	60,94	50,15	87,78	62,39	51,15	91,61	64,55	57,26

Provinsi	2011			2012			2013		
	Angka Partisipasi Murni (A P M)			Angka Partisipasi Murni (A P M)			Angka Partisipasi Murni (A P M)		
	SD/MI/ Paket A	SMP/ Mts/ Paket B	SM/SM K/MA/ Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mt s/ Paket B	SM/SM K/MA/ Paket C	SD/M I/ Pak et A	SMP/ Mts/ Paket B	SM/SM K/MA/ Paket C
SULAWESI TENGAH	90,08	62,99	48,5	90,79	62,36	52,25	90,27	63,72	58,38
SULAWESI SELATAN	89,48	65,87	48,17	90,61	69,68	54,2	95,67	69,79	54,26
SULAWESI TENGGARA	88,55	64,22	51,32	92,54	68,84	50,67	95,15	69,68	55,5
GORONTALO	90,03	60,43	44,46	92	60,48	45,47	95,93	64,26	48,91
SULAWESI BARAT	89,18	62,76	48,41	91,29	61,75	44,54	93,52	62	52,22
MALUKU	88,38	63,19	52,78	90,05	66,03	50,2	92,25	67,06	55,59
MALUKU UTARA	89,83	65,99	52,36	92,59	64,43	56,76	95,47	70,73	59,54
PAPUA BARAT	87,77	56,68	48,33	88,84	57,9	44,98	89,71	60,9	53,8
PAPUA	69,6	44,44	30,82	70,78	43,61	29,16	72,57	45,76	36,73

Provinsi	2014			2015			2016			2017		
	Angka Partisipasi Murni (A P M)			Angka Partisipasi Murni (A P M)			Angka Partisipasi Murni (A P M)			Angka Partisipasi Murni (A P M)		
	SD/M I/ Pak et A	SMP/ Mts/ Paket B	SM/S MK/ MA/ P aket C	SD/M I/ Pak et A	SMP/ Mts/ Paket B	SM/S MK/ MA/ P aket C	SD/M I/ Pak et A	SMP/ Mts/ Paket B	SM/S MK/ MA/ P aket C	SD/M I/ Pak et A	SMP/ Mts/ Paket B	SM/SM K/MA/ Paket C
ACEH	97,8	85,2	69,2	97,99	85,55	69,82	98,16	85,73	70	98,54	86,31	70,15
SUMATERA UTARA	96,29	78,33	65,8	96,47	78,48	66,69	96,57	78,71	66,85	97,22	79,12	67,05
SUMATERA BARAT	97,92	75,61	66,52	98,12	76	66,9	98,23	76,19	67,12	98,64	76,47	67,3
RIAU	96,42	77,67	62,31	96,63	78,22	62,6	96,74	78,53	62,76	97,08	78,87	63,02
JAMBI	97,15	77,34	59,22	97,68	77,94	59,41	97,81	78,09	59,52	98,41	78,57	59,98
SUMATERA SELATAN	96,13	75,87	57,92	96,41	76,18	58,27	96,59	76,43	58,59	97,16	76,89	59,06
BENGKULU	98,03	76,44	64,61	98,1	76,88	64,97	98,22	77,02	65,29	98,6	77,85	65,33
LAMPUNG	97,98	77,98	57,64	98,32	78,2	58,39	98,46	78,34	58,85	99,02	79,24	58,97
KEP. BANGKA BELITUNG	96,49	71,83	56,93	96,66	72,42	57,02	96,75	72,75	57,22	97,42	73,06	57,69
KEP. RIAU	98,22	83,36	70,52	98,68	83,77	71,23	98,83	84,06	71,58	98,93	84,28	71,98
DKI JAKARTA	96,84	79,61	58,79	96,91	80,2	59,04	97,01	80,35	59,3	97,64	80,72	59,54
JAWA BARAT	97,6	79,3	56,48	97,68	79,55	56,73	97,82	79,76	56,92	98,05	80,29	57,22
JAWA TENGAH	96,45	78,57	58,11	96,57	78,66	58,27	96,64	78,89	58,49	97,13	79,13	59,2
DI YOGYAKARTA	98,98	82,2	68,46	99,23	82,86	68,6	99,21	83,05	68,96	99,29	83,25	69,66

Provinsi	2014			2015			2016			2017		
	Angka Partisipasi Murni (A P M)			Angka Partisipasi Murni (A P M)			Angka Partisipasi Murni (A P M)			Angka Partisipasi Murni (A P M)		
	SD/M I/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/S MK/MA/Paket C	SD/M I/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/S MK/MA/Paket C	SD/M I/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/S MK/MA/Paket C	SD/M I/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SM K/MA/Paket C
JAWA TIMUR	96,98	80,94	60	97,38	81,16	60,31	97,49	81,35	60,76	97,77	81,52	61,49
BANTEN	96,69	79,56	56,87	96,98	79,84	57,04	97,22	79,93	57,21	97,56	80,59	57,88
BALI	95,29	84,58	70,83	95,64	84,78	71,53	95,75	84,99	71,71	96,09	85,32	72,4
NUSA TENGGARA BARAT	97,62	82,29	64,11	97,8	82,83	64,97	97,9	83,17	65,19	98,13	83,57	65,67
NUSA TENGGARA TIMUR	94,56	65,86	52,15	94,95	66,32	52,51	95,24	66,56	52,87	95,4	67,16	53,32
KALIMANTAN BARAT	95,75	64,23	50,06	96,09	64,55	50,32	96,22	64,69	50,43	96,59	65,19	50,96
KALIMANTAN TENGAH	98,13	75,4	51,75	98,54	75,76	52,36	98,67	75,92	52,5	98,94	76,14	53,86
KALIMANTAN SELATAN	97,44	72,4	55,04	97,75	72,51	55,58	98,05	72,7	55,91	98,45	73,37	57,15
KALIMANTAN TIMUR	96,81	78,96	67,41	97	79,06	67,78	97,13	79,2	67,92	97,43	79,58	68,23
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	91,83	77,25	62,34	92,18	77,46	62,8	92,46	77,66	63,15
SULAWESI UTARA	93,42	72,32	61,69	93,97	73,02	62,23	94,12	73,15	62,5	94,46	73,87	62,81
SULAWESI TENGAH	91,77	70,62	63,13	92,35	71,1	63,32	92,48	71,25	63,61	92,75	72,25	63,8
SULAWESI SELATAN	96,39	73,18	59,1	96,84	73,51	59,47	96,99	73,67	59,62	97,49	74,36	59,86
SULAWESI TENGGARA	95,97	74,77	61,91	96,15	75,43	62,23	96,27	75,54	62,63	96,62	76,49	62,71
GORONTALO	96,74	68,29	56,07	97,09	68,71	56,24	97,23	68,89	56,37	97,54	69,15	56,82
SULAWESI BARAT	94,97	68,37	56,65	95,29	68,92	56,78	95,41	69,1	57,08	95,51	69,4	57,46
MALUKU	93,74	73,1	62,6	94,34	73,29	63,07	94,5	73,4	63,49	95,5	73,99	63,65
MALUKU UTARA	96,21	75,03	63,1	96,65	75,38	63,2	96,75	75,68	63,47	97,01	76,26	63,52
PAPUA BARAT	92,76	68,18	62,29	92,9	68,29	62,4	93,06	68,58	62,62	93,58	68,92	62,74
PAPUA	78,36	53,68	43,11	78,56	54,21	43,22	78,66	54,26	43,27	78,83	56,13	43,48

Lampiran 4: Harapan Lama Sekolah menurut Provinsi 2011-2017

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ACEH	13,03	13,19	13,36	13,53	13,73	13,89	14,13
SUMATERA UTARA	11,83	11,97	12,41	12,61	12,82	13,00	13,10

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SUMATERA BARAT	12,52	12,81	13,16	13,48	13,60	13,79	13,94
RIAU	11,78	11,79	12,27	12,45	12,74	12,86	13,03
JAMBI	11,60	11,73	12,17	12,38	12,57	12,72	12,87
SUMATERA SELATAN	11,21	11,42	11,46	11,75	12,02	12,23	12,35
BENGKULU	11,88	12,20	12,78	13,01	13,18	13,38	13,57
LAMPUNG	11,04	11,37	11,90	12,24	12,25	12,35	12,46
KEP. BANGKA BELITUNG	10,70	10,79	10,96	11,18	11,60	11,71	11,83
KEPULAUAN RIAU	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81
DKI JAKARTA	11,91	11,96	12,24	12,38	12,59	12,73	12,86
JAWA BARAT	10,91	11,24	11,81	12,08	12,15	12,30	12,42
JAWA TENGAH	11,18	11,39	11,89	12,17	12,38	12,45	12,57
D I YOGYAKARTA	14,61	14,64	14,67	14,85	15,03	15,23	15,42
JAWA TIMUR	11,62	11,74	12,17	12,45	12,66	12,98	13,09
BANTEN	11,41	11,79	12,05	12,31	12,35	12,70	12,78
BALI	12,12	12,26	12,40	12,64	12,97	13,04	13,21
NUSA TENGGARA BARAT	11,97	12,21	12,46	12,73	13,04	13,16	13,46
NUSA TENGGARA TIMUR	11,55	11,73	12,27	12,65	12,84	12,97	13,07
KALIMANTAN BARAT	10,80	11,11	11,60	11,89	12,25	12,37	12,50
KALIMANTAN TENGAH	11,15	11,22	11,71	11,93	12,22	12,33	12,45
KALIMANTAN SELATAN	11,14	11,54	11,67	11,96	12,21	12,29	12,46
KALIMANTAN TIMUR	12,06	12,46	12,85	13,17	13,18	13,35	13,49
KALIMANTAN UTARA			12,30	12,52	12,54	12,59	12,79
SULAWESI UTARA	11,50	11,77	11,88	12,16	12,43	12,55	12,66
SULAWESI TENGAH	11,82	12,09	12,36	12,71	12,72	12,92	13,04
SULAWESI SELATAN	11,82	12,16	12,52	12,90	12,99	13,16	13,28
SULAWESI TENGGARA	12,30	12,45	12,45	12,78	13,07	13,24	13,36
GORONTALO	11,68	11,78	12,13	12,49	12,70	12,88	13,01
SULAWESI BARAT	11,21	11,28	11,46	11,78	12,22	12,34	12,48
MALUKU	12,85	12,96	13,35	13,53	13,56	13,73	13,91
MALUKU UTARA	11,79	12,19	12,48	12,72	13,10	13,45	13,56
PAPUA BARAT	11,21	11,45	11,67	11,87	12,06	12,26	12,47
PAPUA	8,92	9,11	9,58	9,94	9,95	10,23	10,54

Lampiran 5: Rata-Rata Lama Sekolah menurut Provinsi 2011-2017

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ACEH	8,32	8,36	8,44	8,71	8,77	8,86	8,98
SUMATERA UTARA	8,61	8,72	8,79	8,93	9,03	9,12	9,25
SUMATERA BARAT	8,20	8,27	8,28	8,29	8,42	8,59	8,72
RIAU	8,29	8,34	8,38	8,47	8,49	8,59	8,76
JAMBI	7,48	7,69	7,80	7,92	7,96	8,07	8,15
SUMATERA SELATAN	7,42	7,50	7,53	7,66	7,77	7,83	7,99
BENGKULU	7,93	8,01	8,09	8,28	8,29	8,37	8,47
LAMPUNG	7,28	7,30	7,32	7,48	7,56	7,63	7,79

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KEP. BANGKA BELITUNG	7,19	7,25	7,32	7,35	7,46	7,62	7,78
KEPULAUAN RIAU	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79
DKI JAKARTA	10,40	10,43	10,47	10,54	10,70	10,88	11,02
JAWA BARAT	7,46	7,52	7,58	7,71	7,86	7,95	8,14
JAWA TENGAH	6,74	6,77	6,80	6,93	7,03	7,15	7,27
D I YOGYAKARTA	8,53	8,63	8,72	8,84	9,00	9,12	9,19
JAWA TIMUR	6,79	6,85	6,90	7,05	7,14	7,23	7,34
BANTEN	7,95	8,06	8,17	8,19	8,27	8,37	8,53
BALI	7,77	8,05	8,10	8,11	8,26	8,36	8,55
NUSA TENGGARA BARAT	6,07	6,33	6,54	6,67	6,71	6,79	6,90
NUSA TENGGARA TIMUR	6,60	6,71	6,76	6,85	6,93	7,02	7,15
KALIMANTAN BARAT	6,32	6,62	6,69	6,83	6,93	6,98	7,05
KALIMANTAN TENGAH	7,68	7,73	7,79	7,82	8,03	8,13	8,29
KALIMANTAN SELATAN	7,37	7,48	7,59	7,60	7,76	7,89	7,99
KALIMANTAN TIMUR	8,79	8,83	8,87	9,04	9,15	9,24	9,36
KALIMANTAN UTARA			8,10	8,35	8,36	8,49	8,62
SULAWESI UTARA	8,68	8,71	8,79	8,86	8,88	8,96	9,14
SULAWESI TENGAH	7,69	7,73	7,82	7,89	7,97	8,12	8,29
SULAWESI SELATAN	7,33	7,37	7,45	7,49	7,64	7,75	7,95
SULAWESI TENGGARA	7,67	7,76	7,93	8,02	8,18	8,32	8,46
GORONTALO	6,89	6,92	6,96	6,97	7,05	7,12	7,28
SULAWESI BARAT	6,65	6,76	6,87	6,88	6,94	7,14	7,31
MALUKU	8,72	8,80	8,81	9,15	9,16	9,27	9,38
MALUKU UTARA	7,98	8,04	8,27	8,34	8,37	8,52	8,61
PAPUA BARAT	6,82	6,87	6,91	6,96	7,01	7,06	7,15
PAPUA	5,60	5,73	5,74	5,76	5,99	6,15	6,27

Lampiran 6: Angka Melek Huruf menurut Provinsi 2011-2017

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan						
	Laki-laki+Perempuan						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	95,84	96,11	96,66	97,42	97,63	97,74	98,15
Sumatera Utara	96,83	97,35	97,81	98,57	98,68	98,88	98,96
Sumatera Barat	96,20	96,67	97,38	98,44	98,56	98,81	98,93
Riau	97,61	97,79	97,88	98,75	98,87	99,07	99,21
Jambi	95,52	95,97	96,72	97,77	97,84	98,01	98,28
Sumatera Selatan	96,65	96,90	97,24	98,14	98,22	98,46	98,65
Bengkulu	95,13	95,69	96,48	97,52	97,63	97,75	98,04
Lampung	95,02	95,13	95,81	96,54	96,67	96,78	97,21
Kepulauan Bangka Belitung	95,60	95,88	96,41	97,60	97,63	97,66	97,97
Kepulauan Riau	97,67	97,80	97,91	98,71	98,79	98,84	98,88

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan						
	Laki-laki+Perempuan						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	98,83	99,07	99,13	99,54	99,59	99,64	99,68
Jawa Barat	95,96	96,18	96,70	97,96	98,01	98,22	98,38
Jawa Tengah	90,34	90,45	91,27	92,98	93,12	93,30	93,99
DI Yogyakarta	91,49	92,02	92,82	94,44	94,50	94,59	95,09
Jawa Timur	88,52	89,28	90,14	91,36	91,47	91,59	92,53
Banten	96,25	96,51	96,64	97,24	97,37	97,55	97,79
Bali	89,17	90,17	90,84	92,56	92,77	92,82	93,59
Nusa Tenggara Barat	83,24	83,68	84,67	86,96	86,97	87,06	88,53
Nusa Tenggara Timur	87,63	88,73	90,36	91,18	91,45	91,52	92,75
Kalimantan Barat	90,03	91,13	91,34	92,30	92,32	92,39	93,25
Kalimantan Tengah	96,86	97,48	97,93	98,82	98,88	98,97	99,08
Kalimantan Selatan	95,66	96,43	97,04	98,19	98,21	98,28	98,52
Kalimantan Timur	96,99	97,55	97,51	98,59	98,69	98,82	99,04
Kalimantan Utara	-	-	-	-	94,99	95,05	95,63
Sulawesi Utara	98,85	98,85	99,13	99,60	99,63	99,79	99,73
Sulawesi Tengah	94,51	94,95	95,95	97,08	97,34	97,51	97,83
Sulawesi Selatan	88,07	88,73	90,16	91,26	91,29	91,52	92,53
Sulawesi Tenggara	91,29	91,49	92,61	94,03	94,10	94,25	95,05
Gorontalo	94,69	95,22	96,83	97,90	98,24	98,44	98,47
Sulawesi Barat	87,61	88,79	90,79	92,27	92,64	92,75	93,71
Maluku	96,63	97,08	97,83	98,77	98,85	98,94	99,19
Maluku Utara	96,01	96,43	97,37	98,36	98,49	98,67	98,78
Papua Barat	92,41	94,74	95,59	96,75	96,88	97,05	97,38
Papua	64,08	65,69	67,31	70,78	70,83	71,02	75,80

Lampiran 7: Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi 2011-2017

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ACEH	19,57	18,58	17,72	16,98	17,11	16,43	15,92
SUMATERA UTARA	11,33	10,41	10,39	9,85	10,79	10,27	9,28
SUMATERA BARAT	9,04	8	7,56	6,89	6,71	7,14	6,75
RIAU	8,47	8,05	8,42	7,99	8,82	7,67	7,41
JAMBI	8,65	8,28	8,42	8,39	9,12	8,37	7,9
SUMATERA SELATAN	14,24	13,48	14,06	13,62	13,77	13,39	13,1
BENGKULU	17,5	17,51	17,75	17,09	17,16	17,03	15,59
LAMPUNG	16,93	15,65	14,39	14,21	13,53	13,86	13,04
KEP. BANGKA BELITUNG	5,75	5,37	5,25	4,97	4,83	5,04	5,3
KEP. RIAU	7,4	6,83	6,35	6,4	5,78	5,84	6,13
DKI JAKARTA	3,75	3,7	3,72	4,09	3,61	3,75	3,78
JAWA BARAT	10,65	9,89	9,66	9,18	9,57	8,77	7,83

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
JAWA TENGAH	15,76	14,98	14,44	13,58	13,32	13,19	12,23
DI YOGYAKARTA	16,08	15,88	15,03	14,55	13,16	13,1	12,36
JAWA TIMUR	14,23	13,08	12,73	12,28	12,28	11,85	11,2
BANTEN	6,32	5,71	5,89	5,51	5,75	5,36	5,59
BALI	4,2	3,95	4,49	4,76	5,25	4,15	4,14
NUSA TENGGARA BARAT	19,73	18,02	17,25	17,05	16,54	16,02	15,05
NUSA TENGGARA TIMUR	21,23	20,41	20,24	19,6	22,58	22,01	21,38
BARAT KALIMANTAN	8,6	7,96	8,74	8,07	8,44	8	7,86
KALIMANTAN TENGAH	6,56	6,19	6,23	6,07	5,91	5,36	5,26
KALIMANTAN SELATAN	5,29	5,01	4,76	4,81	4,72	4,52	4,7
KALIMANTAN TIMUR	6,77	6,38	6,38	6,31	6,1	6	6,08
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	6,32	6,99	6,96
SULAWESI UTARA	8,51	7,64	8,5	8,26	8,98	8,2	7,9
SULAWESI TENGAH	15,83	14,94	14,32	13,61	14,07	14,09	14,22
SULAWESI SELATAN	10,29	9,82	10,32	9,54	10,12	9,24	9,48
SULAWESI TENGGARA	14,56	13,06	13,73	12,77	13,74	12,77	11,97
GORONTALO	18,75	17,22	18,01	17,41	18,16	17,63	17,14
SULAWESI BARAT	13,89	13,01	12,23	12,05	11,9	11,19	11,18
MALUKU	23	20,76	19,27	18,44	19,36	19,26	18,29
MALUKU UTARA	9,18	8,06	7,64	7,41	6,22	6,41	6,44
PAPUA BARAT	31,92	27,04	27,14	26,26	25,73	24,88	23,12
PAPUA	31,98	30,66	31,53	27,8	28,4	28,4	27,76

Lampiran 8: Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
APS 7-12	231	27,33	72,63	99,96	98,0868	,24285	3,69102	13,624
APS 13-15	231	27,35	72,61	99,96	95,7676	,27433	4,16939	17,384
APS 16-18	231	36,72	61,63	98,35	80,1111	,64294	9,77183	95,489
APK SD/MI/Paket A	231	32,40	84,06	116,46	107,9238	,32342	4,91554	24,163
APK SMP/Mts/Paket B	231	35,82	65,01	100,83	88,2762	,38493	5,85042	34,227
APK SM/SMK/MA/Paket C	231	55,28	44,23	99,51	76,4052	,67062	10,19260	103,889
APM SD/MI/Paket A	231	29,69	69,60	99,29	94,5565	,29200	4,43801	19,696
APM SMP/Mts/Paket B	231	42,70	43,61	86,31	72,4819	,51275	7,79316	60,733
APM SM/SMK/MA/Paket C	231	43,24	29,16	72,40	56,9249	,53183	8,08311	65,337
Harapan Lama Sekolah (HLS)	231	6,50	8,92	15,42	12,3778	,06171	,93785	,880
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	231	5,42	5,60	11,02	7,9319	,06476	,98422	,969

Angka Melek Huruf (AMH)	231	35,71	64,08	99,79	94,7861	,37516	5,70190	32,512
Persentase Penduduk Miskin (PPM)	231	28,37	3,61	31,98	11,9738	,41482	6,30472	39,750
Valid N (listwise)	231							

Lampiran 9: Hasil Uji Angka Partisipasi Sekolah (APS)7-12, Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM)APM SD/MI/Paket A, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,793 ^a	,630	,620	3,88797	2,031

a. Predictors: (Constant), AMH, HLS, APK, RLS, APM, APS

b. Dependent Variable: PPM

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5756,348	6	959,391	63,467	,000 ^b
	Residual	3386,045	224	15,116		
	Total	9142,393	230			

a. Dependent Variable: PPM

b. Predictors: (Constant), AMH, HLS, APK, RLS, APM, APS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	95,162	8,055		11,814	,000		
	APS	-,668	,188	-,391	-3,551	,000	,136	7,333
	APK	,380	,107	,296	3,556	,000	,238	4,204
	APM	-1,126	,152	-,793	-7,420	,000	,145	6,908
	HLS	4,422	,463	,658	9,549	,000	,348	2,870
	RLS	-3,514	,489	-,549	-7,190	,000	,284	3,523
	AMH	,221	,118	,200	1,875	,062	,146	6,868

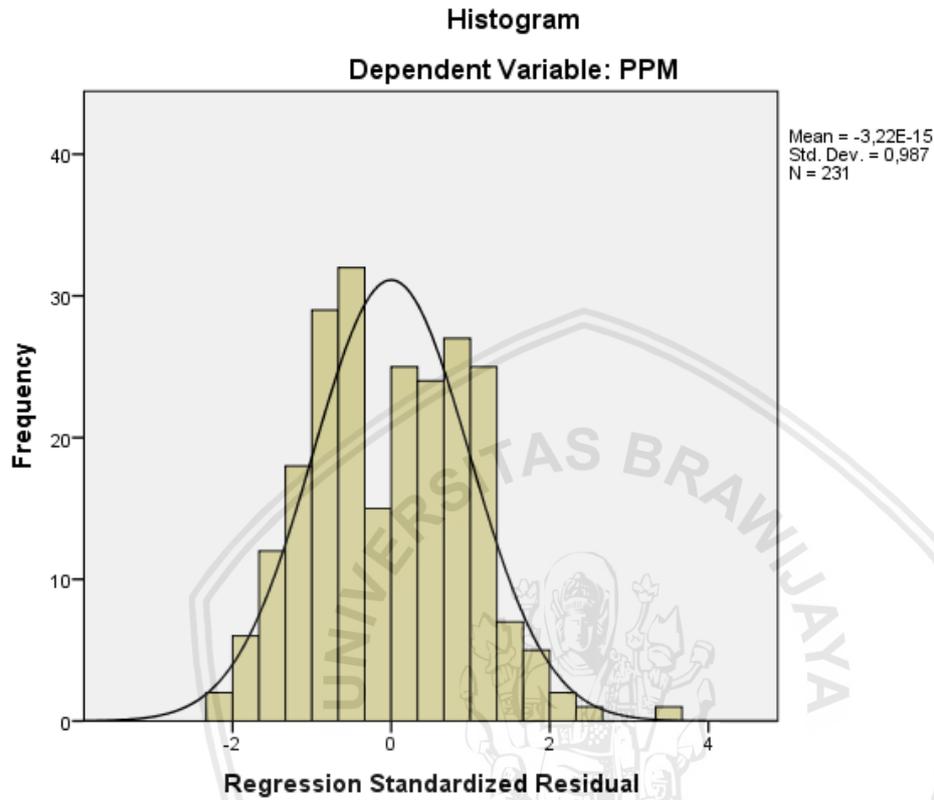
a. Dependent Variable: PPM

Coefficient Correlations^a

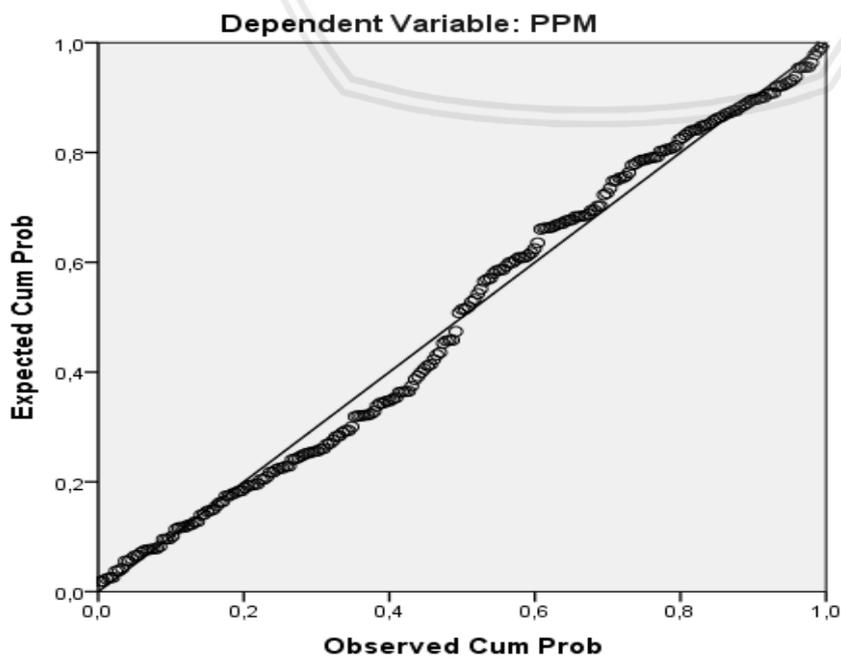
Model		AMH	HLS	APK	RLS	APM	APS	
1	Correlations	AMH	1,000	,483	-,467	-,724	,133	-,608
		HLS	,483	1,000	-,307	-,591	-,170	-,268
		APK	-,467	-,307	1,000	,524	-,515	,213
		RLS	-,724	-,591	,524	1,000	-,114	,291
		APM	,133	-,170	-,515	-,114	1,000	-,572
		APS	-,608	-,268	,213	,291	-,572	1,000
		AMH	,014	,026	-,006	-,042	,002	-,013
1	Covariances	HLS	,026	,214	-,015	-,134	-,012	-,023
		APK	-,006	-,015	,011	,027	-,008	,004
		RLS	-,042	-,134	,027	,239	-,008	,027

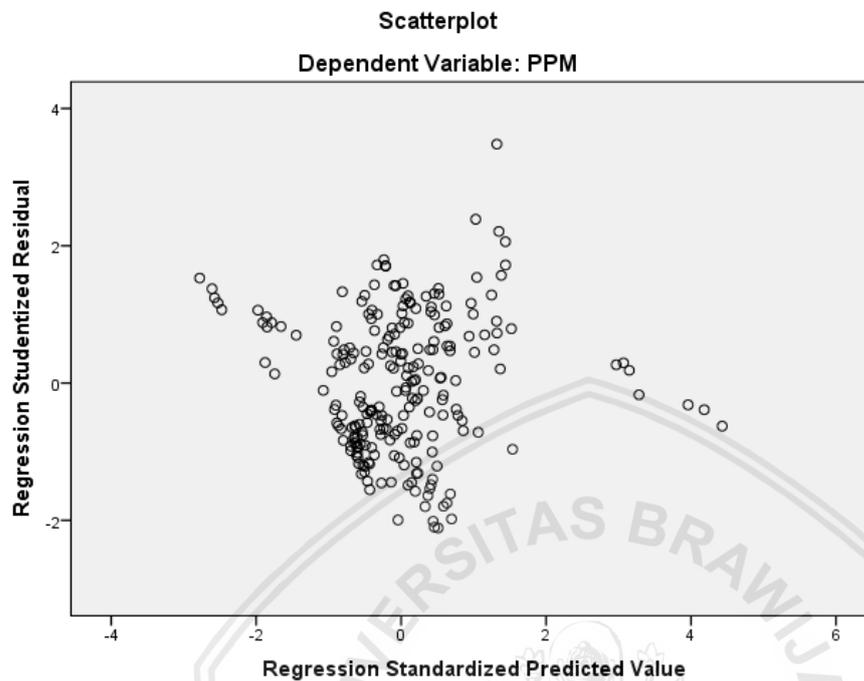
APM	,002	-,012	-,008	-,008	,023	-,016
APS	-,013	-,023	,004	,027	-,016	,035

a. Dependent Variable: PPM



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





Lampiran 10: Hasil Uji Angka Partisipasi Sekolah (APS)13-15, Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/Mts/Paket B, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,722 ^a	,522	,509	,36923	1,579

a. Predictors: (Constant), LN AMH, LN APK, LN HLS, LN APS, LN RLS, LN APM

b. Dependent Variable: LN PPM

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33,303	6	5,551	40,714	,000 ^b
	Residual	30,538	224	,136		
	Total	63,841	230			

a. Dependent Variable: LN PPM

b. Predictors: (Constant), LN AMH, LN APK, LN HLS, LN APS, LN RLS, LN APM

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7,757	2,709		2,864	,005		
1 LN APS	-1,325	,771	-,118	-1,719	,087	,453	2,206
LN APK	2,871	,550	,377	5,217	,000	,409	2,446
LN APM	-2,742	,364	-,598	-7,542	,000	,340	2,941
LN HLS	4,030	,471	,590	8,560	,000	,450	2,223
LN RLS	-2,382	,298	-,559	-7,997	,000	,437	2,287
LN AMH	-1,255	,601	-,159	-2,086	,038	,365	2,736

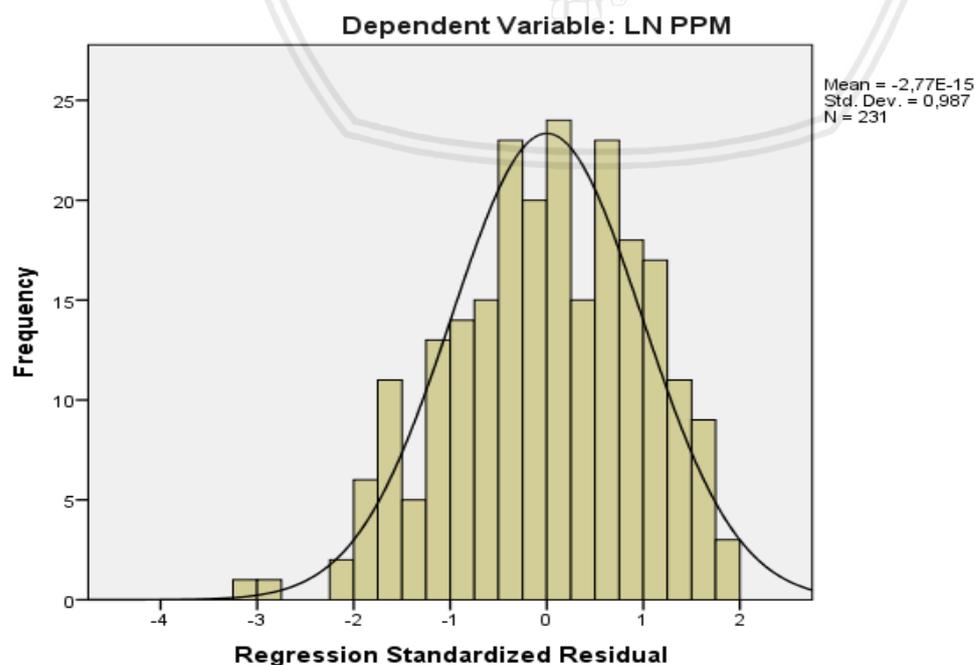
a. Dependent Variable: LN PPM

Coefficient Correlations^a

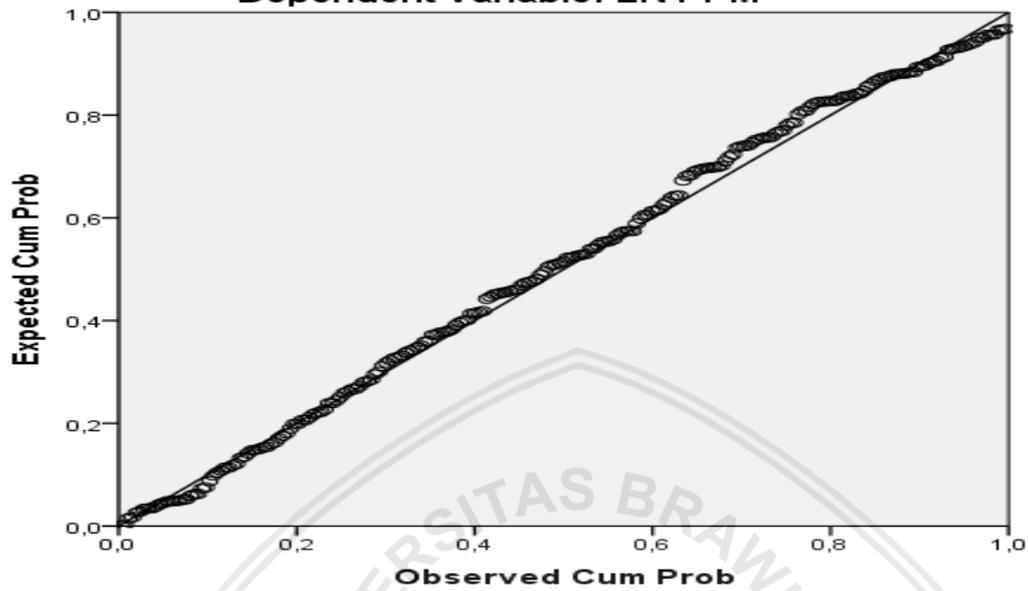
Model		LN AMH	LN APK	LN HLS	LN APS	LN RLS	LN APM	
1	Correlations	LN AMH	1,000	,108	,002	-,486	-,476	-,161
		LN APK	,108	1,000	-,024	-,337	-,172	-,454
		LN HLS	,002	-,024	1,000	-,102	-,221	-,440
		LN APS	-,486	-,337	-,102	1,000	,106	,044
		LN RLS	-,476	-,172	-,221	,106	1,000	-,049
		LN APM	-,161	-,454	-,440	,044	-,049	1,000
1	Covariances	LN AMH	,362	,036	,001	-,225	-,085	-,035
		LN APK	,036	,303	-,006	-,143	-,028	-,091
		LN HLS	,001	-,006	,222	-,037	-,031	-,075
		LN APS	-,225	-,143	-,037	,594	,024	,012
		LN RLS	-,085	-,028	-,031	,024	,089	-,005
		LN APM	-,035	-,091	-,075	,012	-,005	,132

a. Dependent Variable: LN PPM

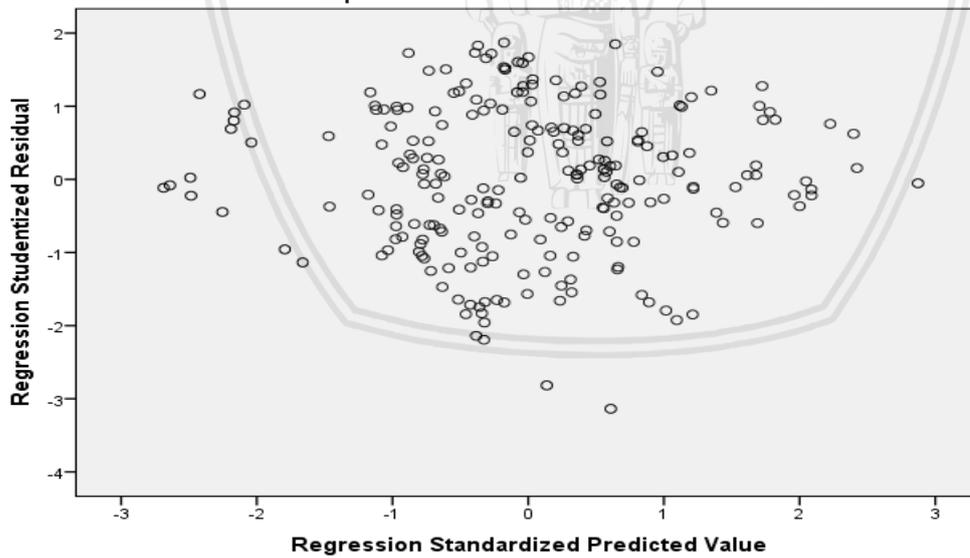
Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: LN PPM



Scatterplot
Dependent Variable: LN PPM



Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,16034
Cases < Test Value	115
Cases >= Test Value	116
Total Cases	231
Number of Runs	95
Z	-2,835
Asymp. Sig. (2-tailed)	,005

a. Median

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,01432
Cases < Test Value	115
Cases >= Test Value	116
Total Cases	231
Number of Runs	109
Z	-,989
Asymp. Sig. (2-tailed)	,323

a. Median

Lampiran 11: Hasil Uji Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,638 ^a	,407	,391	4,92022	1,820

a. Predictors: (Constant), AMH, APM, APS, APK, RLS, HLS

b. Dependent Variable: PPM

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3719,676	6	619,946	25,609	,000 ^b
	Residual	5422,717	224	24,209		
	Total	9142,393	230			

a. Dependent Variable: PPM

b. Predictors: (Constant), AMH, APM, APS, APK, RLS, HLS

Coefficients^a

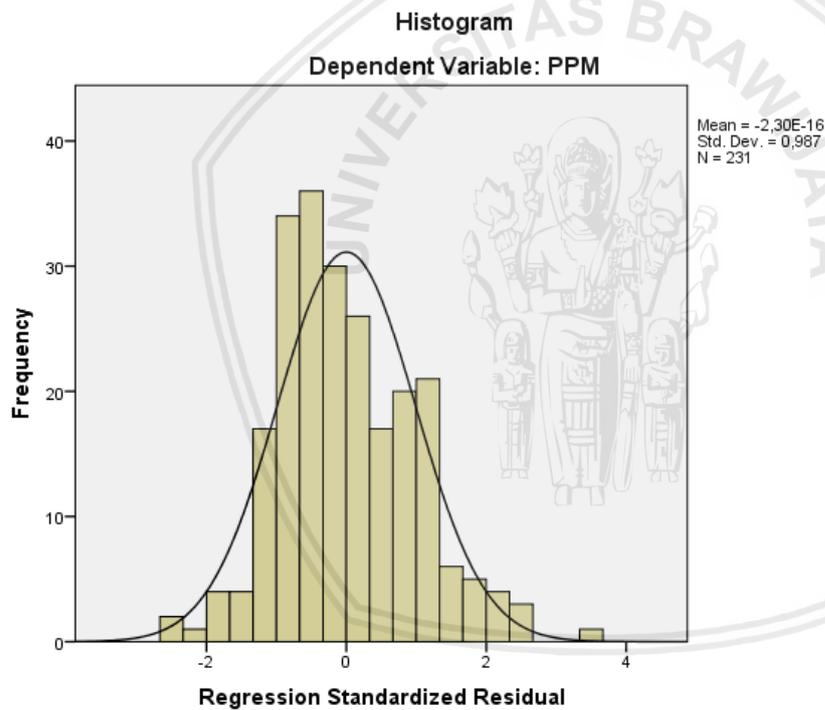
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	52,212	6,695		7,799	,000		
	APS	,087	,036	,135	2,396	,017	,837	1,195
	APK	,106	,053	,171	1,977	,049	,355	2,816
	APM	,000	,001	-,022	-,415	,678	,980	1,021
	HLS	,816	,569	,121	1,434	,153	,369	2,709
	RLS	-2,645	,492	-,413	-5,380	,000	,449	2,225
	AMH	-,468	,077	-,423	-6,058	,000	,542	1,844

a. Dependent Variable: PPM

Coefficient Correlations^a

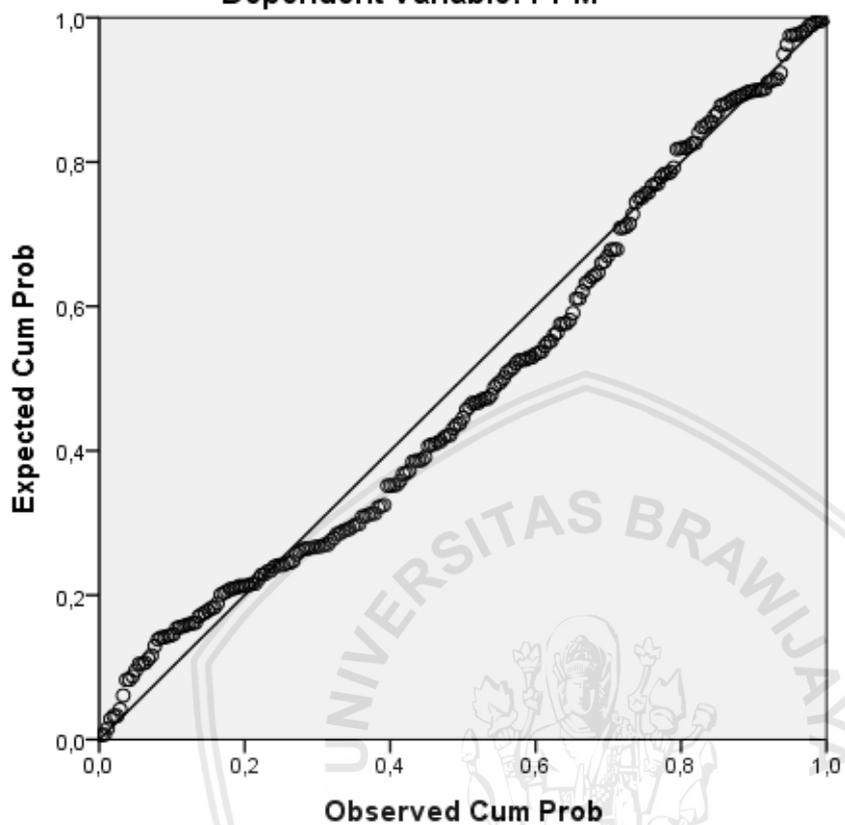
Model		AMH	APM	APS	APK	RLS	HLS	
1	Correlations	AMH	1,000	-,056	,039	,014	-,537	-,132
		APM	-,056	1,000	,121	,079	-,020	-,039
		APS	,039	,121	1,000	,346	-,245	-,196
		APK	,014	,079	,346	1,000	-,234	-,679
		RLS	-,537	-,020	-,245	-,234	1,000	-,095
		HLS	-,132	-,039	-,196	-,679	-,095	1,000
1	Covariances	AMH	,006	-4,187E-006	,000	5,645E-005	-,020	-,006
		APM	-4,187E-006	9,249E-007	4,236E-006	4,052E-006	-9,386E-006	-2,109E-005
		APS	,000	4,236E-006	,001	,001	-,004	-,004
		APK	5,645E-005	4,052E-006	,001	,003	-,006	-,021
		RLS	-,020	-9,386E-006	-,004	-,006	,242	-,027
		HLS	-,006	-2,109E-005	-,004	-,021	-,027	,324

a. Dependent Variable: PPM



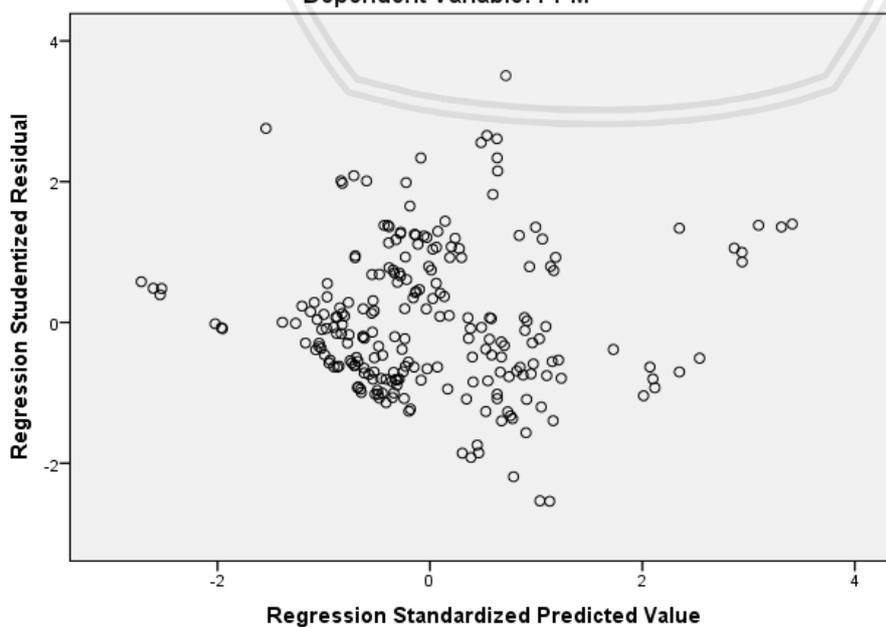
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PPM



Scatterplot

Dependent Variable: PPM



Lampiran 12: Tabel Distribusi t tabel

	Area in right tail = 0.25	Area in right tail = 0.20	Area in right tail = 0.15	Area in right tail = 0.10	Area in right tail = 0.05
DF	t-score	t-score	t-score	t-score	t-score
204	0.676	0.843	1.039	1.286	1.652
205	0.676	0.843	1.039	1.286	1.652
206	0.676	0.843	1.039	1.286	1.652
207	0.676	0.843	1.039	1.286	1.652
208	0.676	0.843	1.039	1.286	1.652
209	0.676	0.843	1.039	1.286	1.652
210	0.676	0.843	1.039	1.286	1.652
211	0.676	0.843	1.039	1.286	1.652
212	0.676	0.843	1.039	1.286	1.652
213	0.676	0.843	1.039	1.286	1.652
214	0.676	0.843	1.039	1.286	1.652
215	0.676	0.843	1.039	1.286	1.652
216	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
217	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
218	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
219	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
220	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
221	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
222	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
223	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
224	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
225	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
226	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
227	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
228	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
229	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
230	0.676	0.843	1.039	1.285	1.652
231	0.676	0.843	1.039	1.285	1.651

Lampiran 13: Tabel Distribusi F tabel

df	α 0.1	0.05
162	1.286799	1.654314
163	1.286767	1.654256
164	1.286735	1.654198
165	1.286703	1.654141
166	1.286672	1.654085
167	1.286641	1.654029
168	1.286611	1.653974
169	1.286581	1.653920
170	1.286551	1.653866
171	1.286522	1.653813
172	1.286493	1.653761
173	1.286464	1.653709
174	1.286436	1.653658
175	1.286408	1.653607
176	1.286380	1.653557
177	1.286353	1.653508
178	1.286326	1.653459
179	1.286299	1.653411
180	1.286272	1.653363
181	1.286246	1.653316
182	1.286220	1.653269
183	1.286195	1.653223
184	1.286169	1.653177
185	1.286144	1.653132
186	1.286120	1.653087
187	1.286095	1.653043
188	1.286071	1.652999
189	1.286047	1.652956
190	1.286023	1.652913
191	1.286000	1.652871
192	1.285976	1.652829
193	1.285953	1.652787
194	1.285931	1.652746
195	1.285908	1.652705
196	1.285886	1.652665
197	1.285864	1.652625
198	1.285842	1.652586
199	1.285820	1.652547
200	1.285799	1.652508
201	1.285778	1.652470
202	1.285757	1.652432
203	1.285736	1.652394
204	1.285715	1.652357
205	1.285695	1.652321
206	1.285675	1.652284
207	1.285655	1.652248
208	1.285635	1.652212
209	1.285615	1.652177
210	1.285596	1.652142
211	1.285577	1.652107
212	1.285558	1.652073
213	1.285539	1.652039
214	1.285520	1.652005
215	1.285502	1.651972
216	1.285483	1.651939
217	1.285465	1.651906
218	1.285447	1.651873
219	1.285429	1.651841
220	1.285411	1.651809
221	1.285394	1.651778
222	1.285377	1.651746
223	1.285359	1.651715
224	1.285342	1.651685
225	1.285325	1.651654
226	1.285309	1.651624
227	1.285292	1.651594
228	1.285276	1.651564
229	1.285259	1.651535
230	1.285243	1.651506
231	1.285227	1.651477
232	1.285211	1.651448

Lampiran 14: Tabel Distribusi Durbin-Watson

Critical Values for the Durbin-Watson Test: 5% Significance Level			
N=200,210,220,...,500			
K=2 to 20			
T	K	dL	dU
200.	2.	1.75844	1.77852
230.	2.	1.77525	1.79270
230.	3.	1.76647	1.80154
230.	4.	1.75763	1.81045
230.	5.	1.74873	1.81945
230.	6.	1.73977	1.82854
230.	7.	1.73075	1.83771
230.	8.	1.72168	1.84697
230.	9.	1.71254	1.85632
230.	10.	1.70335	1.86574
230.	11.	1.69410	1.87524
230.	12.	1.68479	1.88483
230.	13.	1.67544	1.89450

